



LAPORAN PENELITIAN

**KAJIAN PENGEMBANGAN MODEL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MISKIN MELALUI OPTIMALISASI
PERAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) PURNA**

KERJASAMA ANTARA

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS DR. SOETOMO SURABAYA**

SEMESTER GASAL TA 2013/2014

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN KAJIAN**

**Kajian Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat
Miskin Melalui Optimalisasi Peran Tenaga
Kerja Indonesia (TKI) Purna**

Surabaya, 28 November 2013

Mengetahui :

Dekan

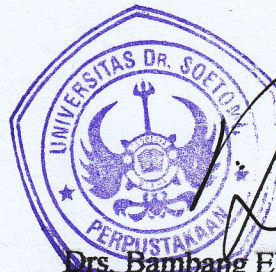


Drs. Basuki Nugroho, M.Si
NIP. 19570902 198603 1 001

Ketua LPM
Universitas Dr. Soetomo



Ir. Indra Wirawan, M.Si
NPP. 90.01.1.062



Drs. Bambang Eko Rusdianto
NPP. 85.01.2.027

ORGANISASI PENELITI

1. Judul Penelitian : **Kajian Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Optimalisasi Peran Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Purna**

2. Peneliti
 - a. Ketua Tim : Prof. Dr.Sarmini, M.Hum
 - b. Anggota Tim : 1) DR. Eny Haryati, M.Si
2) Sri Roekminiati, S.Sos. M.Kp
3) Drs. I.Wayan Nuada, M.Si

3. Lembaga Pelaksana : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur, Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Surabaya dan Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Dr. Soetomo

4. Jangka Waktu : 3(tiga) bulan

KATA PENGANTAR

Kiranya tiada kata indah yang patut kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, selain puji syukur, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Tim Peneliti dapat menyelesaikan penyusunan Laporan **“Kajian Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Optimalisasi Peran Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Purna”** ini. Dengan penuh rasa hormat Tim Peneliti mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur yang telah memberikan kepercayaan kepada Tim Peneliti untuk melakukan kajian ini.

Dalam rangka pelaksanaan kajian ini, Tim Peneliti melakukan penelitian lapangan di 3 (tiga) kabupaten, meliputi Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Jember. Kajian ini memfokuskan perhatian pada : (1) peran remitansi TKI-Purna terhadap peningkatan kesejahteraan TKI-Purna dan keluarganya, (2) peran remitansi TKI-Purna terhadap terciptanya usaha ekonomi produktif yang dapat menciptakan mata pencaharian berkelanjutan bagi TKI-Purna dan keluarganya, (3) kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten di lokasi kajian untuk melakukan optimalisasi peran TKI-Purna dalam rangka memberdayakan TKI-Purna dan keluarganya serta masyarakat miskin, (4) langkah konkrit yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten di lokasi kajian sebagai upaya melakukan optimalisasi peran TKI-Purna dalam rangka memberdayakan TKI-Purna dan keluarganya serta masyarakat miskin.

Terdapat pengalaman berharga yang Tim Peneliti peroleh di sepanjang berlangsungnya kajian ini, yang rasanya sulit untuk Tim Peneliti lupakan, adalah kesempatan untuk dapat mendengar, menyaksikan dan memahami secara langsung bahwa ternyata TKI-Purna yang kebetulan pulang dengan menggenggam kesuksesan, mereka merupakan kelompok masyarakat yang potensial untuk berperan positif dalam pembangunan daerahnya; tidak saja karena remitansi yang mereka boyong ke tanah air jumlahnya amat signifikan tetapi juga karena bila mereka mendapat pembinaan yang baik dan relevan, maka mereka berpotensi besar dapat menjadi titik masuk yang amat strategis bagi pemberdayaan masyarakat miskin yang bertempat tinggal di sekitar mereka. Oleh karena itu kata kuncinya adalah ‘Perlu Optimalisasi Peran TKI-Purna’, dengan asumsi bahwa makin optimal peran TKI-Purna di suatu daerah maka makin besar

kontribusinya dalam ikut mengefektifkan pemberdayaan bagi masyarakat miskin yang bertempat tinggal di sekitarnya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu Tim Peneliti, baik yang telah membantu dalam proses pengumpulan data maupun dalam penyusunan Laporan ini. Khusus kepada kawan-kawan TKI-Purna baik dari Kabupaten Jember, Malang maupun Blitar; Tim Peneliti memberikan apresiasi atas kesediaan kawan-kawan untuk menjadi informan kajian ini, sekaligus kesediaan untuk menyampaikan data, khususnya data tentang sejumlah catatan pribadi yang sesungguhnya Tim Peneliti pahami, bahwa itu semua merupakan data yang amat privasif sifatnya. Namun kebesaran jiwa kawan-kawan TKI-Purna telah membuat data tersebut dapat dibagi kepada Tim Peneliti, dan karenanya sangat membantu Tim Peneliti untuk dapat melakukan analisis dengan berbasis pada data primer yang semoga mendekati keadaan yang sesungguhnya. Tim Peneliti sadari bahwa semua itu amat bermakna-guna tidak saja bagi kepentingan analisis dalam kajian ini tetapi lebih dari itu semoga juga bermakna-gunaa bagi upaya mengantarkan tersusunnya kebijakan pemberdayaan masyarakat yang bertumpu pada optimalisasi peran TKI-Purna di Provinsi Jawa Timur.

Tim Peneliti telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melaksanakan kajian ini dengan sebaik-baiknya serta menyusun laporan ini dengan sebaik-baiknya pula; namun Tim Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa di atas semua usaha itu ada keterbatasan-keterbatasan Tim Peneliti yang bisa jadi itu menjadi penyebab terdapatnya kekurangan, ketidaksempurnaan atau bahkan kesalahan dalam penyusunan laporan ini. Untuk itu dengan segala kerendahan hati Tim Peneliti membuka ruang yang selebar-lebarnya terhadap saran, masukan dan kritik yang bermuara pada penyempurnaan terhadap laporan ini. Akhirnya mudah-mudahan tidak berlebihan jika Tim Peneliti mengukir harapan semoga laporan kajian ini dapat menjadi sumber inspirasi dan salah satu referensi bagi lahirnya kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang esensinya merupakan Optimalisasi peran TKI-Purna dalam upaya meningkatkan efektifitas pemberdayaan masyarakat miskin.

Surabaya, November 2013

Tim Peneliti

ASBTRAK

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang sudah mengakhiri masa kontrak kerjanya, disebut TKI Purna. Biasanya, para TKI Purna yang pernah menjadi TKI sukses, akan kembali miskin setelah lima tahun menjadi TKI Purna. Maka para TKI Purna perlu dibina dan diberdayakan dengan tujuan dapat memiliki penghasilan berkelanjutan, dengan demikian berpeluang untuk dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekelilingnya.

Saat ini sudah ada program pemberdayaan TKI Purna, yaitu Program (1) Bimbingan Teknis, (2) Program Edukasi Perbankan dan Kewirausahaan. Program ini sesungguhnya relatif bagus, namun program ini di Jawa Timur hanya dapat menjangkau sekitar 2% dari jumlah TKI Purna pada tiap-tiap tahun berjalan. Maka ke depan diharapkan program ini dapat ditargetkan mencapai sekurang-kurangnya 10% dari jumlah TKI Purna pada tiap-tiap tahun berjalan.

Penelitian ini juga merekomendasikan pokok-pokok pikiran yang perlu dituangkan dalam penyusunan model pembinaan TKI Purna, meliputi : lembaga utama (leading sektor), lembaga lain yang dapat bersinergi dan alternatif, substansi program, metode pembinaan, waktu yang diperlukan, tempat, peserta, target jangka pendek, tujuan, ukuran keberhasilan, sumberdaya, menjaga keberhasilan, care competence, proyeksi kesulitan yang dihadapi.

Kata Kunci : TKI, purna, pemberdayaan

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK..	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	15
1.3. Tujuan Penelitian	15
1.4. Manfaat Penelitian	16
1.5. Hasil Yang Diharapkan	16
1.6. Ruang Lingkup Penelitian.....	17
1.7. Kerangka Konsep.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1. Pembangunan yang Bertumpu pada Potensi Lokal.....	20
2.2. Pembangunan Masyarakat (<i>Community Development</i>)	29
2.3. Konsepsi Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	32
2.4. Pilar-Pilar Pemberdayaan Masyarakat Miskin.....	40
2.5. Pemberdayaan Masyarakat sebagai Proses Belajar Sosial.....	43
2.6. TKI-Purna dan Remitansi TKI.....	56
BAB III METODE PENELITIAN	50
3.1. Teknik Penarikan Sampel	50
3.2. Teknik Pengumpulan Data.....	52
3.3. Teknis Analisis Data	53
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	56
4.1. Penduduk dan Ketenagakerjaan	56
4.1.1. Penduduk dan Ketenagakerjaan Kabupaten Ponorogo	63
4.1.2. Penduduk dan Ketenagakerjaan Kabupaten Blitar	69
4.1.3. Penduduk dan Ketenagakerjaan Kabupaten Jember	72
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN TEMUAN PENELITIAN	78
5.1. Profil Responden TKI-Purna	78
5.1.1. Responden Menurut Kelompok Umur	78
5.1.2. Responden Menurut Jenis Kelamin.....	80
5.1.3. Responden Menurut Jenjang Pendidikan	80

5.1.4. Responden Menurut Lamanya Bekerja di Luar Negeri.....	82
5.1.5. Responden Menurut Negara Tempat Bekerja	83
5.2. Peran Remitansi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan TKI-Purna dan Keluarganya	84
5.3. Peran Remitansi TKI-Purna Terhadap Terciptanya Usaha Ekonomi Produktif Yang Dapat Menciptakan Mata Pencaharian Berkelanjutan Bagi TKI Purna dan Keluarganya.....	97
5.4. Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Untuk Melakukan Optimalisasi Peran TKI-Purna Dalam Rangka Memberdayakan TKI-Purna dan Keluarganya Serta Masyarakat Miskin	100
5.4.1. Payung Kebijakan	101
5.4.2. Proporsi Yang Dilatih dengan Populasi	102
5.4.3. Model Pembinaan/Bimbingan.....	139
BAB VI PENUTUP	105
6.1. Kesimpulan	108
6.2. Rekomendasi	108
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. <i>Human Development Index</i> (HDI) Indonesia Dibanding Beberapa Negara (2000-2011)	2
Tabel 1.2. Data Umum Permasalahan Ketenagakerjaan di Indonesia	3
Tabel 1.3. Kondisi Umum Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur	4
Tabel 1.4. Data Penempatan TKI ke Luar Negeri Tahun 2011 - 2012 Menurut Kab./Kota Daerah Asal TKI dari Provinsi Jawa Timur	4
Tabel 1.5. Pendidikan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Timur	6
Tabel 1.6. Pendidikan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Timur	7
Tabel 1.7. Jumlah TKI Bekerja di Sektor Formal dan Informal	8
Tabel 1.8. Penggunaan Dana Para TKI	12
Tabel 2.1. Komparasi Program Pembangunan yang Memberdayakan vs Menciptakan Ketergantungan	25
Tabel 2.2. Indikator Keberhasilan Ko-Manajemen dalam Pemberdayaan Masyarakat	28
Tabel 3.1. Ranking Penempatan TKI ke Luar Negeri Tahun 2011 dan Tahun 2012	51
Tabel 3.2. Jumlah Responden & Informan Kunci	52
Tabel 4.1. Distribusi, Kepadatan, dan Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota 2008-2012	56
Tabel 4.2. Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur, Bulan Agustus 2007 - Februari 2012	58
Tabel 4.3. Jumlah Penduduk Usia Kerja Termasuk Bukan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 - 2011	59
Tabel 4.4. Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 - 2012	60
Tabel 4.5. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Sex Ratio dan Kecamatan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2011	64
Tabel 4.6. Jumlah Pencari Kerja Yang Terdaftar Menurut Pendidikan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2011	65
Tabel 4.7. Penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usahadi Kabupaten Ponorogo Tahun 2011	65
Tabel 4.8. Penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2011	66
Tabel 4.9. Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2011	66
Tabel 4.10. Banyaknya TKI/TKW yang Berangkat ke Luar Negeri Tahun 2011-2013 (Per Mei 2013)	67
Tabel 4.11. Negara Tujuan TKI/TK Tahun 2011-2011 (Per Mei 2013)	68

Tabel 4.12. Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin, P1, P2 dan Garis Kemiskinan Kabupaten Ponorogo Tahun 2010-2011	68
Tabel 4.13. Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas dan Status Bekerja Kabupaten Ponorogo Tahun 2010-2011	69
Tabel 4.14. Penduduk Kabupaten Blitar dan Sex Rasio Menurut Jenis Kelamin Hasil Sensus Penduduk Tahun 2011	70
Tabel 4.15. Pencari Kerja Yang Terdaftar, Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Blitar Tahun 2011.....	71
Tabel 4.16. Pencari Kerja dan Lowongan Kerja, Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Blitar Tahun 2011 (Orang).....	71
Tabel 4.17. Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kabupaten Blitar Tahun 2010-2011.....	72
Tabel 4.18. Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas dan Status Bekerja Kabupaten Blitar Tahun 2010-2011.....	72
Tabel 4.19. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Jember Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010	73
Tabel 4.20. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang lalu dan Jenis Kelamin pada Semester II, Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Bulan Agustus Tahun 2011 dan Status Bekerja Kabupaten Jember	74
Tabel 4.21. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin pada Semester II, Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) bulan Agustus Tahun 2011.....	74
Tabel 4.22. Penduduk Umur 15 Tahun Ke atas yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu Menurut Jenis Pekerjaan Utama pada Semester II, Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) bulan Agustus Tahun 2011	75
Tabel 4.23. Banyaknya Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, 2011	75
Tabel 4.24. Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kabupaten Jember Tahun 2010-2011	76
Tabel 4.25. Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas dan Status Bekerja Kabupaten Jember Tahun 2010-2011	76
Tabel 4.26. Penempatan TKI Asal Kabupaten Jember ke Luar Negeri Menurut Jenis Kelamin dan Negara Tujuan, Tahun 2009-2011	77
Tabel 4.27. Perkembangan Struktur PDRB Per Sektoral Provinsi Jawa Timur Semester I Tahun 2010 – 2012.....	93
Tabel 5.1. Responden Menurut Kelompok Umur	79
Tabel 5.2. Responden Menurut Jenis Kelamin.....	80
Tabel 5.3. Responden Menurut Jenjang Pendidikan	81

Tabel 5.4. Responden Menurut Lamanya Bekerja di Luar Negeri	82
Tabel 5.5. Responden Menurut Negara Tempat Bekerja	83
Tabel 5.6. Perkiraan Alokasi Dana Remitansi TKI-Purna Kabupaten Ponorogo (dalam %)(n=30).....	85
Tabel 5.7. Perkiraan Alokasi Dana Remitansi TKI-Purna Kabupaten Blitar (dalam %)(n=30).....	87
Tabel 5.8. Perkiraan Alokasi Dana Remitansi TKI-Purna Kabupaten Jember (dalam %)(n=30).....	89
Tabel 5.9. Rekapitulasi Perkiraan Alokasi Dana Remitansi TKI-Purna (%)Kabupaten Ponorogo, Blitar dan Jember.....	91
Tabel 5.10. Proporsi Alokasi Remitansi TKI-Purna untuk Kebutuhan Merenovasi Rumah	92
Tabel 5.11. Proporsi Alokasi Remitansi TKI-Purna untuk Kebutuhan Konsumsi.....	92
Tabel 5.12. Proporsi Alokasi Remitansi TKI-Purna untuk Kebutuhan Kesehatan dan Pendidikan	94
Tabel 5.13. Proporsi Alokasi Remitansi TKI-Purna untuk Kebutuhan Lain- Lain (Terutama Pembayaran pinjaman/hutang).....	95
Tabel 5.14. Proporsi Alokasi Remitansi TKI-Purna untuk Kebutuhan Tabungan (Uang dan Perhiasan)	95
Tabel 5.15. Proporsi Alokasi Remitansi TKI-Purna untuk Investasi.....	98
Tabel 5.16. Proporsi Alokasi Remitansi TKI-Purna untuk Membeli Tanah/Lahan Produktif.....	98
Tabel 5.17. Responden TKI-Purna yang Tidak Mengalokasikan Dana untuk Investasi(n=30 x 3 = 90)	99
Tabel 5.18. Data Pelaksanaan Bimbingan Teknis TKI Purna Timur Tahun 2011	102
Tabel 5.19. Rekapitulasi Kedatangan TKI Di Bandara Juanda Tahun 2012	103
Tabel 5.20. Rekapitulasi TKI Purna yang Menjadi Peserta Bimtek dan Edukasi Kewirausahaan dan Perbankan Jawa Timur Tahun 2012	104
Tabel 5.21. Rekapitulasi Kedatangan TKI Di Bandara Juanda Tahun 2013	104
Tabel 5.22. Pelaksanaan Edukasi Keuangan dan Kewirausahaan TKI Program RPJMN 2010 - 2014 Dengan Dana APBN (Seluruh Provinsi di Indonesia).....	105
Tabel 6.1. Pokok-Pokok Pikiran Pengembangan Model Pembinaan TKI Purna.....	113

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Fenomena TKI Ilegal.....	9
Gambar 1.2.	Diagram Kerangka Konsep	19
Gambar 2.1.	Proses Pemberdayaan Masyarakat Miskin Berbasis Potensi Lokal.....	26
Gambar 3.1.	Proses Analisis Data	55
Gambar 4.1.	Penduduk dan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2007 - 2012.....	59
Gambar 4.2.	Prosentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 - 2012.....	60
Gambar 5.1.	Responden Menurut Kelompok Umur	79
Gambar 5.2.	Responden Menurut Jenis Kelamin.....	80
Gambar 5.3.	Responden Menurut Jenjang Pendidikan	81
Gambar 5.4.	Responden Menurut Lamanya Bekerja di Luar Negeri.....	82
Gambar 5.5.	Responden Menurut Negara Tempat Bekerja	83
Gambar 5.6.	Perkiraan Alokasi Dana Remitansi TKI Kabupaten Ponorogo	86
Gambar 5.7.	Perkiraan Alokasi Dana Remitansi TKI Kabupaten Blitar.....	88
Gambar 5.8.	Perkiraan Alokasi Dana Remitansi TKI Kabupaten Jember	90

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Dalam perjalanannya sebagai suatu bangsa, saat ini Indonesia masih menghadapi sejumlah permasalahan sosial yang berkaitan dengan pembangunan manusia (*human development*). Relatif rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index* = disingkat HDI), menjadi salah satu pertanda bahwa rendahnya kualitas hidup rakyat Indonesia masih merupakan permasalahan krusial. Sejumlah kalangan berasumsi bahwa HDI Indonesia sangat rendah. Menurut *United Nations Development Program*, HDI Indonesia tahun 2011 berada di urutan 124 dari 187 negara yang disurvei, dengan skor 0,617. Peringkat ini turun dari peringkat 108 pada tahun 2010 (<http://hdr.undp.org/en/reports>).

Seiring dengan permasalahan HDI, terdapat dua permasalahan besar yang dihadapi bangsa Indonesia, yakni kemiskinan dan pengangguran. Dua masalah ini memiliki implikasi yang luas, diantaranya implikasi terhadap rendahnya pendapatan (*income*) seseorang/suatu keluarga. Pada kasus ini, ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia dianggap sebagai penyebabnya. Di tengah mengemukanya persoalan ini, sebagian angkatan kerja Indonesia memutuskan untuk mencari peluang bekerja di luar negeri, dengan jalan menjadi tenaga migran, yang kemudian akrab disebut Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Ironinya, meskipun menjadi TKI diyakini merupakan salah satu solusi untuk mengatasi persoalan penganggur dan kemiskinan, namun keberadaan TKI ternyata juga memicu lahirnya sejumlah masalah. Daftar permasalahan berikut, kenyataannya, menjadi permasalahan klasik yang cukup serius di sektor ketenagakerjaan, khususnya TKI, meliputi : (1) *Human Development Index* (HDI) Indonesia relatif rendah, (2) angkatan kerja/penganggur melimpah, (3) TKI masih diperlukan keberadaannya, (4) ketidakberdayaan TKI, (5) TKI ilegal, (6) PPTKIS budaya hedonis-konsumeristis, (7) TKI Purna tidak memiliki penghasilan berkelanjutan (Sumber : Bank Indonesia, 2008).

Gambaran detail dari permasalahan umum-klasik sebagaimana dikemukakan di atas, dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, yang potret

data kuantitatifnya secara garis besar dapat dilihat pada tampilan data yang tertuang dalam uraian berikut.

1.1.1. *Human Development Index* (HDI) Relatif Rendah

Dibandingkan dengan sejumlah negara sedang berkembang yang lain, HDI Indonesia tergolong rendah. Ini menjadi indikator bahwa kualitas tenaga kerja Indonesia secara umum masih relatif rendah, yang diukur dari tiga indeks, meliputi: (i) indeks pendidikan, (ii) indeks kesehatan, dan (iii) indeks ekonomi.

Di kawasan ASEAN, HDI Indonesia hanya unggul dari Vietnam yang memiliki nilai HDI 0,593, Laos dengan nilai HDI 0,524, Kamboja dengan nilai HDI 0,523, dan Myanmar dengan nilai HDI 0,483. Di ASEAN. Peringkat pertama dalam hal kualitas manusia adalah Singapura dengan nilai 0,866, disusul Brunei dengan nilai HDI 0,838, lalu Malaysia (0,761), Thailand (0,682,) dan Filipina (0,644) (<http://hdr.undp.org/en/reports>).

Tabel 1.1.
Human Development Index (HDI) Indonesia
Dibanding Beberapa Negara (2000-2011)

No	Negara	2000	2003	2006	2009	2010	2011
1	Thailand	76	74	76	87	92	103
2	Malaysia	61	58	59	66	57	61
3	Filipina	77	85	83	105	97	112
4	Indonesia	109	111	110	111	108	124
5	China	99	104	94	92	89	101
6	Vietnam	108	109	112	116	113	128

Sumber : Human Development Report, 2011

HDI Indonesia membaik pada tahun 2010 yakni peringkat 108 dibandingkan tahun 2009 peringkat 111, tahun 2006 peringkat 110, tahun 2003 peringkat 111, bahkan tahun 2000 peringkat 109. Namun HDI mengalami penurunan secara drastis pada tahun 2011, yakni peringkat 124 dari 187 negara yang diukur.

HDI Indonesia pada 14 Maret 2013 dilaporkan naik peringkat. Pada 2012 menduduki peringkat 124 dari 187 negara, saat ini naik tiga tingkat menjadi urutan ke-121 dari 185 negara. Berdasarkan UNDP monitor, Indonesia meraih score 0,629 naik 0,009, meliputi aspek tenaga kerja, kesehatan, dan pendidikan

(http://www.jurnas.com/news/85371/HDI_Indonesia_Naik_Peringkat/1/Sosial_Budaya/Humaniora#sthash.m8CuxMaB.dpu). Namun HDI pada peringkat tersebut masih tergolong relatif rendah.

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), mengatakan HDI Indonesia memang naik baik dalam nilai indeks maupun peringkat. Namun ranking HDI Indonesia sama dengan HDI Afrika Selatan, yakni 121 dari 187 negara. http://www.jurnas.com/news/85371/IPM_Indonesia_Naik_Peringkat/1/Sosial_Budaya/Humaniora#sthash.x0ZBzt4C.dpuf

1.1.2. Angkatan Kerja dan Penganggur Melimpah

Secara nasional, jumlah penduduk miskin dan penganggur di Indonesia termasuk di Provinsi Jawa Timur masih melimpah. Pada saat yang sama lapangan pekerjaan yang tersedia terbatas; tepatnya, tidak mampu menampung ledakan angkatan kerja. Kenyataan ini mendorong sekelompok angkatan kerja tertentu untuk mencari dan memanfaatkan peluang bekerja di luar negeri, sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Data berikut dapat memberikan gambaran atas permasalahan ketenagakerjaan yang sedang dihadapi bangsa ini.

Tabel 1.2.
Data Umum Permasalahan Ketenagakerjaan di Indonesia

No	Uraian	Jumlah
1	Penduduk Miskin	28,89 juta
2	Angkatan Kerja	117,37 juta
3	Lapangan Kerja	109,67 juta
4	Penganggur	7,70 juta
5	Perkiraan Jumlah TKI di Luar Negeri	2,60 juta
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	68,34
7	Tingkat Penganggur Terbuka (TPT) (%)	6,56

Sumber: BPS, 2013

Terkait dengan masalah tersebut, Provinsi Jawa Timur juga menghadapi persoalan ketenagakerjaan yang relatif kompleks. Keterbatasan kemampuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyediakan lapangan pekerjaan mengakibatkan jumlah penganggur tiap tahun cenderung meningkat. Kondisi ini diperparah oleh makin kecilnya daya serap tenaga kerja di berbagai sektor usaha

terutama sektor industri yang antara lain merupakan akibat rendahnya investasi, kenaikan harga kebutuhan pokok dan berbagai bencana yang terjadi.

Tabel 1.3.
Kondisi Umum Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur

No	Uraian	Jumlah (jiwa)
1	Penduduk	37.687.622
2	Penduduk Usia Kerja	28.765.152
3	Penduduk Bukan Usia kerja	8.922.470
4	Angkatan Kerja	19.761.886
5	Kesempatan Kerja	18.940.340
6	Pencari Kerja / Penganggur	821.546
7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) %	69,49
8	Tingkat Penganggur Terbuka (TPT) %	4,16
9	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) %	95,84

Sumber : PBS Provinsi Jawa Timur, 2013

1.1.3. TKI sebagai Masih Diperlukan Keberadaannya

Tidak dapat dipungkiri, bila TKI yang bekerja di luar negeri masih diperlukan keberadaannya. Sebab lapangan kerja di tanah air tidak mampu menampung angkatan kerja yang ada. Berikut ini disajikan data penempatan TKI asal Jawa Timur di Luar Negeri.

Tabel 1.4.
Data Penempatan TKI ke Luar Negeri Tahun 2011 - 2012
Menurut Kabupaten/Kota Daerah Asal TKI dari Provinsi Jawa Timur

No	Kabupate / Kota	Tahun Penempatan							
		2011				2012			
		L	P	Jml	%	L	P	Jml	%
1	Kota Surabaya	325	356	681	1.01	343	399	742	1.09
2	Kab. Sidoarjo	147	212	359	0.53	161	209	370	0.54
3	Kab. Mojokerto	48	108	156	0.23	51	109	160	0.24
4	Kota Mojokerto	1	0	1	0.00	1	4	5	0.01
5	Kab. Jombang	181	465	646	0.96	225	522	747	1.10
6	Kab. Gresik	1,069	90	1,159	1.73	813	125	938	1.38
7	Kab. Malang	746	7,637	8,383	12.48	997	7,613	8,610	12.66
8	Kota Malang	21	91	112	0.17	11	110	121	0.18
9	Kota Batu	9	90	99	0.15	18	67	85	0.12
10	Kab. Pasuruan	57	238	295	0.44	118	247	365	0.54
11	Kota Pasuruan	1	6	7	0.01	0	10	10	0.01

No	Kabupate / Kota	Tahun Penempatan							
		2011				2012			
		L	P	Jml	%	L	P	Jml	%
12	Kab. Kediri	802	3,207	4,009	5.97	847	3,253	4,100	6.03
13	Kota Kediri	5	22	27	0.04	3	42	45	0.07
14	Kab. Madiun	566	3,486	4,052	6.03	825	3,446	4,271	6.28
15	Kota Madiun	8	30	38	0.06	18	61	79	0.12
16	Kab. Tulungagung	2,284	3,656	5,940	8.85	1,518	3,472	4,990	7.34
17	Kab. Blitar	1,171	7,076	8,247	12.28	1,091	6,434	7,525	11.07
18	Kota Blitar	10	52	62	0.09	9	84	93	0.14
19	Kab. Nganjuk	293	814	1,107	1.65	466	851	1,317	1.94
20	Kab. Ponorogo	1,214	6,208	7,422	11.05	1,194	6,088	7,282	10.71
21	Kab. Banyuwangi	562	4,329	4,891	7.28	1,141	4,572	5,713	8.40
22	Kab. Jember	383	1,446	1,829	2.72	473	1,757	2,230	3.28
23	Kab. Situbondo	26	70	96	0.14	41	119	160	0.24
24	Kab. Probolinggo	244	87	331	0.49	124	145	269	0.40
25	Kota Probolinggo	2	0	2	0.00	0	3	3	0.00
26	Kab. Lumajang	219	478	697	1.04	182	577	759	1.12
27	Kab. Bojonegoro	446	491	937	1.40	456	456	912	1.34
28	Kab. Tuban	314	180	494	0.74	254	228	482	0.71
29	Kab. Pacitan	81	87	168	0.25	90	98	188	0.28
30	Kab. Sumenep	141	30	171	0.25	153	73	226	0.33
31	Kab. Pamekasan	178	77	255	0.38	352	266	618	0.91
32	Kab. Bangkalan	983	288	1,271	1.89	1,272	576	1,848	2.72
33	Kab. Lamongan	1,575	177	1,752	2.61	944	194	1,138	1.67
34	Kab. Ngawi	248	1,292	1,540	2.29	267	1,359	1,626	2.39
35	Kab. Magetan	302	2,084	2,386	3.55	385	2,096	2,481	3.65
36	Kab. Trenggalek	546	1,787	2,333	3.47	385	1,649	2,034	2.99
37	Kab. Sampang	303	137	440	0.66	709	453	1,162	1.71
38	Kab. Bondowoso	57	87	144	0.21	140	136	276	0.41
39	Lain-lain	1,482	3,131	4,613	6.87	1,107	2,916	4,023	5.92
	Jumlah	17,050	50,102	67,152	100.00	17,184	50,819	68,003	100.00

Sumber: Infokerja-jatim.co.id (c), 2012

Data di atas menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota penyumbang TKI 3 terbesar adalah: (1) Kabupaten Malang sebesar 12,66%; (2) Kota Blitar sebesar 11,07% dan (2) Kabupaten Ponorogo sebesar 10,71%. Sedangkan Kota terendah penyumbang TKI adalah Kota Probolinggo kurang dari 0.01%.

Di samping itu tidak dapat dipungkiri pula bila aliran remitansi TKI, yaitu

devisa yang dikirim oleh TKI dari berbagai negara menuju tanah air (kampung halaman) sangat signifikan jumlahnya. Cuplikan data kuantitatif berikut ini kiranya dapat menggambarkan aliran devisa yang dikirim oleh para TKI ke kampung halamannya.

Tabel 1.5.
Data Remitansi TKI

Tahun	Data Remitansi	Keterangan
1999-2001	Uang yang dikirim oleh 1,28 juta orang TKI legal = US \$ 3,145 miliar Setara = Rp.28,29 triliun	Jumlah ini tidak termasuk remitansi yang dikirim oleh 3,5 juta orang TKI ilegal
2002	Devisa TKI ilegal mencapai US \$ 2,6 miliar, setara = Rp.23,4 triliun	
2003	Devisa TKI legal = US \$1,6 miliar, setara dengan = Rp. 14,4 triliun	
2005	Devisa TKI legal = Rp. 44,6 triliun	
2006	Devisa TKI legal = Rp. 50,56 triliun	
2007	Devisa TKI legal = Rp. 60,00 triliun	
2008	Devisa TKI legal = Rp. 80,24 triliun	
2009	Devisa TKI legal = Rp. 56,6 triliun	
2010	Devisa TKI legal = Rp. 57,4 triliun	
2011	Devisa TKI legal = Rp. 66,08 triliun	Jumlah penempatan 521.381 TKI
2012	Devisa TKI legal = Rp. 58,26 triliun	Jumlah penempatan 362.510 TKI

Sumber : Dihimpun dari berbagai sumber (BNP2TKI, Kemenakertrans dan Kompas)

Khusus kegiatan penempatan TKI menjelang lebaran, kiriman uang atau remiten tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Jatim diprediksi naik 30 persen dibandingkan hari biasa. Jika pada hari biasa remiten yang dikirim TKI hanya Rp 342 miliar per bulan, pada Ramadan dan menjelang Lebaran ini diprediksi naik 30 persen menjadi Rp 445 miliar. Bahkan dilihat secara komulatif selama bulan Januari sampai Juli ini, remiten TKI asal Jatim yang masuk dan tercatat di Bank Indonesia mencapai Rp 2.3 Trilyun. Selama tahun 2012 remitan TKI sebanyak 4.05 Trilyun. Berdasar pengalaman, pengiriman remiten TKI informal umumnya 80 persen dari gaji, sedang TKI formal hanya rata-rata 70 persen yang dikirim ke keluarganya di Jatim.

Jumlah tersebut, kenyataan di lapangan bisa saja lebih besar dari data yang ada, karena banyak dari TKI yang mengirimkan uang ke keluarganya tidak melalui Bank, tapi dikirim lewat jasa di luar bank, seperti pegadaian dan jasa

lainnya. Remiten terbanyak terutama dikirim TKI yang bekerja di negara seperti, Hongkong, Taiwan, Malaysia dan Singapura. Dengan naiknya uang kiriman tersebut, arus mudik TKI dari luar negeri ke Jatim melalui Bandara Internasional Juanda, juga diperkirakan mengalami peningkatan. Selama tahun 2012 TKI yang berangkat dari embarkasi Juanda sebanyak 68.003 orang sedang TKI yang pulang selama tahun 2012 mencapai 76.807 orang.

1.1.4. Ketidakberdayaan TKI

Salah satu pangkal ketidakberdayaan TKI adalah tingkat pendidikan mereka yang cenderung rendah. Di Provinsi Jawa Timur, sebagian besar TKI berpendidikan SLTP dan SLTA, bahkan ada yang hanya berpendidikan SD. Ketidakberdayaan TKI memiliki implikasi yang cenderung merugikan TKI itu sendiri. Inilah profil pendidikan angkatan kerja di Provinsi Jawa Timur.

Tabel 1.6.
Pendidikan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Timur

Penduduk 10 tahun ke atas berjumlah 821.546 jiwa			
1	Tamat SD	187.910	22,87%
2	Tamat SLTP	215.243	26,20%
3	Tamat SMU	199.593	24,29%
4	Tamat SMK	137.345	16,72%
5	Tamat D1-D3	17.188	2,09%
6	Tamat S1	64.267	7,82%
Dari jumlah tersebut 50,92% = angkatan kerja			

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2013

1.1.5. TKI Bekerja di Sektor Formal dan Informal

Ada perubahan tren yang positif penempatan TKI Indonesia di luar negeri cenderung lebih banyak bekerja di sektor formal daripada sektor informal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.7.
Jumlah TKI Bekerja di Sektor Formal dan Informal

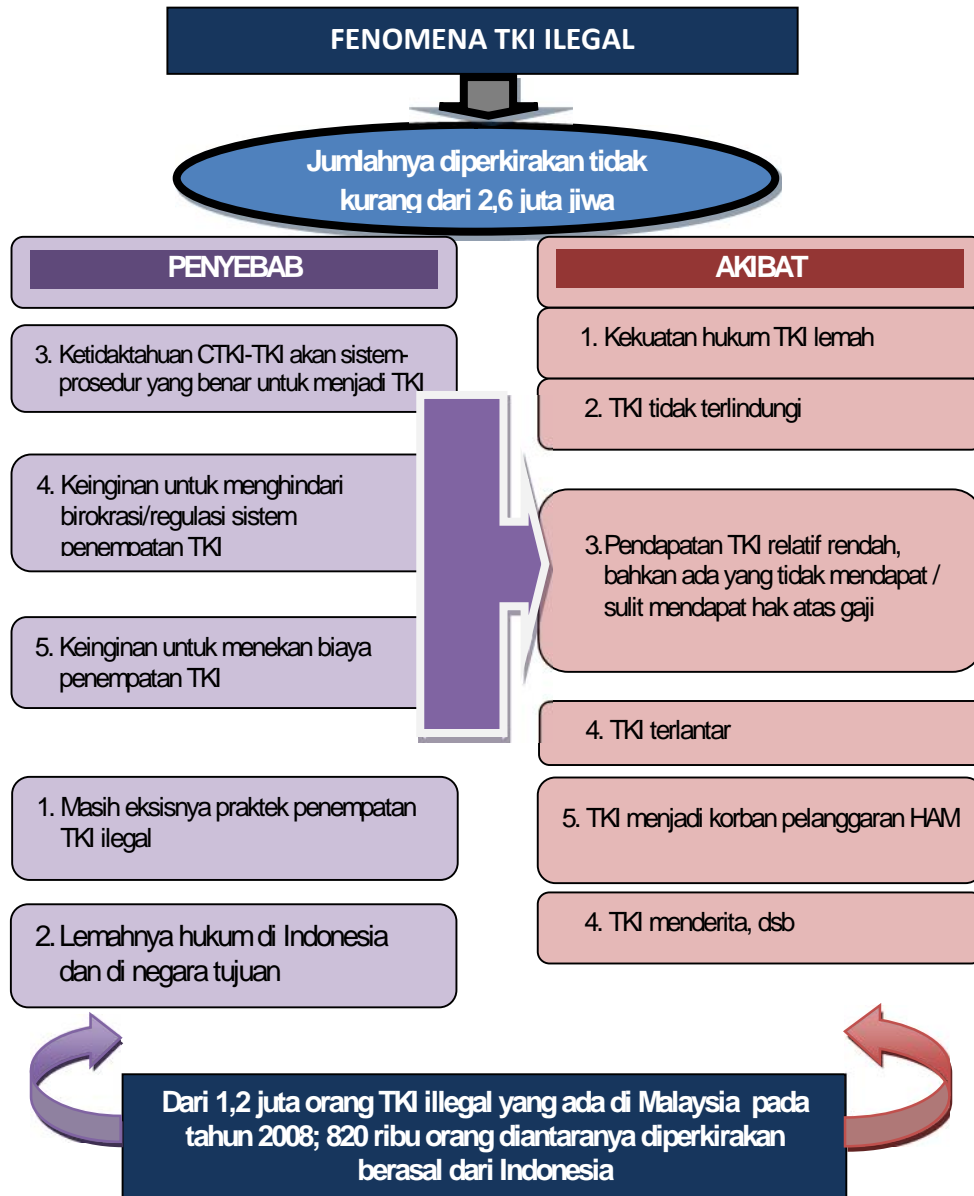
Tahun	Sektor Formal	Sektor Informal
2010	124.683	415.121
2011	264.756	316.325
2012	258.411	236.198

Sumber: Infokerja-jatim.co.id (c) 2012

Bekerja di sektor formal seperti bekerja pada berbagai perusahaan atau organisasi yang berbadan hukum, memiliki kontrak kerja yang kuat, sehingga cukup dilindungi secara hukum di negara penempatan dan relatif tidak mendapatkan permasalahan selama bekerja di luar negeri. Sementara pada tahun sebelumnya 2010-2011 lebih banyak bekerja di sektor informal yaitu sebagai PLRT (Penata Laksana Rumah Tangga).

1.1.6. TKI Ilegal

Sampai saat ini fenomena TKI ilegal masih mengemuka. Derasnya arus pemulangan TKI ilegal dari Malaysia yang berlangsung di sepanjang tahun 2007-2011 menjadi bukti empirik betapa jumlah TKI ilegal masih signifikan. Sayangnya pemerintah tidak memiliki data akurat tentang jumlah TKI ilegal yang bekerja di berbagai negara. Namun diperkirakan jumlahnya tidak kurang dari 3,5 juta jiwa.



Gambar 1.1.
Fenomena TKI Ilegal

1.1.7. PPTKIS : Cenderung Mengedepankan Kepentingan Bisnis

Dalam wacana akademik berkembang asumsi hipotetik bahwa para Pelasana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) - yang dulu disebut Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) - cenderung mengedepankan kepentingan bisnis dan relatif belum mengedepankan keinginan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dalam arti yang sesungguhnya. Hal ini berimplikasi pada relatif rendahnya kualitas TKI yang ditempatkan di luar

negeri, yang selanjutnya menyebabkan TKI tidak dapat bersaing dan bahkan tidak dapat melakukan *bargaining* dengan sejumlah pihak terkait di tempat kerja.

Selanjutnya seorang mantan jurnalis Jannes Eudes Wawa dalam bukunya “*Ironi Pahlawan Devisa*” menegaskan bahwa sekurang-kurangnya terdapat 4 alasan yang melatari ia menaruh keprihatinan atas praktek kerja PPTKIS (Wawa, 2005). Alasan yang melatari keprihatinan Jannes Eudes Wawa terhadap praktek usaha PPTKIS di Tanah Air tersebut sebagai berikut:

1. TKI yang ditempatkan cenderung tidak berkualitas :
 - a. TKI cenderung tidak memiliki keahlian.
 - b. TKI cenderung tidak paham hukum.
 - c. TKI cenderung tidak cakap dalam berkomunikasi.
 - d. TKI cenderung tidak paham kultur di tempat kerja.
 - e. TKI cenderung tidak cakap teknologi sederhana yang menjadi peralatan kerja di tempat kerja.
2. PPTKIS cenderung tidak memberikan pelayanan pada pasca penempatan : Pelayanan oleh PPTKIS tidak paripurna, namun pemerintah tidak menegakkan regulasi yang ada.
3. Bila hubungan TKI dengan mitra kerja di luar negeri tidak harmonis, TKI tidak otomatis mendapatkan jasa pendampingan.
4. Semangat untuk melakukan pemberdayaan (*empowerment*) dalam arti yang sesungguhnya masih relatif rendah.

1.1.8. Permasalahan Rumah Tangga TKI

Tidak dapat dipungkiri, sejumlah besar keluarga TKI mengalami perubahan secara cepat status sosial ekonominya, dalam arti terjadi peningkatan status sosial ekonomi dari miskin menjadi tidak miskin, dari hidup kekurangan menjadi berkecukupan. Namun tidak dapat dipungkiri juga, bahwa sejumlah besar keluarga TKI (yang ditinggal pergi anggota keluarganya), menghadapi berbagai permasalahan sosial, terutama bila yang pergi menjadi TKI adalah seorang ibu rumah tangga, yaitu seorang perempuan yang berstatus sebagai seorang isteri dari seorang suami sekaligus seorang ibu dari sejumlah anak-anak. Berikut ini merupakan salah satu fenomena dari permasalahan dimaksud :

Testimoni Camat Donomulyo Kabupaten Malang, 2008 :

“Wilayah kecamatan kami merupakan kantong TKI di Kabupaten Malang. Ini memiliki implikasi positif dan negatif”

“Implikasi positifnya adalah :
terjadinya peningkatan daya beli masyarakat sebagai akibat dari aliran dana remitansi para TKI”

“Implikasi negatifnya adalah :
angka **gugatan cerai** yang diajukan oleh TKI-perempuan terhadap suaminya begitu tinggi. Akibatnya : meskipun secara sosial-ekonomi, keluarga TKI mengalami peningkatan status sosial ekonomi, namun hal itu harus dibayar dengan “harga” yang begitu mahal karena rumah tangganya mengalami perceraian”

Sumber : Laporan Akhir Survei Remitansi TKI dalam Inflasi dan Pembangunan Daerah di Propinsi Jawa Timur, 2008

1.1.9. Budaya Hedonis-Konsumeristis

Siapa pun patut lega ketika menyaksikan para TKI berhasil menciptakan dan atau meningkatkan penghasilan selama mereka menjadi TKI. Namun ada kecenderungan, para TKI tersebut tidak memiliki komitmen untuk menciptakan unit usaha yang berlanjut yang dapat menciptakan penghasilan pasca ia menjadi TKI atau setelah.

Banyak kasus menunjukkan bahwa ketika masih menjadi TKI, mereka terlena dalam hidup berfoya-foya, konsumtif, hedonis dan/atau apapun namanya, seiring keadaan sosial ekonomi yang tiba-tiba membaik, meningkat, dan/atau makin mapan. Namun pasca menjadi TKI, mereka kembali menjadi “tidak berdaya”. Ini salah satunya disebabkan mereka tidak berkomitmen untuk membelanjakan dananya bagi kepentingan usaha ekonomi produktif atau investasi. Pada saat yang sama perilaku konsumtif lebih mengemuka. Hasil kajian Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2007 terhadap pola pembelanjaan dana para TKI sukses yang sedang bekerja di Hongkong menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 1.8.
Penggunaan Dana Para TKI (n = 64 orang)

No	Penggunaan Dana	Jumlah	Prosentase
1	Belanja Elektronik	51	79,68%
2	Belanja Perhiasan	48	75,00%
3	Belanja Kendaraan	38	59,30%
4	Belanja Rumah / Tanah	41	64,06%
5	Biaya Sekolah	32	50,00%
6	Modal Usaha/Investasi	20	31,25%

Sumber : Hasil Survei TKI di Hongkong, Pemprov Jatim, Juni 2007

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bagaimana pola belanja para TKI. Ternyata sebagian besar TKI membelanjakan uangnya untuk membeli barang-barang elektronik, perhiasan, kendaraan, dan membeli tanah termasuk merenovasi rumah. Pada saat yang sama hanya 31,25% TKI yang mengalokasikan dananya untuk modal usaha (investasi).

1.1.10. TKI Purna : Tidak Memiliki Penghasilan Berkelanjutan

Hasil kajian Mufida terhadap para mantan TKI di kabupaten Gresik menunjukkan bahwa para mantan TKI cenderung tidak memiliki penghasilan berkelanjutan setelah ia tidak menjadi TKI (Mufida, 2005).

HASIL KAJIAN DI KABUPATEN GRESIK (Mufida, 2005)	
1.	Barang-barang yang dibeli oleh TKI dan keluarganya cenderung merupakan barang-barang konsumtif.
2.	Pada masa lima tahun pasca menjadi TKI, para mantan TKI (yang pernah sukses), kembali memiliki persoalan keuangan yang menipis.
3.	Sebagian besar mantan TKI tidak memiliki usaha ekonomi produktif sebagai unit usaha yang menciptakan penghasilan berkelanjutan.
4.	Belum ada program apapun dari pemerintah yang dirancang untuk melakukan pembinaan, pendampingan atau apapun namanya terhadap para keluarga TKI dan atau mantan TKI beserta keluarganya.

1.1.11. Remitansi TKI dan Potensi Tekanan Inflasi

Tidak kurang dari 3,62 juta orang TKI di sektor formal maupun informal yang bekerja di luar negeri pada tahun 2012 menghasilkan *remittance* paling tidak Rp. 58,26 triliun per-tahun dengan kontribusi terhadap *Gross Domestic Product* (GDP) berkisar 11%. Maka tepat kiranya jika ada penghargaan yang

diperuntukkan bagi para TKI-Purna yang mengukir prestasi dalam hal menciptakan penghasilan berkelanjutan di tanah air pasca mereka menjadi TKI. Sebab hal tersebut sudah barang tentu tidak saja bermanfaat bagi diri mereka sendiri tetapi juga bagi pihak lain, misalnya dalam menciptakan lapangan pekerjaan di sektor riil terkait usaha ekonomi produktif yang mereka kembangkan. Lebih dari itu penggunaan dana remitansi TKI-Purna untuk investasi pastinya dapat bermanfaat dalam menekan laju inflasi.

Sejak tahun 2000, Perserikatan bangsa-Bangsa atau *United Nations* (UN) telah menetapkan tanggal 18 Desember sebagai hari Migrant Internasional, melalui penyelenggaraan “*The International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Family*”. Pada tahun 2007 para pemimpin Negara ASEAN juga telah sepakat berbuat sesuatu bagi para pekerja migrant internasional. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE-UI) sejak tahun 2009 telah aktif memperingati hari Migrant Internasional, dan sejak 2010 memberikan penghargaan untuk TKI-Purna berprestasi. Untuk melihat kronologi dan aktivitas kegiatan ini dari 2009 sampai saat ini bisa diakses melalui www.penghargaantki.org.

Pada tahun 2012, Pusat Usaha Kecil dan Menengah (UKM Center) FE-UI bekerjasama dengan *Indonesia Center for Public Policy Studies FE-UI* (ICPPS FE-UI) menyelenggarakan kegiatan *Indonesia Migrant Worker Award 2012*, yang disertai dengan sesi Diskusi Publik dengan tema “Sinergi dalam Membangun TKI Purna Berdikari”.

Adapun tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan penghargaan bagi TKI-Purna yang berprestasi, yang dalam hal ini sukses berwirausaha dan memberdayakan masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat menginspirasi para TKI dan masyarakat lainnya agar terus bangga dan semangat untuk berwirausaha dan bersama-sama berkarya memberdayakan masyarakat. Selain itu pada sesi Diskusi Publik juga dibahas mengenai potensi sinergi yang dapat dilakukan antara berbagai pihak sehingga proses pembangunan TKI-Purna berdikari dapat diakselerasi.

Tentunya banyak pihak mengetahui (melalui media elektronik, cetak dan media yang lain), bahwa para TKI kita di luar negeri sangat banyak mengirimkan uangnya ke Indonesia. Namun demikian, dengan terbiasanya julukan TKI sebagai “pahlawan devisa” diucapkan, maka keuntungan dari pengiriman uang para TKI tersebut menjadi kehilangan makna. Publik selama ini cenderung hanya memaknai bahwa peran mereka dalam pembangunan masih dalam wacana, opini, polemik, diskusi, dialog, dan penulisan-penulisan kertas kerja atau jurnal-jurnal; artinya belum terealisasi dengan nyata. Mungkin karena kita tidak merasakan langsung uang yang mereka kirimkan, sehingga hal itu jauh dari kesadaran masyarakat bahwa sesungguhnya remitansi TKI bermakna-guna tidak saja bagi TKI dan keluarganya tetapi juga bagi bangsa. Terkecuali untuk daerah-daerah di mana TKI tersebut berasal, sudah banyak pihak yang berasumsi dan dapat merasakan bahwa kiriman uang tersebut langsung berpengaruh positif terhadap roda perekonomian di daerah asal TKI. Misalnya kabupaten Ponorogo, pada saat krisis ekonomi terjadi tahun 1998 ekonomi kabupaten tersebut masih bisa tumbuh sekitar 3% setahun. Pertumbuhan itu sebagian besar dikontribusi oleh manfaat aliran remitansi TKI.

Dewasa ini dalam wacana global berkembang hipotesa bahwa dampak dari uang kiriman tenaga migran di semua negara merupakan satu aliran mata uang asing yang amat berarti (penting) yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan di banyak negara dan secara langsung memberi manfaat terhadap perbaikan kualitas hidup jutaan rumah tangga dengan jumlah total diperkirakan tidak kurang dari 10% dari populasi dunia.

Persoalannya, bagaimana TKI menggunakan atau membelanjakan remitansinya? Pertanyaan ini sekurang-kurangnya mengundang dua pertanyaan mendasar : (1) Bagaimana peran remitansi TKI dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga TKI?, (2) Bagaimana peran remitansi TKI dalam menciptakan penghasilan berkelanjutan bagi TKI dan keluarganya?. Berangkat dari latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka dipandang perlu melakukan kajian ini dengan tema “Kajian Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Optimalisasi Peran TKI-Purna”.

1.2. Rumusan Masalah

Secara metodologis, terdapat 4 (empat) pertanyaan penelitian (*research questions*) yang diajukan dalam kajian ini, yang menjadi bintang penunjuk jalan (fokus utama) pelaksanaan kajian ini, dan karenanya empat pertanyaan itulah yang diharapkan dapat terjawab melalui kajian ini. Keempat pertanyaan tersebut sebagai berikut :

No	Permasalahan / Fokus Penelitian
1	Bagaimana kecenderungan peran remitansi TKI-Purna terhadap peningkatan kesejahteraan TKI-Purna dan keluarganya?
2	Bagaimanakah kecenderungan peran remitansi TKI-Purna terhadap terciptanya usaha ekonomi produktif yang dapat menciptakan mata pencaharian berkelanjutan bagi TKI-Purna dan keluarganya?
3	Kebijakan apa yang telah diambil oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten untuk melakukan optimalisasi peran TKI-Purna dalam rangka memberdayakan TKI-Purna dan keluarganya serta masyarakat miskin ?
4	Bagaimana langkah konkrit yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten sebagai upaya melakukan optimalisasi peran TKI-Purna dalam rangka memberdayakan TKI-Purna dan keluarganya serta masyarakat miskin ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berpijak dari rumusan masalah penelitian/kajian ini sebagaimana tertuang dalam sejumlah pertanyaan yang merupakan permasalahan/fokus kajian di atas, maka kajian ini secara umum bertujuan mengetahui sejumlah data yang berkaitan dengan TK-Purna di Provinsi Jawa Timur guna menyusun rekomendasi kebijakan pemberdayaan Masyarakat melalui optimalisasi peran TKI-Purna. Adapun secara khusus kajian ini bertujuan :

1. Mengetahui kecenderungan peran remitansi TKI-Purna terhadap peningkatan kesejahteraan TKI-Purna dan keluarganya.
2. Mengetahui bagaimanakah kecenderungan peran remitansi TKI-Purna terhadap terciptanya usaha ekonomi produktif yang dapat menciptakan mata pencaharian berkelanjutan bagi TKI-Purna dan keluarganya.
3. Mengetahui kebijakan apa yang telah diambil oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten di lokasi kajian untuk melakukan

optimalisasi peran TKI-Purna dalam rangka memberdayakan TKI-Purna dan keluarganya serta masyarakat miskin.

4. Mengetahui bagaimana langkah konkrit yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten di lokasi kajian sebagai upaya melakukan optimalisasi peran TKI-Purna dalam rangka memberdayakan TKI-Purna dan keluarganya serta masyarakat miskin.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil kajian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu rujukan bagi Pemerintah Daerah dalam melahirkan kebijakan yang perlu diambil untuk melakukan optimalisasi peran TKI-Purna dalam rangka memberdayakan masyarakat miskin. Disamping itu diharapkan hasil kajian ini dapat menjadi rujukan untuk menentukan langkah-langkah konkrit apa yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten dalam upaya melakukan optimalisasi peran TKI-Purna dalam rangka memberdayakan masyarakat miskin.

1.5. Hasil Yang Diharapkan

Secara substantif, kajian ini diharapkan dapat menjawab 4 (empat) pertanyaan sebagaimana tersebut dalam sub bab “Rumusan Masalah”, meliputi :

1. Deskripsi yang menunjukkan bagaimana kecenderungan peran remitansi TKI-Purna terhadap peningkatan kesejahteraan TKI-Purna dan keluarganya.
2. Deskripsi yang menunjukkan bagaimana kecenderungan peran remitansi TKI-Purna terhadap terciptanya usaha ekonomi produktif yang dapat menciptakan mata pencaharian berkelanjutan bagi TKI-Purna dan keluarganya.
3. Inventarisasi dan analisis tentang sejumlah kebijakan/program/kegiatan yang telah diambil/dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten untuk melakukan optimalisasi peran TKI-Purna dalam rangka memberdayakan TKI-Purna dan keluarganya serta masyarakat miskin,
4. Usulan/Draft Panduan Pembinaan TKI-Purna yang di dalamnya memuat langkah-langkah konkrit yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten sebagai upaya melakukan optimalisasi

peran TKI-Purna dalam rangka memberdayakan TKI-Purna dan keluarganya serta masyarakat miskin.

Adapun secara format dokumen, kajian ini diharapkan menghasilkan : (1) Laporan Pendahuluan 10 (sepuluh) eksemplar, (2) Draft Laporan Akhir 5 (lima Eksemplar), (3) Bahan paparan seminar hasil penelitian 50 (limapuluh) eksemplar, (4) Laporan Akhir Penelitian 10 (sepuluh) eksemplar, *Executive Summary* 10 (sepuluh) eksemplar. CATATAN : Laporan Akhir kajian ini dilampiri Usulan/Draft Panduan Kegiatan Pembinaan TKI-Purna yang di dalamnya memuat langkah-langkah konkrit yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten lokasi kajian ini dalam upaya melakukan optimalisasi peran TKI-Purna dalam rangka memberdayakan masyarakat miskin.

1.6. Ruang Lingkup Penelitian

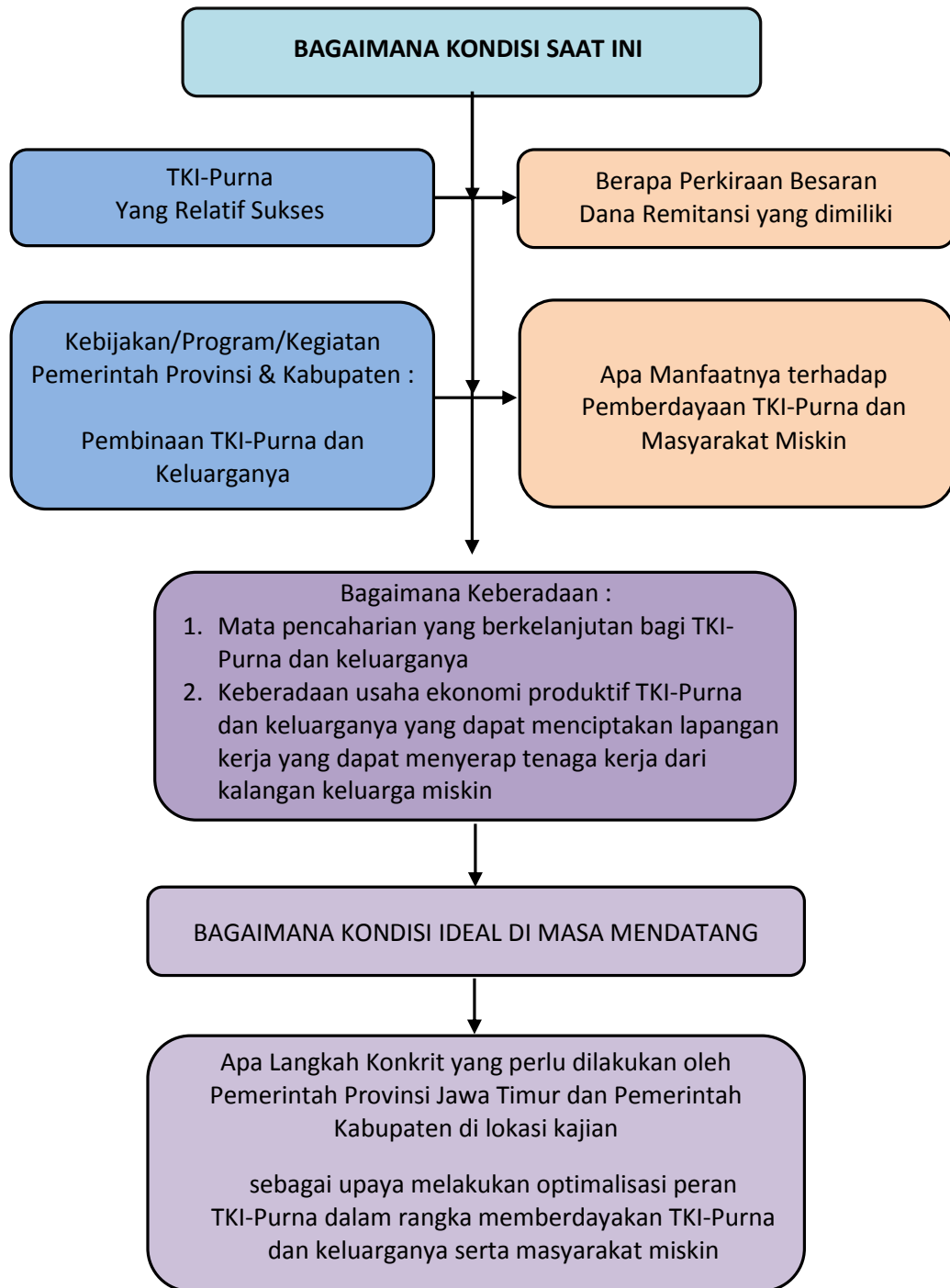
Kajian ini memiliki ruang lingkup sebagai berikut :

1. Satuan analisis yang utama dari kajian ini adalah TKI-Purna yang relatif sukses yang telah mengakhiri masa kontraknya sebagai TKI sekurang-kurangnya 3 tahun yang lalu. Ruang lingkup analisis difokuskan pada data primer hasil wawancara dengan sampel TKI-Purna, terkait penggunaan dana remitansi mereka pada pasca mereka menjadi TKI.
2. Satuan analisis pendukung dari kajian ini adalah kebijakan/program/ kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten di lokasi kajian ini terkait dengan pemberdayaan dan/atau pembinaan terhadap TKI-Purna.
3. Proses kajian ini mengikuti kaidah ilmiah sebagaimana tertuang dalam bab Metodologi.
4. Kajian ini diharapkan menghasilkan : (1) Laporan Pendahuluan, (2) Laporan Akhir, (3) *Executive Summary*, (4) Draft Panduan Kegiatan Pembinaan TKI-Purna yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten lokasi kajian ini dalam upaya melakukan optimalisasi peran TKI-Purna dalam rangka memberdayakan masyarakat miskin (sebagai lampiran Laporan Akhir).

1.7. Kerangka Konsep

Terdapat 3 (tiga) variabel penting yang menjadi pusat analisis kajian ini, yaitu : (1) TKI-Purna yang relatif sukses yang ditandai kepemilikan dana remitansi sebagai hasil mereka bekerja di luar negeri; (2) Kebijakan/Program/Kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten lokasi penelitian ini terkait pembinaan/pemberdayaan TKI-Purna yang bertujuan untuk menciptakan mata pencaharian berkelanjutan bagi TKI-Purna; (3) Implikasi Remitansi TKI-Purna terhadap : (i) terciptanya usaha ekonomi produktif sebagai sumber mata pencaharian berkelanjutan bagi TKI-Purna dan keluarganya, (ii) terciptanya lapangan pekerjaan sebagai implikasi dari keberadaan usaha ekonomi produktif TKI-Purna.

Korelasi sinergis antar variabel kajian ini sebagaimana tersebut di atas dapat diformulasikan dalam gambar berikut.



Gambar 1.2.
Diagram Kerangka Konsep

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pembangunan yang Bertumpu pada Potensi Lokal

Pembangunan yang komprehensif, menurut Asian Development Bank (ADB) dalam Nikijuluw (2002), adalah pembangunan dengan memiliki ciri-ciri (i) berbasis lokal; (ii) berorientasi pada peningkatan kesejahteraan; (iii) berbasis kemitraan; (iv) secara holistik; dan (v) berkelanjutan.

Pembangunan dikatakan berbasis lokal apabila pembangunan itu bukan saja dilakukan di suatu tempat/lokal tertentu, tetapi juga melibatkan sumber daya lokal (sumberdaya manusi, sumberdaya alam dan sumberdaya lain yang ada), sehingga akhirnya hasil pembangunan atau yang populer disebut sebagai *return to local resource* dapat dinikmati oleh masyarakat lokal. Dengan demikian prinsip daya saing komparatif akan dilaksanakan sebagai dasar atau langkah awal untuk mencapai daya saing atas dasar kompetitif. Pembangunan berbasis lokal tidak membuat penduduk lokal sekedar berperan sebagai penonton dan pemerhati di luar sistem pembangunan, tetapi mereka terlibat penuh dalam pembangunan itu sendiri.

Pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan menitikberatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utamanya, dan bukannya menempatkan peningkatan produksi di atas segala-galanya. Ini merubah prinsip-prinsip yang dulu pernah dianut, yaitu bahwa pencapaian pembangunan lebih diarahkan pemenuhan target-target variabel ekonomi makro dengan indikator utamanya kenaikan produktivitas.

Pembangunan komprehensif yang diwujudkan dalam bentuk usaha kemitraan yang mutualistis antara orang lokal (baca : orang miskin) dengan orang yang lebih mampu, berpeluang dapat membuka akses orang miskin terhadap teknologi, pasar, pengetahuan, modal, manajemen yang lebih baik, serta jaringan komunikasi dan bisnis yang lebih luas.

Pembangunan yang holistik merupakan pembangunan yang memperhatikan dan/atau mencakup semua aspek dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Cara pandang parsial, yaitu mementingkan suatu hal tanpa

memperhatikan hal lain yang juga penting, itu bertentangan dengan konsepsi pembangunan yang holistik.

Pembangunan yang berkelanjutan tidak saja mementingkan kelestarian dan keseimbangan ekosistem alam, tetapi juga mencakup keberlanjutan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lain-lain. Keberlanjutan ekonomi berarti bahwa tidak ada eksploitasi ekonomi dari perilaku ekonomi yang kuat terhadap yang lemah. Dalam kaitan ini maka perlu ada kelembagaan ekonomi yang menyediakan, menampung dan memberikan akses bagi setiap pelaku ekonomi. Keberlanjutan sosial berarti bahwa pembangunan tidak melawan, merusak dan atau menggantikan sistem dan nilai sosial yang positif yang telah teruji sekian lama dan telah dipraktekkan oleh masyarakat dalam jangka waktu relatif panjang.

Namun demikian, konsep dan atau paradigma pembangunan yang pada suatu waktu tertentu menjadi acuan pembangunan di sebuah negara dapat mengalami proses demistifikasi, sementara paradigma-paradigma baru timbul, baik menggantikannya atau menjadi komplemennya (Tjokrowinoto, 1996). Salah satu paradigma pembangunan yang hingga saat ini masih populer sebagai acuan pembangunan di sebagian besar negara-negara berkembang, termasuk Indonesia adalah paradigma *people centered*. Paradigma ini berbasis pada konsep serta berlatar belakang aliran kapitalisme. Lewat doktrin klasik yang diagungkannya, seperti *best government is less intervention, free market economy and capital oriented*, kapitalisme secara relatif dapat mengangkat kesejahteraan rakyat bagi sebagian besar negara yang mempraktikkannya.

Terlahir sebagai paradigma pembangunan yang berjubah kapitalisme, munculnya konsep dan paradigma *people centered development* pada awalnya dimulai dengan pemitosan paradigma baru (pada dasawarsa 1970-an) yaitu paradigma kesejahteraan (*welfare paradigm*) yang menjanjikan peningkatan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial (*social equity*). Komitmennya adalah melaksanakan program sesingkat mungkin serta melalui jalur selangsung mungkin, terutama sekali dengan meningkatkan akses mereka kepada berbagai pelayanan publik dan penyuluhan (Tjokrowinoto, 1996). Akan tetapi pendekatan yang cenderung memandang rakyat sebagai obyek amaliah melalui *charity strategy*, pendekatan *patronizing*, asuh (*nurture*) dan proteksi ini akan makin

meningkatkan dependensi masyarakat terhadap birokrasi dan menjadi kendala bagi *sustained development* (Korten & Alfonso, dalam Tjokrowinoto, 1996). Dari segi manajemen konsep ini mengandung beberapa kelemahan pokok, antara lain menjadikan program terkelola secara sentralistis dan sebagai pelaksana sentral, birokrasi menjadi tidak lentur dan menuntut rakyat agar menyesuaikan diri dengan apa yang akan diberikan birokrasi.

Pada awal dasawarsa 1980-an kelemahan-kelemahan yang inheren pada *welfare-oriented development* atau *equity-oriented development* mengundang reaksi dari sejumlah pakar yang lain, yang kemudian melahirkan paradigma baru, *people centered development*. Pusat perhatian paradigma ini adalah perkembangan manusia (*human growth*), kesejahteraan (*well-being*), keadilan (*equity*) dan keberlanjutan (*sustainability*), (Tjokrowinoto, 1996). Sedangkan logika yang mendominasi paradigma ini adalah keseimbangan ekologi manusia (*balanced human ecology*); sumber pembangunannya yang utama adalah informasi prakarsa yang kreatif yang tak akan pernah habis; dan tujuannya yang utama adalah perkembangan manusia dalam arti aktualisasi yang optimal dari potensi manusia (Korten, 1986). Paradigma ini memberikan peranan kepada individu, bukan sebagai subyek, akan tetapi sebagai pelaku (aktor) yang menentukan tujuan yang hendak dicapai, menguasai sumber-sumber, mengarahkan proses yang menentukan hidup mereka. Karenanya, paradigma ini memberi tempat yang penting bagi prakarsa dan keanekaragaman lokal. Disamping itu paradigma ini juga menekankan pentingnya masyarakat lokal yang mandiri (*self reliant communities*). Dalam bahasa Goulet (1977) lewat karyanya yang populer *The Cruel Choice*, pengertian *people centered* dalam konteks pembangunan adalah upaya pembebasan dari kemelaratan dan dari pandangan yang kerdil mengenai diri sendiri, dan itu juga berarti bahwa pembangunan adalah upaya memupuk harga diri dan rasa penuh daya guna atau kemampuan untuk membuat pilihan-pilihan tentang masa depan. Sedangkan dalam konsep dan pandangan Bryant & White (1987), pembangunan yang berwawasan *people centered* diartikan sebagai proses peningkatan kemampuan manusia untuk menentukan masa depannya dan ini berarti masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pembangunan dan/atau masyarakat perlu berperan serta. Selain itu mereka juga menegaskan bahwa

pembangunan bukanlah semata-mata untuk meningkatkan manfaat materiil, yang pada tataranpraksis seringkali membuahkan dehumanisasi. Munculnya paradigma *people centered* sangat mungkin disulut oleh fenomena-fenomena pertumbuhan yang tinggi tapi kesenjangan makin lebar, investasi meledak tapi pengangguran meningkat, anggaran pemerintah naik tapi kemiskinan merajalela, derajat ketergantungan negara berkembang semakin tinggi terhadap negara maju yang ditunjukkan oleh kenaikan utang luar negeri yang semakin membumbung. Paradigma *people centered* ini juga bisa diterjemahkan sebagai upaya pembangunan yang ditujukan kepada manusia melalui penciptaan kondisi atau lingkungan, baik lingkungan politik maupun budaya yang dapat mendorong lahirnya manusia yang kreatif. Dan selama ini para ahli ekonomi cenderung memandang manusia dari segi keterampilan. Dengan demikian manusia dianggap sebagai faktor produksi dan dilihat sebagai masalah teknis untuk peningkatan keterampilan. Selanjutnya, pembangunan pada akhirnya harus ditujukan pada pembangunan manusia. Manusia yang dibangun adalah manusia yang kreatif. Untuk bisa kreatif, manusia tersebut harus merasa bahagia, merasa aman dan bebas dari rasa takut.

Salah satu varian langsung dari paradigma *people centered* yang merupakan invensi dari pengalaman pembangunan negara-negara berkembang serta sarat dengan dimensi-dimensi *empowering* daripada *dependency creating* adalah *Community Based Resource Manajement (CBRM)* atau Pengelolaan Sumber Daya Lokal, (Tjokrowinoto, 1996). Sebagai salah satu konsep manajemen pembangunan baru *CBRM* menawarkan prinsip-prinsip pengelolaan program yang *applicable* dan sarat dengan *community management*. Persoalannya adalah mengapa harus mengandalkan daripada manajemen birokrasi yang sudah biasa dijalankan?. Logikanya adalah (i) sumber dari pusat tidak akan mencukupi dan menjangkau sebagian besar warga, terutama lapisan sosial bawah; (ii) Departemen pusat bertumpu pada manajemen birokrasi yang berjadual ketat dan sukar disesuaikan dengan kebutuhan riil warga; (iii) *CBRM* mempunyai potensi yang tidak terbatas untuk melakukan adaptasi dengan variasi ekologi alami, ekologi sosial, maupun preferensi individual; (v) *CBRM* memungkinkan masyarakat memobilisasi berbagai sumber, mulai dari tanah dan bangunan yang kurang dimanfaatkan

sampai pada keterampilan, saluran komunikasi dan sumber dana (Korten, 1986); *CBRM* menempatkan tanggungjawab pembangunan pada masyarakat setempat (*local accountability*)(Tjokrowinoto, 1996).*CBRM* yang cenderung mendebirokratisasikan pembangunan. Manajemen pembangunan baru ini akan merubah peranan birokrasi pemerintahan dari merencanakan dan melaksanakan pembangunan untuk rakyat, menjadi menciptakan kondisi yang menimbulkan kemampuan bagi rakyat untuk membangun diri mereka sendiri. Lebih jauh David Korten (1986)memberikan ciri-ciri *CBRM* sebagai berikut: (i) pembangunan oleh masyarakat; (ii) *community manajement* yang merekomendasikan satuan pengelola lokal yang pluralistik sebagai *decision maker* (bukan sosok tunggal) yang merupakan wadah partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam memobilisasi sumber dan potensi lokal; (iii) *social learning*, yakni proses belajar sosial antara anggota-anggota masyarakat dengan lembaga-lembaga yang ada yang bertujuan mengembangkan kemampuan mereka melalui kegiatan *problem solving* yang acapkali dilakukan dengan metode *trial and error*; (iv) manajemen strategis yang berupaya untuk mengembangkan organisasi yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Manajemen strategis tidak berupaya untuk menguasai dan memprogram perilaku manusia, akan tetapi mengembangkan prakarsa kreatif mereka untuk dapat memecahkan masalah yang mereka hadapi. Dengan memberikan ruang yang sangat longgar terhadap upaya-upaya pemanfaatan sumber lokal sepenuhnya oleh masyarakat setempat, maka konsekuensi prinsip ini (*CBRM*)adalah sulit dimulai oleh karena para pengambil keputusan yang terwadahi dalam satuan pengelola lokal jelas akan berhadapan dengan potensi-potensi lokal yang cukup beragam. Dan ini jelas perlu waktu untuk mengkonfirmasi dengan misi dan visi yang akan dibangun warga setempat, akibatnya proses mobilisasi sumber dan potesi lokal berjalan lamban (Tjokrowinoto, 1996). Namun demikian, secara operasional, konsep yang berprinsip *empowering* ini lebih memusatkan prakarsa di tingkat lokal (desa) daripada di tingkat pusat, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

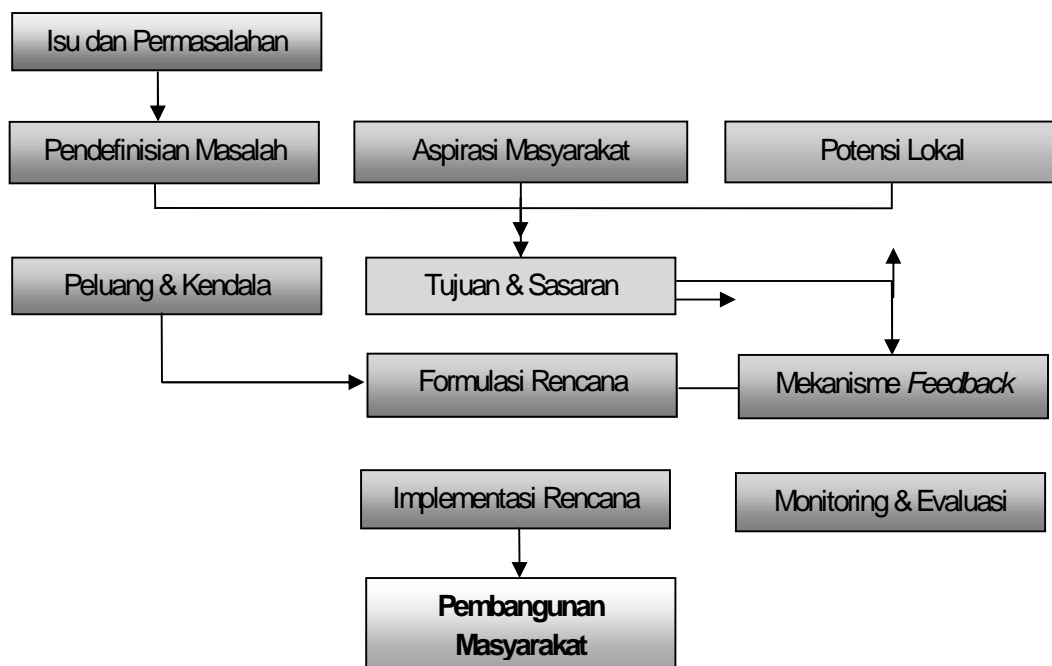
Tabel 2.1.
Komparasi Program Pembangunan yang Memberdayakan vs Menciptakan Ketergantungan

Kriteria	Memberdayakan	Menciptakan Ketergantungan
Prakarasa	Di desa	Di ibukota
Dimulai dengan	Pemecahan masalah	Rencana formal
Desain Program	Pengelolaan lokal	Statis, didominasi pakar / Ilmiah
Teknologi	Asli-Ilmiah	Dana dan teknisi dari pusat
Sumber Utama	Rakyat dan sumber lokal	-
Kesalahan Organisasi	Diterima	Diabaikan
Pendukung	Dibina dari bawah	Dibina dari atas
Pertumbuhan	Tahap demi tahap	Cepat-mekanistik
Pembinaan Personil	Berkesinambungan, dan berdasarkan pengalaman di lapangan.	Prajabatan, pendidikan formal dan pendidikan non-formal
Diorganisir	Tim Interdisipliner	<i>Technical Spesialis</i>
Evaluasi	Oleh diri sendiri & berkesinambungan	Eksternal & <i>impact-oriented</i>
Kepemimpinan	Kuat berlanjut dan individual	Terbatas, berganti dan <i>positional</i>
Analisis Sosial	Untuk defenisi masalah dan perbaikan program	Untuk membenarkan rencana dan memenuhi persyaratan evaluasi
Fokus Manajemen	Kelangsungan berfungsinya sistem dan kelembagaan	Selesainya proyek pada waktu yang telah ditentukan

Sumber : Pembangunan, Dilema & Tantangan (Tjokrowinoto, 1996)

Masih merujuk pada konsepsi *CBRM*, dalam ranah pemberdayaan masyarakat miskin, pembangunan berbasis lokal ini dikenal dengan istilah *Community-Based Resource Manajement* atau *CBRM* yang pada intinya menegaskan akan arti penting mobilisasi sumber daya lokal yang seharusnya dikelola oleh komunitas lokal, baik yang berkaitan dengan upaya peningkatan produktivitas, keseimbangan (ekosistem), keadaan ekonomi dan sosial secara berkesinambungan, sebagaimana ditegaskan dalam pernyataan Korten (1986) bahwa, *the performance of the CBRM is a function of its ability to mobilize available resources and to use them productively, equitably, and sustainably in meeting the needs of community members*. Tokrisna dalam artikelnya yang berjudul *A Review on Fisheries And Coastal Community Based Co-Manajement Regime In Thailand*, (take from : www.worldfishercenter.org.pdf) memberikan ilustrasi bahwa ketika *CBRM* dipilih menjadi sebuah pendekatan untuk

pembangunan masyarakat miskin, maka pemerintah lokal harus memberikan ruang partisipasi yang longgar bagi masyarakat miskin untuk terlibat dalam kegiatan pengambilan keputusan yang menyangkut masa depan komunitas itu sendiri. Selain itu, pemerintah lokal juga harus mendukung upaya pemberdayaan komunitas dengan menyediakan sejumlah instrumen yang mendukung upaya tersebut seperti, kerangka program yang jelas, dukungan regulasi, pendanaan dan pendidikan. Dalam pendekatan ini, setiap langkah perubahan dan program pembangunan yang diusung atau yang akan dilaksanakan sebisa mungkin harus mendapatkan persetujuan di setiap level komunitas. Oleh Dahuri (2001) CBRM dimaknai sebagai upaya pengelolaan wilayah yang berbasis masyarakat dan harus dilaksanakan secara terpadu. Dan untuk itu diperlukan beberapa proses pengelolaan yang sesuai dengan tahapan manajemen yaitu mulai dari perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi.



Gambar 2.1.

Proses Pemberdayaan Masyarakat Miskin Berbasis Potensi Lokal

Sumber: Dimodifikasi dari Dahuri, 2001

Tahap awal dari proses pemberdayaan adalah dengan cara mengidentifikasi dan mendefinisikan isu dan permasalahan yang ada, misalnya masalah rendahnya kualitas hidup, rendahnya pendapatan/penghasilan, banyaknya jumlah pengangguran, kerusakan sumber daya alam, tingginya potensi konflik

penggunaan sumberdaya, dimana kemudian perlu dilihat penyebab dan sumber permasalahan tersebut. Selanjutnya juga perlu diperhatikan sumber daya lokal yang ada, menyangkut potensi, daya dukung, status, tingkat pemanfaatan, kondisi sosial ekonomi dan budaya setempat seperti jumlah dan kepadatan penduduk, keragaman suku, jenis mata pencaharian masyarakat lokal, sarana dan prasarana ekonomi dan lain-lain. Berdasarkan pendefinisian masalah yang dipadukan dengan informasi tentang sumberdaya serta aspirasi masyarakat selanjutnya disusun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai serta melihat peluang dan kendala yang ada selanjutnya mulai dibuat perencanaan berupa kegiatan pembangunan dalam bentuk program dan proyek. Perencanaan yang telah disusun perlu disosialisasikan kembali kepada masyarakat luas untuk mendapat persetujuan, setelah mendapat persetujuan rencana ini baru dimasukkan dalam agenda pembangunan.

Pada tahap implementasi pemberdayaan, diperlukan kesiapan dari semua pihak yang terlibat didalamnya, seperti masyarakat itu sendiri, tenaga pendamping lapangan dan pihak lainnya. Selain itu juga diperlukan koordinasi dan keterpaduan antar sektor dan *stakeholder* yang ada sehingga tidak terjadi tumpang tindih kepentingan dan ego sektoral. Dalam hal ini diperlukan adanya lembaga pelaksana yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan seperti Pemerintah Daerah, masyarakat lokal, Investor/swasta, instansi sektoral, Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Pada tahap implementasi ini juga diperlukan kesamaan persepsi antara masyarakat lokal dengan lembaga atau orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini sehingga masyarakat benar-benar memahami rencana yang akan dilaksanakan. Menurut Zamani & Darmawan (2000) kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan pada tahap implementasi ini adalah: (i) integrasi ke dalam masyarakat, dengan melakukan pertemuan dengan masyarakat untuk menjawab seluruh pertanyaan yang berhubungan dengan penerapan konsep dan mengidentifikasi pemimpin potensial yang terdapat di lembaga masyarakat lokal; (ii) pendidikan dan pelatihan masyarakat, metoda pendidikan dapat dilakukan secara non formal menggunakan kelompok-kelompok kecil dengan cara tatap muka sehingga dapat diperoleh informasi dua arah dan pengetahuan masyarakat

lokal (*indigenous knowledge*) dapat dikumpulkan untuk dimasukkan dalam konsep penerapan; (iii) memfasilitasi arah kebijakan, dalam hal ini segenap kebijakan yang berasal dari masyarakat dan telah disetujui oleh koordinator pelaksana hendaknya dapat didukung oleh pemerintah daerah, sehingga kebijakan bersama tersebut mempunyai kekuatan hukum yang jelas; dan (iv) penegakan hukum dan peraturan, yang dimaksudkan agar seluruh pihak yang terlibat akan dapat menyesuaikan tindakannya dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Monitoring yang dilakukan sejak dimulainya proses implementasi perencanaan dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas kegiatan dan permasalahan yang timbul dalam implementasi kegiatan pemberdayaan. Monitoring dilakukan dengan melibatkan seluruh pihak yang ada. Setelah monitoring selanjutnya dilakukan evaluasi bersama secara terpadu dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan. Melalui evaluasi ini akan diketahui kelemahan dan kelebihan dari perencanaan pemberdayaan yang ada guna melakukan perbaikan pada proses pemberdayaan pada tahap berikutnya.

Pembangunan yang berbasis pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prinsip Ko-Manajemen perlu ada pendistribusian tanggung jawab dan wewenang antara pemerintah dan masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya yang ada. Oleh sebab itu keberhasilan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat dapat mengacu kepada indikator keberhasilan Ko-manajemen sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2.
Indikator Keberhasilan Ko-Manajemen dalam Pemberdayaan Masyarakat

Kriteria	Indikator	Cara Mengukur
Tingkat Pendapatan	Peningkatan relatif pendapatan masyarakat lokal	Secara kuantitatif membandingkan pendapatan sebelum dan sesudah diterapkan Ko-manajemen. Tingkat inflasi harus diperhitungkan dengan melihat kualitas hidup masyarakat dalam memenuhi kebutuhan primer dan sekunder
Pendidikan Formal dan Informal	Peningkatan jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan formal dan informal	Perbandingan jumlah relatif lulusan masyarakat lokal dari pendidikan formal dan informal
Kesadaran Masyarakat	Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab	Semakin berkurangnya kegiatan yang bersifat merusak dan se-

Kriteria	Indikator	Cara Mengukur
	masyarakat dalam menjaga dan memelihara sumber daya alam dan sumberdaya yang lain	baliknya semakin banyak kegiatan yang menunjang kelestarian sumber daya alam dan sumberdaya yang lain
Motivasi	Meningkatnya motivasi masyarakat dalam proses pengelolaan potensi lokal	Semakin banyak usulan dan keinginan masyarakat yang disampaikan dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan ko-manajemen dan semakin meningkatnya peranan masyarakat dalam proses-proses pengelolaan sumber daya lokal
Kreativitas & Kemandirian	Meningkatnya bentuk dan variasi pemanfaatan sumber daya alam yang lestari oleh masyarakat	Jumlah dan variasi pemanfaatan sumber daya yang dilakukan masyarakat
Pengakuan Hak	Diakuinya hukum tradisional atau masyarakat lokal dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam	Jumlah dan intensitas pelaksanaan aturan lokal dan tradisional
Program Kemitraan	Terbentuknya program kemitraan dalam pemanfaatan sumber daya alam	Efisiensi dan intensitas program kemitraan dalam menunjang kegiatan masyarakat lokal

Sumber : Dahuri (1998)

2.2. Pembangunan Masyarakat (*Community Development*)

Pembangunan masyarakat oleh karena fokusnya adalah masyarakat, maka memiliki hubungan yang sangat erat dengan kepentingan masyarakat. Karena itu dalam pembangunan masyarakat sedikitnya terkandung empat hal berikut:

1. Pembangunan harus memperhatikan dan mengusahakan tumbuhnya kemampuan masyarakat untuk mengadakan perubahan (*ability and energy to change*).
2. Mengusahakan adanya pemerataan (*equity*); perhatian yang tidak merata terhadap kelompok dan lapisan masyarakat yang berbeda-beda dapat mengundang perpecahan, dengan demikian justru melemahkan mereka.
3. Pembangunan berarti memberikan hak, kewenangan atau kekuasaan (*empowerment*) kepada masyarakat, karena hanya jika masyarakat memiliki kekuasaan seperti itu, mereka dapat menikmati manfaat pembangunan.

4. Pembangunan berarti mengusahakan saling membantu antara masyarakat, agar masing-masing mampu berkembang secara mandiri (Bryant & White, 1982: 16).

Melihat pengertian dan konsep-konsepnya yang demikian, maka dalam wacana akademik pembangunan masyarakat menduduki tempat yang amat berbeda dengan pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi. Pembangunan masyarakat (*community development*) merupakan upaya untuk merubah keadaan masyarakat dari yang kurang dikehendaki menuju keadaan yang lebih baik (Ruopp, 1953: 16). Di negara-negara bekas jajahan Inggris, pembangunan masyarakat adalah pembangunan yang menitikberatkan pada perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Milburn, 1954: 1).

PBB melihat pembangunan masyarakat (*community development*) sebagai suatu proses usaha masyarakat, baik berasal dari prakarsanya sendiri, maupun pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, budaya mereka; dan mengintegrasikan masyarakat tersebut ke dalam kehidupan bangsa, dan meningkatkan kemampuan mereka untuk memberikan sumbangan yang berarti terhadap kemajuan bangsa dan negara secara terpadu.

Terdapat dua elemen penting dalam proses pembangunan masyarakat yaitu “partisipasi masyarakat” dalam memperbaiki taraf hidup mereka berdasarkan kekuatan mereka sendiri; dan “bantuan pemerintah” yang berupa pelayanan teknis. Bantuan macam ini diarahkan untuk membangkitkan prakarsa masyarakat, yang biasanya terwujud dalam sejumlah proyek khusus. Program-program yang terkait dengan pembangunan masyarakat biasanya menyangkut kepentingan umum komunitas setempat, karena mereka memiliki kepentingan yang relatif sama. Adapun urusan-urusan lain yang bersifat khusus ditangani oleh kelompok fungsional yang khusus menangani bidang-bidang tertentu.

Pembangunan masyarakat memberi peluang yang amat luas bagi tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat, baik partisipasi dalam menciptakan ide-ide pembangunan, merumuskan rencana pembangunan maupun dalam mewujudkan rencana-rencana pembangunan tersebut ke dalam kegiatan

pembangunan. Batten (1960: 1) misalnya, mengemukakan bahwa pembangunan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat membahas dan merumuskan kebutuhan mereka, merencanakan usaha pemenuhannya dan melaksanakan rencana itu sebaik-baiknya; dan menurutnya pembangunan masyarakat yang demikian ditujukan untuk mengurangi kemiskinan, kemelaratan dan kebobrokan lingkungan masyarakat. Pembangunan masyarakat berorientasi kepada peningkatan kualitas hidup masyarakat, bukan berorientasi kepada produk riil yang secara langsung dihasilkan oleh kegiatan pembangunan.

Yang dimaksud “masyarakat” (*community*) dalam konsep pembangunan masyarakat adalah masyarakat lokal, yaitu penduduk yang hidup bersama dalam suatu lokalitas dan mempunyai kepentingan yang relatif sama (20th report to ECOSOC, dalam Bhattacharya, 1972:4; dikutip Ndraha, 1990:72); dengan demikian masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat pedesaan dan juga masyarakat di perkotaan (Bernard, 1972). Senada dengan Bernard, Rahardjo juga menggarisbawahi bahwa pembangunan masyarakat merupakan pembangunan yang mengutamakan partisipasi aktif masyarakat, dan berlaku baik di desa maupun di kota, bertujuan meningkatkan taraf hidup mereka (Rahardjo, 1999: 195).

Arthur Dunham memandang *Community Development* sebagai usaha yang terorganisir untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat, menciptakan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri melalui: (1) program berencana; (2) pembangkitan tekad masyarakat untuk menolong diri sendiri dan tidak selalu bergantung pada pihak lain; (3) memberi bantuan teknis (dari pihak lain, pemerintah misalnya) berupa personil peralatan dan dana; (4) pemaduan berbagai keahlian untuk mendukung masyarakat. (Dunham, 1960; dalam Russell H Kurtz, 1960; dikutip Ndraha, 1990: 77)

Pada umumnya “pembangunan masyarakat” bersifat komprehensif dan merupakan bagian integral dari pembangunan suatu bangsa. Dalam kerangka ini pembangunan masyarakat berarti diperankan sebagai “metode” dalam rangka mencapai tujuan nasional. Peran pembangunan masyarakat yang demikian dilaksanakan misalnya di India. Di negara ini pembangunan masyarakat dirancang sebagai metode dalam merintis proses transformasi kehidupan sosial dan ekonomi

di wilayah pedesaan. Sebagai metode, pembangunan masyarakat biasanya diharapkan menghasilkan tiga hal:

1. Kesatuan pikiran dan tindakan antar instansi dan badan yang menyelenggarakan atau yang mengambil peranan dalam pembangunan masyarakat; baik pemerintah, masyarakat maupun pihak swasta;
2. Perubahan cara berfikir dan cara hidup sosial dan ekonomi melalui organisasi kemasyarakatan;
3. Pengembangan wilayah (*area development*) berdasarkan pendekatan tujuan ganda (*multipurpose approach*) (Ndraha, 1990:78).

Meski pembangunan masyarakat merupakan integral dari pembangunan nasional, maka hal itu tidak berarti pembangunan masyarakat hanya merupakan tanggung jawab pemerintah semata. Di Amerika Serikat dan sejumlah negara berkembang, pembangunan masyarakat didasarkan pada prakarsa masyarakat setempat (*local initiative*).

2.3. Konsepsi Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan

Pemberdayaan dipilih sebagai salah satu instrumen dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata “daya” (*power*) yang berarti kekuatan, kemampuan, atau pun kewenangan. sehingga *to empower* berarti memberi keberdayaan. Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah. Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas pada pengertian di atas. Kekuasaan tidak vakum dan terisolasi. Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial antar manusia. Tepatnya, kekuasaan tercipta dalam relasi sosial. Karena itu, kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan

sangat tergantung pada dua hal: (1) bahwa kekuasaan dapat berubah, sehingga jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun; dan (2) bahwa kekuasaan dapat diperluas, konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis. Berikut ini merupakan pendapat sejumlah ahli teori pembangunan tentang apa dan bagaimana sesungguhnya pemberdayaan masyarakat :

1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.
2. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.
3. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya.
4. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap; kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons, 1994:106).
5. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk (a) memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (b) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Beragam definisi pemberdayaan menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin

dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

Berikut ini disajikan pandangan sejumlah pakar tentang apa dan bagaimana pemberdayaan itu dalam konteks pembangunan. (Weissglass, 1990 dalam Bank Indonesia, 2008) memandang pemberdayaan sebagai proses membantu orang lain dalam memberi makna baru dalam hidupnya dan melaksanakan kebebasannya dalam memilih dengan jalan memberikan sejumlah tambahan alternatif jalan hidup yang dapat memperkaya pilihan mereka, yang mengantar mereka ke arah kehidupan yang lebih baik.

Robinson, 1994 (dalam Tjokrowinoto, 1993) mendefinisikan pemberdayaan sebagai proses pribadi dan sosial, suatu rasa kebebasan memiliki kekuatan, kemampuan, kreatifitas, dan keleluasaan untuk bertindak sendiri. Diberdayakan berarti diberi kekuatan yang bergelora dari seseorang kepada orang lain dan dari dalam diri sendiri, khususnya kekuatan untuk bisa bertindak dalam rangka tumbuh menjadi manusia seutuhnya.

Irwin, 1995 (dalam Tjokrowinoto, 1993) berpendapat bahwa memberdayakan orang lain berarti memberi mereka suatu peluang untuk mampu memberikan kontribusinya secara spesial. Dalam pandangan Bryant & White (1987), *empowerment* berarti penumbuhan kekuasaan dan wewenang yang lebih besar kepada si miskin. Selanjutnya mereka menyatakan bahwa "satu-satunya cara menciptakan mekanisme dari dalam (*built in*) guna meluruskan keputusan-keputusan alokasi yang sangat tidak adil ialah menjadikan rakyat mempunyai pengaruh". Hal ini senada dengan rumusan yang diberikan oleh Paulo Freire (dalam Soetrisno, 1995) yang menyatakan bahwa *empowerment* bukanlah sekedar memberi kesempatan rakyat menggunakan sumber alam dan dana pembangunan saja akan tetapi lebih dari itu *empowerment* merupakan upaya untuk mendorong

masyarakat untuk mencari cara menciptakan kebebasan dari struktur-struktur yang opresif. Dengan kata lain *empowerment* berarti partisipasi masyarakat dalam politik.

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya, Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat keterbukaan, kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan lembaga-lembaga sosial dan pengintegrasinya kedalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat didalamnya.

Peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya merupakan unsur yang sungguh penting dalam hal ini. Dengan dasar pandang demikian, maka pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan dan pengamalan demokrasi. Dalam konteks dan tinjauan administrasi, pemberdayaan masyarakat dalam rangka pelaksanaan program pembangunan harus mempunyai beberapa persyaratan pokok, yaitu, ***pertama***, kegiatan yang dilaksanakan harus terarah bagi atau menguntungkan masyarakat yang lemah, terbelakang dan tertinggal. ***Kedua***, pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat sendiri, dimulai dari pengenalan apa yang dilakukan. ***Ketiga***, karena masyarakat yang lemah sulit untuk bekerja sendiri-sendiri akibat kekurangan keberdayaannya, maka upaya pemberdayaan masyarakat menyangkut pula pengembangan kegiatan usaha bersama (kooperatif) dalam kelompok yang dapat dibentuk atas dasar wilayah tempat tinggal. ***Keempat***, menggerakkan partisipasi yang luas dari masyarakat untuk turut serta membantu dalam rangka kesetiakawanan sosial disini termasuk keikutsertaan orang-orang setempat yang telah maju, anggota masyarakat mampu lainnya, organisasi-organisasi kemasyarakatan termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) setempat, perguruan tinggi dan sebagainya. Dari pengalaman pembangunan selama ini, makin jelas banyak persoalan menghambat dan dapat menggagalkan

pembangunan adalah dalam pelaksanaannya. Oleh karena dalam ilmu administrasi berkembang pula penelitian-penelitian yang khusus mendalami masalah pelaksanaan (*implementation*) sebab betapapun baiknya perencanaan tidak akan lebih baik daripada hasil pelaksanaannya. Masih menurut Ginandjar (1996), dalam pelaksanaan program pembangunan tercakup beberapa aspek. Ia menyangkut masyarakat dan aparat pemerintah (birokrasi) sebagai pelaksana pembangunan. Masalah besar yang dihadapi dalam upaya pemberdayaan masyarakat adalah ketidaktahuan (*ignorance*) di kalangan masyarakat itu sendiri. Disamping itu, salah satu hambatan utama bagi pembangunan yang berhasil ternyata adalah aparat pemerintah sendiri. Ia menyangkut masalah mental, pengetahuan, kecakapan dan juga kesejahteraan sumber daya manusianya. Ia juga menyangkut masalah sistim dan pengorganisasian termasuk tatanan, fungsi, prosedur dan sebagainya, dari aparat pemerintah sebagai aparat pembangunan.

Dari batasan-batasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa memberdayakan berarti: (1) memberi kekuatan kepada orang lain untuk menerima gagasan-gagasan baru dan kebebasan untuk memilih sesuatu sesuai dengan kepentingannya; (2) menciptakan kemampuan orang lain untuk dapat bertindak serta menjadi dirinya sendiri secara utuh; (3) memberi peluang kepada orang lain agar mereka mampu memberikan kontribusi yang terbaik bagi kehidupannya;serta (4) meningkatkan posisi tawar mereka yang tidak berdaya dari segala bentuk kekuatan yang menekan.

Langkah-langkah kongkrit proses pemberdayaan masyarakat miskin ialah, pertama, meningkatkan kesadaran kritis masyarakat miskin atas posisi dirinya dalam struktur sosial, ekonomi dan politik di mana masyarakat miskin tersebut tinggal agar mereka tidak menyerah begitu saja kepada nasib serta agar mereka sadar akan perlunya perubahan bagi diri mereka. Pemutusan hubungan eksploitatif ini bisa dilakukan apabila ada reformasi sosial, budaya dan politik; karenanya ini bisa memberi peluang bagi masyarakat miskin untuk mereorganisasi dirinya. Kedua, melibatkan masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan, terutama keputusan yang menyangkut kepentingan mereka. Ini bisa terjadi apabila komunikasi antara pemegang kekuasaan, tokoh-tokoh strategis, dan masyarakat miskin tidak mengalami distorsi. Apabila komunikasi tersebut mengalami distorsi,

keputusan pembangunan tidak bisa mengakomodasi kepentingan masyarakat miskin (Tjokrowinoto, 1993).

Ciri-ciri proses pembangunan yang mengedepankan pemberdayaan adalah: (1) prakarsa dan proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat diarahkan kepada masyarakat itu sendiri; jadi *bottom up planning* tidak hanya sebuah retorika; (2) proses pembangunan memperhatikan upaya peningkatan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memobilisasi sumber-sumber yang berada pada komunitasnya guna memenuhi kebutuhan hidup mereka; (3) proses *social learning* dianggap sebagai sesuatu yang penting, karena didalamnya terjadi interaksikolaboratif antar birokrasi, LSM dan masyarakat miskin; dan (4) diciptakannya iklim yang kondusif bagi terbentuknya *networking* antara birokrasi, LSM dan masyarakat; dan secara bertahap ini akan menciptakan satuan-satuan organisasi tradisional yang mandiri (Korten, 1986).

Sebagai strategi alternatif, strategi pemberdayaan memberikan tekanan pada dua hal: (1) menempatkan manusia sebagai pelaku pembangunan dan (2) menekankan perlunya otonomi bagi setiap pelaku pembangunan untuk mengambil keputusan yang menyangkut dirinya. Untuk itu beberapa konsep seperti partisipasi, demokrasi, proses belajar sosial, sumber daya lokal, *civil society* dan sebagainya adalah konsep-konsep yang perlu dikembangkan dalam proses pemberdayaan (Friedmann, 1992). Dengan demikian proses pemberdayaan merupakan proses mewujudkan *self-sustaining capacity* masyarakat itu sendiri; menuju pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development*); dan nampaknya ini dapat dipandang sebagai suatu alternatif pembangunan yang dapat menjamin komplementarinya dengan pembangunan bidang-bidang lain (Tjokrowinoto, 1987).

Pemberdayaan sebagai suatu program aksi tidak sekedar merupakan perencanaan dari pemerintah untuk mereduksi kemiskinan masyarakatnya tetapi juga merupakan gerakan sosial politik dari pemerintah, swasta, dan masyarakat luas yang berjuang untuk menekan kemiskinan. Oleh karena itulah, pemberdayaan orang miskin harus merupakan gerakan bersama dari seluruh komponen bangsa baik secara ekonomi, sosial budaya, maupun politik (Friedmann, 1992).

Berikut beberapa hal yang biasanya menjadi penyebab kegagalan dalam pemberdayaan masyarakat miskin (Friedmann, 1992):

1. Ketidakmampuan atau kesalahan dalam mempersepsi kebutuhan pokok (kebutuhan utama) masyarakat miskin menuju keberdayaan mereka.
2. Kegagalan strategi pertumbuhan, di mana pertumbuhan yang tinggi tidak membawa *trickle-down effect*.
3. Tindakan-tindakan yang bersifat parsial dan tidak efektif, padahal kemiskinan merupakan fenomena multidimensional.
4. Sistem statistik yang tidak mampu mendukung penentuan dengan tepat standar hidup dan batas garis kemiskinan.
5. Pengabaian pentingnya pelibatan orang miskin dalam proses pemberdayaan dirinya.
6. Kurang atau rendahnya dukungan sarana yang memungkinkan orang miskin percaya diri untuk dapat menyediakan kebutuhannya sendiri.
7. Rendahnya inisiatif orang miskin itu sendiri untuk memperoleh dukungan atas pemenuhan kebutuhan yang mereka tentukan sendiri. Program anti-kemiskinan yang efektif tidak hanya dirumuskan oleh elit yang ada di puncak, tetapi juga harus disertai inisiatif dari orang miskin itu sendiri.

Atas dasar alasan-alasan di atas, Friedmann menyimpulkan bahwa pemberdayaan sesungguhnya merupakan pemberian kekuatan sosial politik kepada si miskin untuk mengatasi kemiskinannya (pemenuhan kebutuhan pokok). Oleh karena itu, mereka memerlukan:

1. *Defensible life space*: basis teritorial ekonomi keluarga miskin.
2. *Surplus time*: waktu lebih yang disediakan bagi ekonomi keluarga.
3. *Knowledge and skill*: pengetahuan dan keahlian/keterampilan.
4. *Information*: informasi tentang dirinya sendiri maupun tentang hal-hal di luar dirinya (jaringan ke luar).
5. *Social organization*: keterlibatan orang miskin dalam organisasi, tempat mereka memperjuangkan kepentingannya maupun bekerja sama menyelesaikan masalah mereka.
6. *Social network*: jaringan sosial yang didasarkan pada hubungan timbal balik, bukan hubungan eksploitatif.

7. *Instrument of work and livelihood*: alat-alat yang dipakai sesuai dengan jenis mata pencaharian mereka.
8. *Financial resource*: uang sebagai modal, maupun sebagai pendapatan bersih atas hasil kerja mereka.

Kedelapan basis kekuatan tersebut berbeda satu sama lain tetapi saling tergantung. Seperti proses spiral, semuanya merujuk pada sarana untuk memperoleh sarana lainnya serta saling terkait satu sama lain. Berikut tahap-tahap proses pemberdayaan masyarakat miskin yang perlu dilakukan dalam program aksi:

1. Tahap Pengenalan/Sosialisasi. Pada tahap ini ditunjukkan dan diinternalisasikan kepada kelompok sasaran (*target groups*) apa yang menjadi substansi pemberdayaan yaitu: visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan aksi dari proses pemberdayaan sebagai produk keputusan yang dihasilkan bersama.
2. Tahap Aplikasi/Implementasi. Tahap ini merupakan proses mengaplikasikan substansi pemberdayaan. Dalam proses ini, perlu ditunjukkan bagaimana bentuk organisasi pelaksana, tugas pokok, fungsi, dan tanggungjawab masing-masing aktor, instrumen yang akan dipakai, sarana dan prasarana yang mendukung. Di sepanjang periode implementasi pemberdayaan, komitmen seluruh pihak terhadap proses pemberdayaan dan pencapaian tujuan pemberdayaan amat diperlukan.
3. Tahap Evaluasi dan Tindakan Lanjut. Tahap ini sebagai upaya untuk mengetahui dan menilai sejauhmanapaya pemberdayaan telah mencapai *output* dan *outcome* yang diharapkan, artinya tujuan telah tercapai sesuai yang direncanakan, dan kelompok sasaran memperoleh manfaat dari proses pemberdayaan yang telah dilakukan.
4. Tahap Pelestarian Hasil. Pelaksanaan dan kinerja pemberdayaan yang sudah baik perlu dilestarikan secara terus menerus. Kelompok sasaran perlu diingatkan untuk selalu mempertahankan hasil yang telah dicapai. Perlu pula ditumbuhkan sikap untuk tidak gampang puas dengan keadaan yang dicapai. Termasuk dalam tahap ini ialah: (1) upaya mencari jalan keluar atas sejumlah

masalah dan kendala yang dihadapi, dan (2) upaya meningkatkan kinerja yang telah dicapai dalam rangka penyempurnaan.

Adapun sejumlah kelengkapan yang diperlukan dalam rangka pemberdayaan sebagai suatu program aksi ialah:

1. *Human assets*: modal yang berupa ketrampilan, bakat, keahlian dan kemampuan yang dimiliki seseorang, termasuk modal yang diperoleh melalui pendidikan, serta keadaan kesehatan.
2. *Natural assets*: modal sumber daya alam, baik yang bisa diperbaiki (didaur-ulang) maupun yang tidak. Sumber ini berfungsi sebagai masukan bagi proses produksi atau pun dimanfaatkan secara langsung seperti hutan, ikan, dan sebagainya.
3. *Human-made assets*: adalah modal produk fisik yang khusus dibuat manusia untuk proses produksi seperti: mesin, peralatan, gedung, jaringan irigasi, aset finansial, dsb.
4. *Knowledge assets*: khususnya pengetahuan yang terkodifikasi, yaitu modal pengetahuan yang dapat ditransfer (diajarkan) kepada orang lain tanpa dibatasi ruang dan waktu.
5. *Social (Relationships) assets*: adalah modal rasa percaya dan jaringan antar personal serta nilai-nilai kebersamaan yang mampu membangkitkan motivasi dan kerjasama kelompok.

2.4. Pilar-Pilar Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Salah satu pendekatan yang kini sering digunakan dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan mengangkat harkat martabat keluarga miskin adalah pemberdayaan masyarakat. Konsep ini menjadi sangat penting terutama karena memberikan perspektif positif terhadap orang miskin. Orang miskin tidak dipandang sebagai orang yang serba kekurangan (misalnya, kurang makan, kurang pendapatan, kurang sehat, kurang dinamis) dan objek pasif penerima pelayanan belaka. Melainkan sebagai orang yang memiliki beragam kemampuan yang dapat dimobilisasi untuk perbaikan hidupnya. Konsep pemberdayaan memberi kerangka acuan mengenai matra kekuasaan (*power*) dan kemampuan

(kapabilitas) yang melingkup aras sosial, ekonomi, budaya, politik dan kelembagaan.

Kegagalan model pembangunan di negara-negara berkembang yang ditengarai para ahli sangat lamban dalam mencapai maksud dan tujuannya --- yakni memberantas kemiskinan--- disebabkan oleh karena model-model tersebut tidak memberi kesempatan pada rakyat miskin ikut dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut pemilihan, perencanaan, dan kemudian pelaksanaan program pembangunan. Dengan kata lain rakyat miskin hanyalah sekedar objek pembangunan(Soetrisno, 1995).Kegagalan atas model-model pembangunan yang cenderung sentralistis itu, mengilhami Friedmann (1992)menawarkan konsep sebagai model atau strategi pembangunan yang kemudian populer disebut sebagai '*empowerment*' (pemberdayaan). Konsep *empowerment*, sebagai suatu konsep alternatif pembangunan pada intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat, yang berlandas pada sumber daya pribadi, langsung (melalui partisipasi), demokratis, dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung. Sebagai titik fokusnya dalah lokalitas, sebab '*civil society*' menurutFriedmann (1992)akan merasa siap diberdayakan lewat issue-issue lokal. Namun Friedmann juga mengingatkan, bahwa adalah sangat tidak realistis apabila kekuatan-kekuatan ekonomi dan struktur-struktur di luar *civil society* diabaikan. Oleh karena itu, menurut Friedmann pemberdayaan masyarakat tidak hanya sebatas ekonomi saja namun juga secara politis, sehingga pada akhirnya masyarakat akan memiliki posisi tawar, baik secara nasional maupun internasional. Paradigma pemberdayaan atau *empowerment* ingin mengubah kondisi yang serba sentralistik ke situasi yang lebih otonom dengan caramemberi kesempatan pada kelompok orang miskin untuk merencanakan dan kemudian melaksanakan program pembangunan yang mereka pilih sendiri. Kelompok orang miskin ini, juga diberi kesempatan untuk mengelola dana pembangunan baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak luar(Soetrisno, 1995).

Agar para pendamping mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan, maka perlu diketahui berbagai indikator yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika pendampingan sosial diberikan, segenap upaya dapat

dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan (keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan. Beberapa indikator pemberdayaan atau indeks pemberdayaan adalah sebagai berikut:

1. Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.
2. Kemampuan membeli komoditas ‘kecil’: kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak tanah, minyak goreng, bumbu) kebutuhan dirinya (minyak rambut, sabun mandi, rokok, bedak, sampo). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
3. Kemampuan membeli komoditas ‘besar’: kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah, pakaian keluarga. Seperti halnya indikator di atas, poin tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
4. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga: mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami/istri mengenai keputusan-keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk ditanam, memperoleh kredit usaha.
5. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa ijinnya yang melarang mempunyai anak atau melarang bekerja di luar rumah.
6. Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan seorang anggota DPRD setempat, nama Presiden, mengetahui pentingnya memiliki surat nikah, dan hukum-hukum waris.
7. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: seseorang dianggap ‘berdaya’ jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain

melakukan protes, misalnya, terhadap suami yang memukul istri, istri yang mengabaikan suami dan keluarganya gaji yang tidak adil, penyalahgunaan bantuan sosial atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah.

8. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, asset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya.

Keberhasilan pemberdayaan keluarga miskin dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan politis jenis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu: 'kekuasaan di dalam' (*power within*), 'kekuasaan untuk' (*power to*), 'kekuasaan atas' (*power over*), dan 'kekuasaan dengan' (*power with*).

2.5. Pemberdayaan Masyarakat sebagai Proses Belajar Sosial

Korten menawarkan suatu model pembangunan yang di dalamnya ada proses belajar masyarakat, sumber model pembangunan yang mementingkan peranan manusia dan peranan sumber daya lokal yang dalam jangka panjang menurut Korten mampu memperbaiki kualitas kehidupan manusia dan tentu menanggulangi kemiskinan.

.....muncul upaya-upaya dalam proses belajar angka panjang dimana desa-desa dan pelaksanaan program saling berbagi pengetahuan dan sumber daya untuk menciptakan keserasian antara kebutuhan, kegiatan dan kemampuan organisasi pembantu. Setiap pogram memiliki pemimpin yang tinggal bersama masyarakat desa. Ia mencari gagasan baru, mencoba memperbaiki kesalahannya dan membentuk program-program yang sesuai dengan kebutuhan yang telah dipelajarinya (**Korten, dalam Korten & Sjahrir, 1988: 242**)

Dalam proses belajar masyarakat ini, Korten memperkenalkan adanya tiga tahap belajar meliputi: (1) Belajar efektif, (2) Belajar Efisien dan (3) Belajar Mengembangkan diri (Korten, dalam Korten & Sjahrir, 1998: 242-244).

Tahap I : Belajar Efektif. Suatu atau beberapa titik yang bermutu tinggi dikirimkan ke satu atau beberapa desa yang akan menjadi laboratorium belajar mereka atau tempat percontohan. Di sana mereka akan menghayati permasalahan pembangunan dari perspektif si penerima bantuan dan mencoba beberapa pendekatan untuk menghadapi kebutuhan-kebutuhan yang diidentifikasi bersama. Mungkin mereka akan didukung oleh beberapa sumber daya manusia dari luar yang mempunyai keahlian dalam bidang sosial, pengelolaan

maupun teknik. Tentu mereka akan menemui kesalahan, dan itu wajar, juga masukan sumber daya relatif lebih tinggi daripada hasil yang didapat. Upaya penyesuaian harus langsung dilaksanakan, begitu kesalahan dalam asumsi awal ditemukan.

Tahap II: Belajar Efisien. Setelah diketahui apa yang harus dilaksanakan, perhatian kemudian diarahkan kepada belajar bagaimana melaksanakan secara lebih efisien, meninggalkan kegiatan yang relatif tidak produktif dan mengembangkan cara-cara sederhana bagi orang yang bukan ahli untuk memecahkan masalah-masalah operasional. Tempat percontohan atau laboratorium belajar yang baru mungkin akan didirikan untuk menguji ataupun mengesahkan metode-metode itu bersamaan dengan penambahan pengalaman dalam penerapannya.

Tahap III: Belajar Mengembangkan Diri. Setelah pelembagaan dan penyusunan organisasi diselesaikan dalam Tahap 2, perhatian diarahkan kembali kepada cara-cara perluasannya. Ini mencakup pengembangan keahlian, sistem pengelolaan, dan struktur dan nilai-nilai pendukung (Korten, dalam Korten & Sjahrir, 1998: 243-244)

Tiga tahap tersebut menurut Korten merupakan abstraksi dan penyederhanaan dari apa yang pada kenyataannya merupakan proses yang amat tidak teratur dan umumnya bersifat intuitif. Tetapi abstraksi tersebut jelas memberi alternatif bagi pendekatan cetak biru atas penyusunan program pembangunan. Dalam organisasi yang mau belajar, setiap kesalahan dianggap sebagai sumber informasi yang penting. Bahkan dalam batas-batas tertentu, kesalahan dianggap tidak dapat dihindarkan, terutama dalam tahap awal proses belajar. Hal ini tidak dianggap sebagai kegagalan ataupun sebagai faktor luar yang tidak mendukung. Dalam organisasi yang demikian ini kesalahan dibahas dalam suatu semangat belajar, dan dilakukan upaya-upaya penanggulangannya. Mekanisme ini menunjukkan adanya kepemimpinan organisasi yang efektif (Korten, dalam Korten & Sjahrir, 1988: 245).

Ide Korten mengenai perlunya dipilih model pembangunan yang menganggap penting proses belajar masyarakat ini juga mendapat dukungan dari Friedman. Menurutnya, dalam pembangunan, perencanaan tidak sekedar pembuatan rencana, tetapi lebih berarti sebagai “proses belajar bersama”, tidak memberi tekanan pada “dokumen”, tetapi pada “dialog”, dan hasilnya lebih tergantung kepada hubungan timbal balik pribadi-pribadi menurut latar belakang khususnya, dan bukan pada lembaga-lembaga yang abstrak. Oleh Friedman ini disebut sebagai gaya perencanaan “transaktif” dan model yang mendasari adalah proses belajar sosial (*social learning*) (Friedman, 1988: 251).

Pembangunan yang di dalamnya terdapat proses belajar masyarakat ini oleh Korten disebut sebagai pembangunan yang berdimensi kerakyatan. Konsep utama dari pembangunan yang berpusat pada rakyat cukup sederhana konsep ini merupakan suatu pendekatan pembangunan yang memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan materiil dan spirituil mereka sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan (Korten & Carner, dalam Korten & Sjahrir, 1988: 373-387) konsep pembangunan yang berpusat pada rakyat mengandung ide dasar sebagai berikut:

1. Seperti yang dikemukakan oleh Guy Gran, paradigma pembangunan berdimensi kerakyatan memberi peran kepada individu bukan saja sebagai subyek, melainkan juga sebagai aktor yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pembangunan yang berpusat kepada rakyat menghargai dan mempertimbangkan prakarsa dan perbedaan lokal (variasi lokal) karena itu ia mendukung sistem swaorganisasi yang dikembangkan di sekitar satuan-satuan organisasi yang berskala manusia dan komunitas swadaya.
2. Prestasi sistem produksi harus dinilai bukan saja dalam arti nilai produk-produknya, melainkan juga dalam jangkauan masyarakat yang dicakupnya.
3. Mengutamakan bentuk-bentuk organisasi swadaya yang menonjolkan peranan individu dalam proses pengambilan keputusan, dan menyerukan dipakainya nilai-nilai manusiawi dalam pembuatan keputusan. Konsep pembangunan didasarkan pada proses belajar sosial.
4. Pembuatan keputusan harus benar-benar dikembalikan kepada rakyat, dan untuk dinikmati rakyat.
5. Sistem belajar swaorganisasi dari pembangunan yang berpusat pada rakyat melengkapi struktur formal dengan berbagai teknologi organisasi yang kurang formal dan yang lebih cepat dapat menyesuaikan diri.

Sjahrir menegaskan bahwa pembangunan berdimensi kerakyatan idealnya mengandung empat dimensi, meliputi:

1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi di sekitar 3% untuk mengimbangi desakan pertumbuhan penduduk;

2. Ketidakadilan ekonomi sosial dan kemiskinan absolut harus dikurangi secara berarti;
3. Pengertian partisipasi dalam pembangunan bukan hanya partisipasi dalam pelaksanaan program, tetapi juga dalam penyusunan program, pada alokasi sumber-sumber daya yang ada;
4. Pembangunan harus berwawasan lingkungan (Sjahrir, 1988).

Dalam pandangan Korten, keberhasilan suatu program pembangunan, merupakan fungsi dari kesesuaian antara kepentingan mereka yang dibantu, program-program yang dipilih dan organisasi yang membantu.

Program pembangunan akan gagal memajukan kesejahteraan suatu kelompok jika tidak ada hubungan yang erat antara: (1) kebutuhan-kebutuhan pihak penerima bantuan dengan hasil program; (2) persyaratan program dengan kemampuan nyata dari organisasi pembantu; (3) kemampuan pengungkapan kebutuhan pihak penerima dan proses pengambilan keputusan dari organisasi pembantu (**Korten, dalam Korten & Sjahrir, 1988: 240**)

2.6. TKI-Purna dan Remitansi TKI

Pengertian TKI Purna adalah warga Negara Indonesia yang bekerja di Negara asing dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah sesuai ketentuan masing-masing Negara tujuan yang sudah habis atau selesai masa kerjanya atau masa kontraknya. Istilah TKI sering sekali dikonotasikan dengan pekerja kasar. TKI perempuan seringkali disebut TKW. Walaupun sering dikonotasikan sebagai pekerja kasar, tidak bisa dipungkiri bahwa TKI sangat mempunyai andil cukup besar dalam pendapatan Negara, biasa disebut remitansi.

Remitansi adalah dana yang berasal dari transfer (baik dalam bentuk *cash* atau sejenisnya) dari seorang asing kepada sanak keluarga di negara asalnya. *International Monetary Found* (IMF) mendefinisikannya remitansi ke dalam 3 kategori, yaitu: (i) remitansi pekerja atau transfer dalam bentuk *cash* atau sejenisnya dari pekerja asing kepada keluarganya di kampung halaman, (ii) kompensasi terhadap pekerjaan atau pendapatan, gaji atau remunerasi dalam bentuk *cash* atau sejenisnya yang dibayarkan kepada individu yang bekerja di suatu negara lain di mana keberadaan mereka adalah resmi, dan (iii) transfer uang seorang asing yang merujuk kepada transfer kapital dari aset keuangan yang dibuat orang asing tersebut sebagai perpindahan dia dari satu negara ke negara

lainnya dan tinggal lebih dari satu tahun. Karenanya, remitansi (*remittance*) adalah transfer uang oleh pekerja asing ke negara tempat mereka berasal. Remitansi juga diartikan sebagai satu pembayaran untuk pembelian barang-barang atau jasa yang ditransferkan terhadap seseorang pada jarak jauh.

Remitansi merupakan sebagian dari pendapatan pekerja asing internasional yang dikirimkan ke negara tempat pekerja berasal. Oleh *World Bank*, '*remittance*' dikatakan sebagai '*transfer remittance*', berlaku secara domestik maupun internasional. Sedangkan untuk '*domestik remittance*', sebagai contoh, adalah dikenakan pada saat di mana migrasi dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan di dalam satu negara. Namun demikian, remitansi (*remittance*) yang dimaksudkan dalam survei ini adalah dalam hal antar negara (dari luar negeri ke Indonesia).

Konsepsi Remitansi dalam Kajian ini :

<p>Untuk kepentingan kajian ini remitansi didefinisikan sebagai pembayaran atau aliran atau transfer dana lintas batas negara dari orang ke orang, yang dalam prakteknya transfer dana tersebut dilakukan oleh para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri, secara berulang kali, misalnya pengiriman uang setiap bulan kepada keluarga TKI ke daerah tempat TKI tersebut berasal.</p>

Dalam wacana empirik berkembang asumsi bahwa migrasi akan terus berkembang pada tahun-tahun mendatang. Menurut laporan Bank Dunia pada tahun 2010 menunjukkan bahwa jumlah uang yang dikirimkan pekerja asing merupakan aliran dana terbesar ke-2 di dunia. Melebihi jumlah uang bantuan internasional untuk berbagai negara berkembang yang berjumlah US \$250 juta. Selain itu, remitansi tahunan dari para pekerja asing menurut Bank Dunia diperkirakan sebesar US \$ 67 milyar. Menurut PBB, pada tahun 2010 tercatat US \$ 4,939 juta remitansi dari pekerja asing asal Indonesia (TKI) di luar negeri mengalir ke tanah air.

Sekalipun untuk mengukur remitansi tetaplah menjadi sebuah tantangan bagi sistem pembayaran seimbang (*balanced payment system*), namun pada tahun 2006 tercatat sebanyak 59 negara-negara yang sedang berkembang menerima lebih dari US\$ 1 miliar dalam bentuk remitansi. Laporan *Asian Development Bank* mengenai studi remitansi pekerja asing dari Asia Tenggara menyebutkan, bahwa

remitansi dari para pekerja asing di luar negeri telah membantu memperkuat keseimbangan pembayaran negara, sekaligus membantu meningkatkan kualitas hidup anggota keluarga para pekerja yang kebanyakan (sebelumnya) berada pada dan atau di bawah garis kemiskinan.

Kenyataan membuktikan bahwa data mengenai berapa besaran remitansi hanya bertumpu pada laporan dari institusi formal saja, misalnya perbankan; sementara pada kenyataannya saluran-saluran informal menjadi sesuatu yang juga lazim digunakan sebagai media pengiriman remitansi; akibatnya remitansi yang tercatat diperkirakan hanya setengahnya saja. Sebagai contoh, di negara-negara Timur Tengah, sebagian besar dari remitansi ditransferkan melalui jaringan broker informal, sehingga remitansi tersebut tidak tercatat oleh sistem pelaporan resmi (perbankan). Sama halnya dengan di Indonesia; kebanyakan pengiriman remitansi dilakukan dengan menitipkan pada teman sekampung yang kebetulan pulang ke tanah air atau dibawa sendiri ketika pekerja tersebut (TKI) pulang karena *sambang* atau habis masa kontrak kerjanya. Oleh karena itu, remitansi yang dikirim dengan media semacam ini tidak tercatat secara resmi baik oleh lembaga resmi daerah maupun lembaga resmi nasional, dikarenakan saluran-saluran informal tersebut mendominasi pola sistem penyediaan remitansi, yang secara relatif disebabkan oleh karena ketidak-tersediaan bank atau institusi keuangan formal lainnya, selain faktor mahal dan awamnya jasa ini dipergunakan oleh kalangan mereka.

Bank Indonesia melaporkan bahwa penerimaan terbesar dari remitansi TKI adalah sebesar US\$ 1,5 miliar dan surplus transfer berjalan tahun 2011 mencapai US \$ 5,9 miliar. Pada tahun 2009 saja, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengatakan, bahwa devisa yang diperoleh dari TKI sebesar US\$ 3,9 miliar. Jumlah ini lebih besar dari perkiraan Bank Dunia sebesar US\$ 2,5 miliar dan harapan pemerintah sebesar US\$ 2.9 miliar.

Sedangkan M Jumhur Hidayat sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mengatakan, bahwa remitansi pada tahun 2011 menembus angka Rp 100 triliun. Angka ini lebih mendekati apa yang ditanyakan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI mengenai Rp. 81 triliun yang diperoleh dari devisa TKI.

Saat ini berbagai studi mengenai pekerja migran dan remitansi yang dihasilkan semakin menarik dan banyak dilakukan oleh banyak kalangan. Salah satu permasalahannya adalah masih sulitnya memprediksi nilai remitansi secara akurat, serta menghitung dampak positifnya terhadap pembangunan ekonomi dan sosial di daerah/negara asal pekerja.

Dalam beberapa studi ditemukan bahwa remitansi memiliki dampak yang besar terhadap kondisi makro ekonomi, seperti efeknya terhadap pendapatan nasional di negara berkembang hingga mengurangi tingkat kemiskinan dan penganggur. Demikian pula di Indonesia, beberapa studi telah dilakukan berkaitan dengan remitansi dari TKI, diantaranya adalah *The Malaysia-Indonesia Remittance Corridor* oleh *Financial Market Integrity Unit*.

Pendek kata, di Indonesia remitansi TKI layak dipandang sebagai suatu variabel besar dalam perekonomian nasional, regional dan lokal, yang karenanya perlu mendapatkan perhatian, tidak saja oleh keluarga TKI namun juga oleh semua jajaran penentu kebijakan baik pada tingkat lokal, regional, maupun nasional, misalnya pada aspek :

- (1) Besarnya remitansi.
- (2) Penggunaan dana remitansi.
- (3) Dampak remitansi bagi pembangunan sosial ekonomi daerah.
- (4) Dampak remitansi terhadap inflasi.
- (5) Perlu-tidaknya pembinaan terhadap TKI purna, dan sebagainya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Kajian ini secara metodologis dapat dikatakan sebagai “survei-plus”, dalam arti disamping melakukan identifikasi terhadap data primer atas pola penggunaan remitansi TKI-Purna (yang diperoleh melalui metode wawancara terstruktur dengan panduan daftar pertanyaan dan metode observasi), juga akan melakukan identifikasi terhadap sejumlah kebijakan/program/kegiatan Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kabupaten yang menjadi lokasi kajian ini, yakni kebijakan/program/kegiatan yang berkaitan secara langsung dengan pemberdayaan TKI-Purna serta implikasi atau dampak atas keberadaan dana remitansi TKI, baik bagi TKI dan keluarganya maupun terhadap penciptaan lapangan kerja bagi angkatan kerja dari kalangan keluarga miskin. Guna mendukung terselenggaranya kajian ini, sejumlah metode yang diterapkan diuraikan sebagai berikut.

3.1. Teknik Penarikan Sampel

Secara lokasi (daerah), populasi kajian ini adalah seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Adapun sampel dipilih 3 kabupaten, dengan pertimbangan dipilih : (1) Dua daerah merupakan kabupaten yang dalam dua tahun terakhir penempatan TKI-nya relatif besar (lebih dari 14.000 orang); (2) Satu daerah merupakan kabupaten yang dalam dua tahun terakhir penempatan TKI-nya relatif kecil (Kurang dari 7.000 orang); (3) Ketiga daerah tersebut dalam kurun waktu tiga tahun (tahun 2007-2009) diperkirakan memiliki TKI-Purna yang relatif besar, yakni lebih dari 5,000 orang (BP2TKI Provinsi Jawa Timur, 2009). Daftar ranking daerah berdasarkan penempatan TKI pada tahun 2011 dan 2012 sebagai berikut.

Tabel 3.1.
Ranking Penempatan TKI ke Luar Negeri Tahun 2011 dan Tahun 2012

No	Daerah Asal	Tahun		Jumlah
		2011	2012	
1	Malang	8.383	8.610	16.993
2	Blitar	8.247	7.525	15.772
3	Ponorogo	7.422	7.282	14.704
4	Banyuwangi	4.891	5.713	10.604
5	Tulungagung	5.940	3.472	9.412
6	Madiun	4.052	4.271	8.323
7	Kediri	4.009	4.100	8.109
8	Magetan	2.386	2.481	4.867
9	Trenggalek	2.333	2034	4367
10	Jember	1.829	2.230	4.059
11	Bangkalan	1.271	1.848	3.119
12	Ngawi	1.540	1.626	3.166
Jumlah Jawa Timur		52.303	51.192	103.495
Jumlah Nasional		581.081	957.199	1.538.280

Sumber: BNP2TKI, 2013

Berdasarkan pertimbangan tersebut lalu dipilih 3 kabupaten sebagai sampel; kajian ini dengan asumsi : peran dan atau dampak remitansi TKI begitu signifikan jika jumlah TKI-Purnanya juga signifikan. Dengan pertimbangan penarikan sampel yang demikian, maka sampel daerah yang dipilih meliputi :

1. Kabupaten Ponorogo
2. Kabupaten Blitar
3. Kabupaten Jember

Adapun untuk penarikan sampel responden dalam kajian ini menggunakan teknik penarikan sampel secara sengaja dengan pertimbangan tertentu atau *purposive sampling* (Mallo, 1990). Pertimbangan penarikan sampel responden pada kajian ini sebagai berikut: (1) TKI-Purna yang telah mengakhiri masa kontrak sekurang-kurangnya tiga tahun; (2) TKI-Purna yang tergolong relatif sukses, ditandai memiliki kemampuan untuk mendapatkan dan/atau menyimpan dan/atau mengirimkan remitansi kepada keluarganya selama sekurang-kurangnya 36 bulan.

Jumlah responden ditentukan 30 orang untuk setiap kabupaten. Penentuan responden juga memperhatikan variasi jenis kelamin, pekerjaan, serta negara

tujuan. Dengan demikian jumlah sampel responden dari kelompok TKI-Purna adalah 3×30 orang = 90 orang.

Kajian ini juga menempatkan para informan kunci, rereka adalah sejumlah pihak terkait yang memiliki hubungan langsung dengan TKI-Purna, meliputi:

1. Pejabat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten	= 6 orang
2. Pejabat Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur	= 2 orang
3. Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (UPT P3 TKI Provinsi Jawa Timur)	= 2 orang
4. Pengurus Kelompok/Organisasi TKI-Purna	= 3 orang
5. Tokoh Masyarakat	= 3 orang
6. Keluarga TKI-Purna	= 30 orang
7. Kelompok Masyarakat lain	= 9 orang
Jumlah	= 55 orang

Dengan demikian jumlah responden dan informan kunci dalam kajian ini berjumlah 145 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Jumlah Responden dan Informan Kunci

No	Responden / Informan Kunci	Jumlah
1	TKI Purna = (3 x 30 orang)	90 orang
2	Informan Kunci	55 orang
Jumlah		145 orang

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Pelaksanaan pengumpulan data untuk kajian ini dilaksanakan melalui:

1. Wawancara terstruktur (Mallo, 1990) : yakni wawancara berdasarkan daftar pertanyaan yang telah direncanakan terhadap responden TKI-Purna. Penggunaan teknik ini didasarkan pada pertimbangan untuk bisa mendapatkan data yang detail dan yang dapat mengakomodasi variasi jawaban responden dari masing-masing pertanyaan. Metode ini dilaksanakan setelah dilakukan penelitian pendahuluan.
2. Dalam kajian ini juga dilakukan wawancara/diskusi dengan informan kunci, melalui *face to face* maupun *focused group discussion* (FGD). Penggunaan

teknik ini didasarkan pada pertimbangan untuk meningkatkan kedalaman penggalian data, terutama data kualitatif primer dan sekunder (dokumen) sebagai tindak lanjut (penelusuran) dari data primer yang telah diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan responden.

3. Observasi (Goode & Hatt, 1980) : dilakukan terhadap data dan aktivitas yang dapat diamati, baik berupa data/aktivitas umum maupun data/aktivitas khusus yang berkaitan langsung dengan tema kajian ini. Penggunaan teknik ini lebih untuk melakukan verifikasi/triangulasi atas data yang telah diperoleh melalui wawancara terstruktur dan wawancara mendalam. Misalnya : (i) dilakukan verifikasi terhadap kondisi tempat usaha bagi TKI-Purna yang mengaku memiliki usaha ekonomi produktif, (ii) dilakukan wawancara terhadap pegawai/karyawan di tempat usaha TKI-Purna (ini sifatnya tentatif).
4. Studi dokumen (Goode & Hatt, 1980) terhadap data sekunder yang relevan. Pengambilan dokumen, foto, gambar dan data pendukung lain merupakan bagian penting dari metode ini.

3.3. Teknik Analisis Data

Atas dasar pertimbangan jenis pengukuran data yang digunakan dalam kajian ini dan dengan tetap memperhatikan kebutuhan hasil analisis untuk merealisasikan tujuan kajian ini, maka terdapat 2 kategori analisis data yang digunakan dalam kajian ini; meliputi analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif.

3.3.1. Analisis Data Kuantitatif

Terhadap sejumlah data kuantitatif digunakan analisis deskriptif atau sering disebut dengan “analisis kecenderungan pemusatan” untuk variabel yang secara teoritis diasumsikan memerlukan analisis data kuantitatif.

3.3.2. Analisis Data Kualitatif

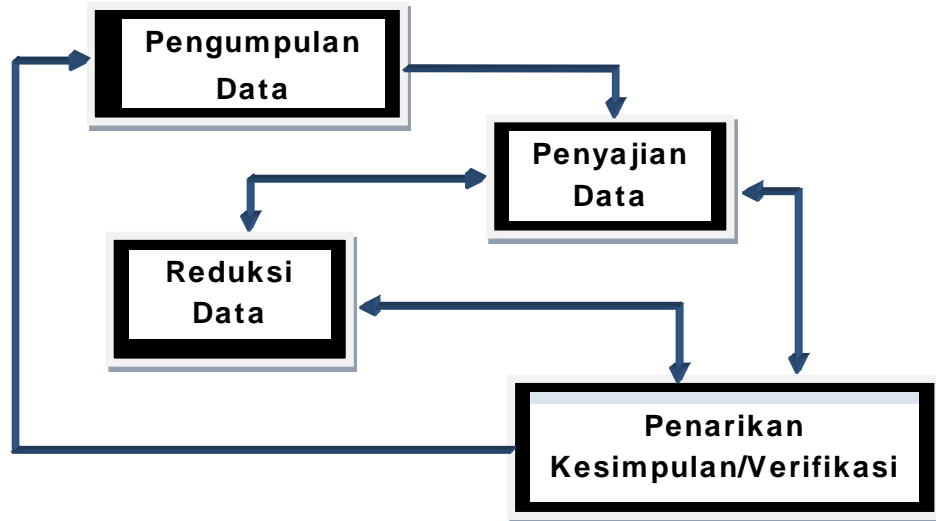
Analisis kualitatif merupakan proses mengorganisir data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dapat dibangun

asumsi sesuai data (Moleong, 1991). Analisis data kualitatif terdiri atas tiga alur kegiatan, meliputi : (1) reduksi data, (2) penyajian data, (3) menarik kesimpulan dan verifikasi (Miles, 1992).

1. Reduksi data; adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dan diperoleh dari lapangan. Reduksi data merupakan bagian dari kegiatan analisis; dan proses reduksi data berlangsung secara terus-menerus sampai proses kajian selesai menyusun laporan. Reduksi data juga merupakan proses menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, serta mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan final yang mencerminkan keadaan dan apa yang terjadi sesungguhnya di lapangan dapat diverifikasi dengan baik.
2. Penyajian data; adalah penyediaan sekumpulan unit-unit informasi dan atau informasi tersusun (berdasarkan apa yang diperoleh selama survei), yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data meliputi : teks naratif, tabel, matriks, grafik, bagan; yang kesemuanya dirancang untuk menyajikan hasil survei kedalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.
3. Menarik kesimpulan dan verifikasi; merupakan bagian terpenting proses analisis; yaitu mencari arti, membuat konfigurasi dan kategori-kategori, mengukur alur sebab akibat, menyusun proposisi-proposisi guna menarik kesimpulan, kemudian diverifikasi, diuji validitasnya melalui sejumlah teknik. Teknik uji validitas yang digunakan dalam kajian ini dalam rangka verifikasi adalah triangulasi.

Tiga hal tersebut (reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi) merupakan satu kesatuan yang jalin-menjalin yang terjadi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data; dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.

Komponen Analisis Data Model Interaktif



Gambar 3.1.

Proses Analisis Data

Sumber : Miles dan Huberman (1992)

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Penduduk dan Ketenagakerjaan

Berdasarkan sensus tahun 2010 penduduk Jawa Timur berjumlah 37.476.757 jiwa terdiri dari sekitar 49,45 % laki-laki dan 50,45 % perempuan, dengan pertumbuhan sekitar 0,66 % per tahun, diproyeksi tahun 2012 penduduk Jawa Timur mencapai 37.899.673 jiwa orang. Memiliki tingkat kepadatan penduduk mencapai 781 jiwa per kilometer persegi (Km²), secara administratif Provinsi Jawa Timur terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) kabupaten dan 9 (sembilan) kota.

Tabel 4.1.
Distribusi, Kepadatan, dan Pertumbuhan Penduduk
Menurut Kabupaten/Kota 2008-2012

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk (jiwa)				Pertum buan (%)	Kepa datan (Jiwa/Km ²)
		2008	2009	2010	2012		
KABUPATEN							
1	Pacitan	553.321	555.262	557.029	558.644	0,32	416
2	Ponorogo	888.857	892.527	895.921	899.074	0,38	655
3	Trenggalek	673.920	674.620	675.380	675.765	0,09	560
4	Tulungagung	981.257	985.147	988.731	992.048	0,37	948
5	Blitar	1.069.569	1.069.798	1.070.122	1.070.446	0,03	674
6	Kediri	1.451.028	1.451.119	1.451.630	1.451.861	0,02	1.047
7	Malang	2.388.755	2.401.624	2.413.779	2.425.311	0,51	814
8	Lumajang	1.017.467	1.021.317	1.024.849	1.028.103	0,35	574
9	Jember	2.304.634	2.313.100	2.320.844	2.327.957	0,34	940
10	Banyuwangi	1.522.534	1.527.384	1.531.753	1.535.701	0,29	266
11	Bondowoso	703.303	705.384	707.242	708.905	0,26	454
12	Situbondo	618.816	621.026	623.042	624.888	0,33	381
13	Probolinggo	1.041.370	1.042.323	1.043.671	1.044.237	0,09	653
14	Pasuruan	1.438.610	1.443.716	1.448.370	1.452.629	0,32	1.263
15	Sidoarjo	1.737.543	1.759.623	1.781.405	1.802.948	1,24	2.842
16	Mojokerto	987.817	996.774	1.005.486	1.013.988	0,88	1.465
17	Jombang	1.253.752	1.269.851	1.285.739	1.301.459	1,25	1.439
18	Nganjuk	994.468	997.458	1.000.132	1.002.530	0,27	819
19	Madiun	642.335	642.398	642.518	642.638	0,02	636
20	Magetan	623.536	624.581	625.424	626.092	0,14	909

Laporan Penelitian

Kajian Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Optimalisasi Peran Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Purna

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk (jiwa)				Pertumbuhan (%)	Kepa datan (Jiwa/Km ²)
		2008	2009	2010	2012		
21	Ngawi	830.281	832.696	834.847	836.767	0,26	645
22	Bojonegoro	1.247.919	1.255.914	1.263.551	1.270.876	0,61	551
23	Tuban	1.073.071	1.076.027	1.078.641	1.080.956	0,24	587
24	Lamongan	1.188.136	1.188.559	1.189.087	1.189.615	0,04	712
25	Gresik	1.153.292	1.174.063	1.194.821	1.215.603	1,77	1.020
26	Bangkalan	923.657	940.331	956.996	973.681	1,77	773
27	Sampang	868.370	885.379	902.429	919.548	1,93	46
28	Pamekasan	802.172	818.604	835.101	851.690	2,02	1.075
29	Sumenep	1.016.418	1.016.471	1.016.907	1.017.147	0,02	509
KOTA							
30	Kediri	265.721	268.081	270.374	272.610	0,86	4.300
31	Blitar	129.932	131.121	132.278	133.408	0,88	4.096
32	Malang	807.543	812.209	816.637	820.857	0,55	7.458
33	Probolinggo	218.995	222.822	226.643	230.464	1,72	4.067
34	Pasuruan	173.872	173.940	174.073	174.173	0,06	4.936
35	Mojokerto	112.959	113.075	113.201	113.327	0,11	6.885
36	Madiun	175.955	177.148	178.291	179.391	0,65	5.398
37	Surabaya	2.625.298	2.628.113	2.630.079	2.631.305	0,08	8.063
38	Batu	184.117	185.986	187.813	189.604	0,98	2.043
	JUMLAH	36.690.600	36.895.571	37.094.836	37.286.246	0,54	803
Perkembangan (jiwa)			204.971	199.265	191.410		
Pertumbuhan (%)			0,56	0,54	0,51		

Sumber: Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2013

Permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dalam kependudukan antara lain adalah masalah pengangguran. Dari sisi ketenagakerjaan, tinggi rendahnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), di mana penduduk di golongan ke dalam 2 (dua) golongan Penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) terdiri dari dua kelompok angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, sedang angkatan kerja dibagi ke dalam 2 (dua) golongan yaitu Bekerja dan Pengangguran.

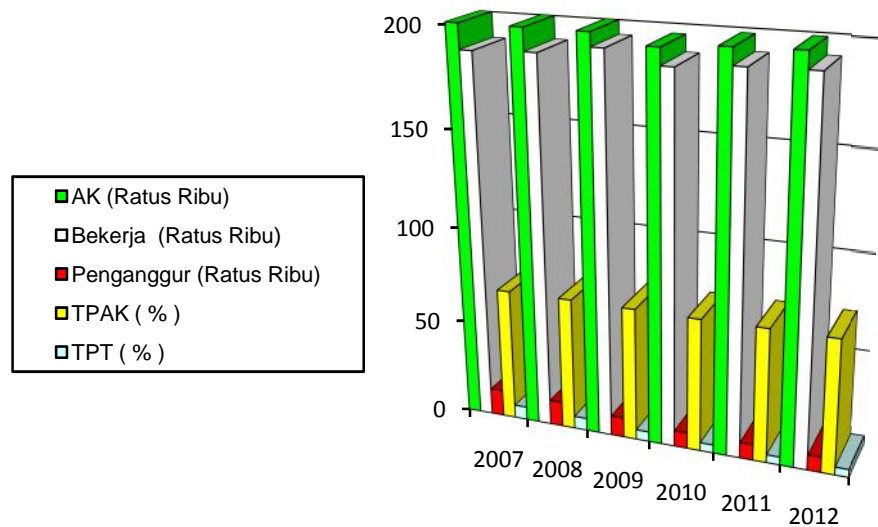
Tabel 4.2.
Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur,
Bulan Agustus 2007 - Februari 2012

Kegiatan Utama	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1. Angkatan Kerja (jutaan)	20,12	20,18	20,34	19,53	19,76	19,83
2. Bekerja (jutaan)	18,75	18,88	19,31	18,70	18,94	19,01
3. Penganggur (jutaan)	1,37	1,30	1,03	0,83	0,82	0,82
4. TPAK (%)	68,99	69,32	69,25	69,08	69,49	69,55
5. TPT (%)	6,79	6,42	5,08	4,25	4,16	4,14

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2013

Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2012 memberi gambaran kinerja yang dicapai Provinsi Jawa Timur, karena rata-rata TPT per tahun cenderung turun dengan lapangan kerja meningkat. Turunnya TPT merupakan indikator penting, bagaimana kinerja program prioritas bidang ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur, telah berjalan dengan baik. Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2012 menunjukkan, jumlah angkatan kerja Jawa Timur mencapai 19,83 juta orang, naik sekitar 0,07 juta orang dibanding tahun 2011 sebesar 19,76 juta orang.

Jumlah penduduk bekerja periode yang sama mencapai 19,01 juta orang, naik 0,07 juta orang dibanding tahun 2011 sebesar 18,94 juta orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur pada periode yang sama tahun 2012 mencapai 4,14 %, turun 0,02 % dibanding TPT tahun 2011 sebesar 4,16 %. Turunnya TPT diikuti Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada periode sama yang mencapai 69,66 %, naik sekitar 1,32 % dibanding tahun 2011. Di sisi lain, peningkatan jumlah penduduk pada kelompok kegiatan sekolah memberi bukti adanya upaya penyiapan kualitas SDM Jawa Timur yang makin berkualitas di masa mendatang. Sedang besarnya penduduk kelompok usia kerja pada kegiatan mengurus rumah tangga, diduga karena sebagian dari mereka kesulitan masuk pasar kerja yang memerlukan kompetensi khusus, seperti ketrampilan komputer dan teknologi informasi.



Gambar 4.1.
Penduduk dan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur
Periode Tahun 2007 – 2012

Kondisi ini perlu mendapat perhatian berbagai pihak dalam rangka membuka kesempatan kerja di masa mendatang, agar mereka siap masuk pasar kerja. Karena pembangunan merupakan proses transformasi masyarakat ke arah pemberdayaan sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup sejalan dengan perubahan ekonomi dan sosial akibat proses pembangunan itu sendiri.

Tabel 4.3.
Jumlah Penduduk Usia Kerja Termasuk Bukan Angkatan Kerja
Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 - 2011

Bukan Angkatan Kerja	2010	2011	Perubahan
1. Sekolah	1.885.898	1.944.007	+ 0,77 %
2. Mengurus Rumah tangga	5.437.150	5.381.202	- 0,26 %
3. Lainnya	1.418.726	1.353.058	- 1,16 %
Jumlah	8.741.774	8.678.257	- 0,18 %

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, diolah

Salah satu prioritas yang selalu dicanangkan di dalam setiap kegiatan pembangunan untuk menjawab tantangan transformasi serta pemberdayaan, antara lain adalah masalah bagaimana kemiskinan dapat diturunkan. Secara integral kemiskinan adalah bagian penting dari setiap program pembangunan yang hendak dijalankan di Provinsi Jawa Timur. Data kemiskinan Provinsi Jawa Timur menunjukkan, kecenderungan turun konsisten. Sampai dengan Maret 2012 jumlah

penduduk miskin mencapai 5,070 juta atau 13,40 % dari jumlah penduduk, turun 6,95 % per tahun selama lima tahun terakhir, di mana pada tahun 2008 jumlahnya mencapai 7,019 juta orang atau sekitar 18,51 % dari total penduduk di Jawa Timur.

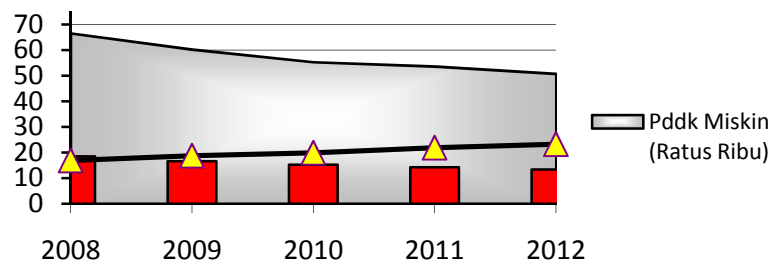
Tabel 4.4.
Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan
Provinsi Jawa Timur Tahun 2008- 2012

Kondisi Penduduk	2008 *	2012*	Perubahan
1. Penduduk Miskin (Orang)	7.019.950	5.070.980	- 6,95 %
2. Garis Kemiskinan (Rp)	169.112	233.202	+ 9,48 %
3. % Penduduk Miskin	18,51	13,40	- 6,91 %
4. % Kedalaman (P1)	3,38	1,81	- 11,62 %
5. % Kedalaman (P2)	0,93	0,38	- 14,79 %

Sumber : BPS, Tahun 2012, Diolah

*) Posisi Maret, perubahan (%) rata-rata per tahun

Dibanding target kemiskinan sebesar 15,0 % - 15,5 %, jumlah penduduk miskin Jawa Timur tahun 2012 di bawah target, hanya mencapai 89,34 %.



Gambar 4.2.
Prosentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan
Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 - 2012

Permasalahan pengangguran di Jawa Timur sampai dengan tahun 2011 masih menjadi isu strategis di bidang ketenagakerjaan. Kondisi tersebut ditandai oleh kondisi tidak seimbangnya *supply* dan *demand* tenaga kerja akibat penambahan angkatan kerja dan masih rendahnya daya saing kualitas SDM terutama untuk mengisi lowongan kerja di sektor formal. Faktor kondisi eksternal seperti situasi ekonomi dunia dan faktor perubahan sosial budaya juga memberi kontribusi jumlah pengangguran di Jawa Timur, diantaranya masih sedikit

angkatan kerja yang berorientasi untuk berwirausaha. Di sisi lain dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) prioritas ke-3 Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2014 terdapat target program **Perluasan Lapangan Kerja**, yang diarahkan untuk mendorong terciptanya perluasan lapangan kerja di sektor informal maupun formal, meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dan menciptakan fleksibilitas pasar kerja dalam kondisi hubungan industrial yang kondusif (Sugiri, H, 2012 dalam <http://www.infokerjajatim.com/index.php/detail/berita/358>).

Secara keseluruhan berdasarkan data umum ketenagakerjaan yang dilansir Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur per Pebruari 2012, Jawa Timur cukup berhasil menurunkan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Jika dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka Pebruari 2009 sebanyak 5.87%, tahun 2010 sebanyak 4.19%, dan di tahun 2011 sebanyak 4.18% maka data per Pebruari 2012, Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Timur sebesar 4.14% atau turun 0.04%. Jika dibandingkan dengan target TPT dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) realisasi capaian TPT Jawa Timur lebih rendah dari pada target Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2009-2011 yang berkisar antara 6.4% - 5.80%.

Secara makro, berdasarkan distribusi sektoral Data BPS, penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur yang berdampak pada penurunan TPT, masih didominasi sektor pertanian. Dan di pedesaan, sektor pertanian menyerap 59% tenaga kerja, sedang di perkotaan, sektor yang dominan menyerap tenaga kerja adalah perdagangan, jasa dan sektor industri. BPS juga mencatat terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor formal terutama pada sektor Industri, Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi dan Sektor Lainnya yang terdiri dari Sektor Pertambangan, Listrik, Gas dan Air, Konstruksi, Keuangan.

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Provinsi Jawa Timur dalam evaluasi tahunan mencatat bahwa penurunan pengangguran di Jawa Timur merupakan hasil dari berbagai program dan kebijakan seperti penempatan melalui mekanisme AKAD (Antar Kerja Antar Daerah), AKL (Antar Kerja Lokal), AKAN (Antar Kerja Antar Negara), pengiriman transmigrasi dan tenaga kerja kontrak. Program peningkatan

kompetensi kerja, kegiatan harmonisasi pengusaha-pekerja dan perbaikan sistem pengupahan (UMK) dan syarat kerja serta penegakkan aturan (*law enforcement*) norma-norma kerja menjadi fokus program penunjang upaya pengurangan pengangguran di Jatim. Tercatat di tahun 2011, penempatan tenaga kerja dari sektor ketenagakerjaan sebanyak 327.489 orang (183.95%) dari target sebanyak 188.000 orang.

Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur diakhir tahun 2011 merilis data bahwa kondisi hubungan industrial selama periode 2009-2011 cukup kondusif. Hal tersebut ditunjukkan dengan semakin menurunnya jumlah kasus perselisihan dan mogok/ unjuk rasa pekerja di Jawa Timur. Selama tahun 2011, jumlah perselisihan hak, kepentingan, PHK dan antar Serikat Pekerja turun sebanyak 210 kasus (35.47%) dan kasus mogok kerja/ unjuk rasa turun 25 kejadian (44.64%). Secara umum, indikator yang menunjukkan suatu daerah dalam kondisi hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan bermartabat di tunjukkan dengan terpenuhi hak dan kewajiban semua pihak. Selain itu, kondisi hubungan industrial yang harmonis dicapai dengan meningkatnya kesejahteraan pekerja, produktivitas, dan perselisihan dapat diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat. Tentunya untuk mencapai indikator kondisi diatas, perlu sarana pendukung berupa adanya organisasi serikat pekerja dan pengusaha, adanya peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, lembaga bipartite, aturan perundang-undangan serta tunjangan kesejahteraan bagi pekerja. Dengan terciptanya hubungan industrial yang kondusif, maka dampaknya akan menjaga kelangsungan iklim usaha, perluasan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Dalam skenario target Tingkat Penganggur Terbuka (TPT) di Tahun 2012 dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata $\pm 7\%$ maka beban pengurangan pengangguran di Jawa Timur disumbang dari sisa pengangguran tahun lalu sebanyak 821.546 orang dengan komposisi pendidikan SD 22.87% dan SLTP 26.20% dan SLTA 24.29%. Ditambah sumbangan lulusan baru dari dunia pendidikan sebanyak ± 400.000 orang, total penambahan angkatan kerja baru di Jawa Timur diperkirakan setidaknya sebanyak 1.221.546 orang. Maka untuk target TPT sebesar 3.5%, Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus bisa menciptakan

lapangan kerja baru setidaknya sebanyak 1.5 juta orang atau setiap 1% pertumbuhan dapat menyerap 200 ribu orang.

Secara statistik, capaian kinerja sektor ketenagakerjaan di Jawa Timur sampai dengan tahun 2012 yang diukur dari penurunan prosentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berhasil diturunkan. Namun demikian jika dilihat dari potensi penambahan penganggur baru dari sumbangan angkatan kerja baru baik dari lulusan dunia pendidikan, dampak dari kondisi ekonomi (ekspor dan impor) dan hubungan industrial serta kualitas angkatan kerja yang 54.79% berpendidikan SD ke bawah, maka upaya penurunan pengangguran di Jawa Timur masih menjadi tugas yang tidak ringan. Setidaknya, sampai dengan akhir tahun 2012 telah dibangun 9 BLK bertaraf internasional dari 16 BLK yang ada di Jawa Timur. Standar yang dikembangkan setidaknya mengarah pada penerapan manajemen mutu ISO, menggunakan dwi bahasa, memiliki workshop/bengkel/laboratorium standar internasional, menyelenggarakan *training factory* atau *production unit* standar internasional, memiliki sertifikat kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dengan score TOEIC/TOFEL ≥ 450 , memiliki partner kerja dengan intitusi internasional dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Internasional.

4.1.1. Penduduk dan Ketenagakerjaan Kabupaten Ponorogo

Menurut Sensus Penduduk tahun 2010 dan Susenas jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo tahun 2011 sebesar 860.093 jiwa. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2010 sebesar 855.281 jiwa, penduduk Kabupaten Ponorogo pada akhir tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 0,56 %. Secara keseluruhan penduduk laki-laki sedikit lebih banyak bila dibanding penduduk perempuan. Sex Ratio atau perbandingan jumlah penduduk per 100 penduduk perempuan akhir tahun 2011 menunjukkan kenaikan meskipun sedikit, yaitu dari 100 % pada akhir tahun 2007 menjadi 100,13%, yang berarti di Kabupaten Ponorogo penduduk laki-lakinya lebih banyak dibanding penduduk perempuan dimana setiap 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki (Kabupaten Ponorogo Dalam Angka Tahun 2012 –BPS Provinsi Jawa Timur-).

Diantara 21 kecamatan yang ada, Kecamatan Ponorogo mempunyai penduduk yang paling banyak sebesar 74.795 jiwa atau 8,69 % dari total penduduk di Kabupaten Ponorogo, disusul kemudian dengan Kecamatan Babadan sebesar 62.968 jiwa atau 7,32 % dan Kecamatan Ngrayun sebesar 55.729 jiwa atau sebesar 6,47 %. Secara keseluruhan jumlah penduduk menurut jenis kelamin per Kecamatan di Kabupaten Ponorogo tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4.5.
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Sex Ratio dan Kecamatan
di Kabupaten Ponorogo Tahun 2011

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio (%)
1	Ngrayun	27.880	27.849	55.729	100,11
2	Slahung	24.359	25.184	49.543	96,72
3	Bungkal	16.958	17.477	34.435	97,03
4	Sambit	17.751	18.016	35.767	98,53
5	Sawoo	27.035	27.969	55.004	96,66
6	Sooko	20.854	11.035	21.889	98,36
7	Pudak	4.432	4.511	8.943	98,25
8	Pulung	23.147	23.106	46.253	100,18
9	Mlarak	20.398	15.949	36.347	127,90
10	Siman	21.331	20.559	41.890	103,76
11	Jetis	14.238	14.974	29.212	95,08
12	Balong	20.454	21.343	41.797	95,83
13	Kauman	19.945	20.294	40.239	98,28
14	Jambon	19.289	19.859	39.148	97,13
15	Badegan	14.569	14.667	29.236	99,33
16	Sampung	17.846	18.202	36.048	98,04
17	Sukorejo	25.288	24.558	49.846	102,97
18	Ponorogo	37.103	37.692	74.795	98,44
19	Babadan	31.624	31.344	62.968	100,89
20	Jenangan	26.061	25.737	51.798	101,26
21	Ngebel	9.764	9.442	19.206	103,41
Jumlah		430.326	429.767	860.093	100,13

Sumber: Kabupaten Ponorogo Dalam Angka 2012, BPS Provinsi Jawa Timur 2013

Sedangkan jumlah pencari kerja di Kabupaten Ponorogo yang terdaftar di Disnakertrans Pada Tahun 2011 tertinggi adalah tingkat pendidikan SMTA sebesar 1.873 orang, dengan rincian 1.422 orang lulusan SMTA umum dan 451 orang lulusan SMTA Kejuruan. Sedangkan pencari kerja terendah lulusan SD. Menurut gender jika dibandingkan pencari kerja perempuan lebih tinggi daripada

laki-laki. Jika diprosentasekan penduduk perempuan 2.250 atau 55,83% dan laki-laki sebesar 1780 atau 44,17%

Tabel 4.6.
Jumlah Pencari Kerja Yang Terdaftar Menurut Pendidikan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2011

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Sekolah Dasar	44	67	111
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	451	1.422	1.873
	2.1. Sekolah Menengah Tingkat Pertama Umum	451	1.422	1.873
	2.2. Sekolah Menengah Tingkat Pertama Kejuruan	-	-	-
	2.3. Kursus-kursus Setingkat SMTP	-	-	-
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	1.095	540	1.635
	3.1. Sekolah Menengah Tingkat Atas Umum	540	396	936
	3.2. Sekolah Menengah Tingkat Atas Kejuruan	555	144	699
	2.3. Kursus-kursus Setingkat SMTA	-	-	-
4	Sarjana Muda Dan Yang Sederajat/D I – D III	56	106	162
5	Sarjana	134	115	249
Jumlah		1.780	2.250	4.030

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Ponorogo, 2013

Sementara penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja pada tahun 2011 menurut lapangan usaha, terbesar pada lapangan pekerjaan utama Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan sebesar 230.896 orang atau 50,60% dan terkecil pada lapangan pekerjaan utama keuangan dan jasa-jasa sebesar 4.650 orang atau 1,02%. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Ponorogo sebagian besar penduduk menggantungkan penghidupannya pada pekerjaan sebagai petani.

Tabel 4.7.
Penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Ponorogo Tahun 2011

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	143.326	87.570	230.896
2	Industri Pengolahan	27.999	15.331	43.330
3	Bangunan	31.091	1.102	32.193
4	Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	26.999	45.299	72.298
5	Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	6.063	-	6.063
6	Keuangan dan Jasa-jasa	3.415	1.235	4.650
7	Pertambangan dan Pengalihan: Listrik, Gas dan Air	34.656	27.364	62.020
Jumlah		273.549	177.901	456.450

Sumber: Kabupaten Ponorogo Dalam Angka 2012, BPS Provinsi Jawa Timur, 2013

Penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Ponorogo terbesar adalah tamat SD sebanyak 133.006 orang atau 29,46%, diikuti Belum Tamat SD sebesar 20,59 % dan tamat SLTP sebanyak 18,87%. Dengan melihat data tersebut dapat diinterpretasikan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Ponorogo masih kurang.

Tabel 4.8.
Penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2011

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tidak/Belum Pernah Sekolah	19.413	17.602	37.015
2	Tidak/Belum Tamat SD	45.398	47.544	92.942
3	Sekolah Dasar	85.904	47.102	133.006
4	SLTP	53.685	31.515	85.200
5	SMU	29.566	12.183	41.749
6	SMK	23.316	6.381	29.697
7	Diploma I/II	1.663	866	2.529
8	Akademi/Diploma III	1.933	1.976	3.909
9	Universitas	12.671	12.732	25.403
Jumlah		273.549	177.901	451.450

Sumber: Kabupaten Ponorogo Dalam Angka 2012, BPS Provinsi Jawa Timur, 2013

Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2011 di Kabupaten Ponorogo sebesar 4,37%. Jika dibandingkan pada tahun yang sama angka TPT di Kabupaten Ponorogo lebih tinggi jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Jawa Timur sebesar 4,14%. Jumlah angkatan kerja yang bekerja sebesar 451.050 orang atau 95,63%.

Tabel 4.9.
Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2011

Kegiatan		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Angkatan Kerja		283.517	188.550	472.067
1	Bekerja	273.549	177.901	451.450
2	Mencari Pekerjaan	5.045	5.666	10.711
3	Mempersiapkan Usaha	-	556	556
4	Merasa Tidak Mungkin Mendapat Pekerjaan	4.747	4.427	9.174
5	Sudah Punya Pekerjaan Tetapi Blm Mulai Bekerja	176	-	176
Bukan Angkatan Kerja		49.506	152.320	201.826
1	Sekolah	20.958	17.640	38.598
2	Mengurus Rumah Tangga	6.605	116.641	123.246
3	Lainnya	21.943	18.039	39.982
Jumlah		233.023	340.870	673.893
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)				70,05%
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)				95,63%
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)				4,37%

Sumber: Kabupaten Ponorogo Dalam Angka 2012, BPS Provinsi Jawa Timur, 2013

Sementara jumlah TKI/TKW yang diberangkatkan ke luar negeri pada tahun 2011 mencapai 3.233 orang yang terdiri dari 392 atau 12,12% tenaga kerja laki-laki dan 2.841 atau 87,88% tenaga kerja perempuan. Negara tujuan TKI/TKW terbesar adalah Taiwan dan Hongkong. Dari 21 Kecamatan yang ada di Ponorogo pemberangkatan TKI/TKW paling banyak berasal dari Kecamatan Sukorejo sebesar 11,07%, diikuti Kecamatan Jenangan sebesar 9,89% dan Kecamatan Babadan sebesar 9,89%. Berikut disajikan secara lengkap banyaknya TKI/TKW yang diberangkatkan dan negara tujuan TKI/TKW.

Tabel 4.10.
Banyaknya TKI/TKW yang Berangkat ke Luar Negeri Tahun 2011-2013
(Per Mei 2013)

Kecamatan	2011			2012			2013			
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	Ngrayun	12	46	58	20	62	82	4	29	33
2	Slahung	33	155	188	68	185	253	16	85	101
3	Bungkal	25	156	181	65	185	250	17	88	105
4	Sambit	12	81	93	25	135	160	8	56	64
5	Sawoo	27	109	136	47	110	157	8	51	59
6	Sooko	3	45	48	8	41	49	5	18	23
7	Pudak	6	40	46	12	31	43	0	11	11
8	Pulung	11	115	126	36	163	199	13	54	67
9	Mlarak	4	64	68	16	104	120	3	34	37
10	Siman	12	127	139	30	181	211	6	72	78
11	Jetis	9	79	88	28	120	148	8	42	50
12	Balong	34	188	222	58	250	308	17	85	102
13	Kauman	19	174	193	45	233	278	17	85	102
14	Jambon	32	191	223	45	247	292	26	94	120
15	Badegan	13	52	65	13	92	105	3	30	33
16	Sampung	7	101	108	27	180	207	11	69	80
17	Sukorejo	24	324	358	82	416	498	24	194	218
18	Ponorogo	15	167	182	39	194	233	8	68	76
19	Babadan	36	284	320	70	453	424	26	189	215
20	Jenangan	42	280	332	57	304	361	29	102	131
21	Ngebel	6	63	69	14	69	83	4	38	42
Jumlah		392	2.841	3.233	805	3.656	4.461	253	1.494	1.747

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ponorogo 2013

Tabel 4.11.
Negara Tujuan TKI/TK Tahun 2011-2011 (Per Mei 2013)

Kecamatan	2011			2012			2013		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1 Malaysia	141	25	166	295	96	391	39	4	43
2 Singapura	0	324	324	0	269	269	0	101	101
3 Brunai	0	2	2	14	0	14	2	3	5
4 Korea Selatan	13	4	17	90	12	102	2	0	2
5 Taiwan	238	1294	1532	406	1894	2300	190	748	938
6 Arab Saudi	0	54	54	0	0	0	0	3	3
7 Amerika	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Hongkong	0	1136	1136	0	1377	1377	0	627	627
9 Abu Dhabi	0	1	1	0	9	9	0	8	8
10 Macao	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Jumlah	392	2.841	3.233	805	3.657	4.462	233	1.494	1.727

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ponorogo Tahun 2013

Sedangkan jumlah kemiskinan di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2011 sebesar 1.059.000 atau 12,29% dari keseluruhan jumlah penduduk. Sedangkan tahun 2010 penduduk miskin di Kabupaten Ponorogo sebesar 1.130.000 atau 13,22 %. Angka ini jika dibandingkan pada tahun 2010 ada penurunan sebesar 0,93%.

Tabel 4.12.
Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin, P1, P2 dan Garis Kemiskinan Kabupaten Ponorogo Tahun 2010-2011

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Prosentase Penduduk	Garis Kemiskinan (Rp/bulan)	P1	P2
2010	1.130.000	13,22%	Rp. 193.047	1,94	0,43
2011	1.059.000	12,29%	Rp. 210,411	1,52	0,29

Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan 2010 dan 2011, BPS Provinsi Jawa Timur, 2013

Pekerja kasar (*blue collar*) yang merepresentasikan pekerja sektorinformal yang memiliki ciri-ciri: mudah masuk, artinya setiap orang dapat kapan saja masuk ke jenis usaha informal ini, bersandar padasumber daya lokal, biasanya usaha milik keluarga, operasi skala kecil, padat karya, keterampilan diperoleh dari luar sistem formal sekolah dan tidak diatur dan pasar yang kompetitif. Kegiatan sektor informal antara lain pedagang kaki lima (PKL), becak, penata parkir, pengamen dan anak jalanan, pedagang pasar, buruh tani dan

lainnya. Kemajuan perekonomian sebuah negara dapat pula ditandai dengan adanya transformasi ke arah penurunan pekerja *blue collar* dapat dimaknai sebagai pekerja pada pekerjaan yang mengandalkan kekuatan fisik, pada kelompok lapangan usaha di Indonesia biasanya dimasukkan ke dalam jenis pekerjaan di sektor usaha pertanian, kehutanan, perburuan, perikanan, tenaga produksi, alat angkut dan pekerja kasar.

Di sisi lain, pekerja manajerial (*white collar*) yang merepresentasikan pekerja sektor formal terdiri dari tenaga profesional, teknisi dan sejenisnya, tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan, tenaga tata usaha dan sejenisnya, tenaga usaha penjualan, tenaga usahajasa.

Dari 12,29 penduduk miskin pada tahun 2011 sebagian besar bekerja di sektor informal sebesar 64,12%, sektor formal sebesar 5,73% dan tidak bekerja sebesar 30,15%. Jika jumlah penduduk miskin yang tidak bekerja pada tahun 2011 dibandingkan pada tahun 2010 menunjukkan peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 29,01%.

Tabel 4.13.
Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas dan Status Bekerja Kabupaten Ponorogo Tahun 2010-2011

Tahun	Tidak Bekerja *)	Bekerja di Sektor Informal	Bekerja di Sektor Formal
2010	1,06%	89,58%	9,36%
2011	30,15%	64,12%	5,73%

Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan 2010 dan 2011, BPS Provinsi Jawa Timur, 2013

4.1.2. Penduduk dan Ketenagakerjaan Kabupaten Blitar

Penduduk Kabupaten Blitar pada tahun 2011 menurut hasil Sensus Penduduk mencapai 1.116.639 jiwa, terdiri dari 559.475 jiwa penduduk laki-laki dan 557.164 jiwa penduduk perempuan, dengan sex ratio sebesar 100persen yang berarti dalam 100 jiwa penduduk perempuan ada sebanyak 100 jiwa penduduk laki-laki. Komposisi penyebaran penduduk di masing-masing wilayah Kecamatan di seluruh Kabupaten Blitar menunjukkan bahwa Kecamatan Ponggok berpenduduk paling banyak diantara 22 kecamatan yang ada, yaitu sebanyak 97.328 jiwa, sedangkan paling sedikit yaitu Kecamatan Wates sebanyak 27.688 jiwa.

Tabel 4.14.
Penduduk Kabupaten Blitar dan Sex Rasio Menurut Jenis Kelamin
Hasil Sensus Penduduk Tahun 2011

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex Rasio(%)
1	Bakung	12.248	12.763	25.011	98
2	Wonotirto	17.715	17.538	35.253	101
3	Panggungrejo	20.237	20.314	40.551	100
4	Wates	13.864	13.824	27.688	100
5	Binangun	21.378	21.339	42.717	100
6	Sutojayan	23.150	23.687	46.837	98
7	Kademangan	31.751	31.768	63.519	100
8	Kanigoro	36.768	36.151	72.919	102
9	Talun	29.474	29.693	59.167	99
10	Selopuro	19.967	19.352	39.319	103
11	Kesamben	23.902	24.516	48.418	97
12	Selorejo	17.190	17.594	34.784	98
13	Doko	18.809	18.839	37.648	100
14	Wlingi	25.036	24.866	49.902	101
15	Gandusari	33.469	32.868	66.337	102
16	Garum	31.290	30.735	62.025	102
17	Nglegok	33.940	33.539	67.479	101
18	Sanankulon	26.536	26.504	53.040	100
19	Ponggok	49.012	47.771	96.783	103
20	Srengat	30.937	31.134	62.071	99
21	Wonodadi	22.887	22.943	45.830	100
22	Udanawu	19.915	19.426	39.341	103
Jumlah		559.475	557.164	1.116.639	100

Sumber: Kabupaten Blitar Dalam Angka 2012, BPS Provinsi Jawa Timur, 2013

Sementara jumlah pencari kerja di Kabupaten Blitar yang terdaftar di Disnakertrans pada Tahun 2011 sebanyak 6.056 jiwa. Dari data yang ada jumlah pencari kerja yang terdaftar tertinggi adalah tingkat pendidikan SMTA sebesar 1.643 jiwa, sedangkan pencari kerja terendah lulusan D1/D2 sebesar 49 jiwa. Menurut gender jika dibandingkan pencari kerja perempuan jauh lebih tinggidaripada laki-laki. Jika diprosentasekan perempuan 4.551 atau 74,65% dan laki-laki sebesar 1780 atau 25,35%.

Tabel 4.15.
Pencari Kerja Yang Terdaftar, Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Blitar Tahun 2011

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	SD	54	280	334
2	SMTP	390	3.247	3.637
3	SMTA	927	716	1.643
4	D1/D2	28	21	49
5	D3/S1	146	247	393
Jumlah		1.545	4.511	6.056

Sumber: Kabupaten Blitar Dalam Angka 2012, BPS Provinsi Jawa Timur, 2013

Selanjutnya jumlah pencari kerja yang terdaftar pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Blitar pada tahun 2011 mencapai 20.349 orang pencari kerja 11 ribu lebih diantaranya perempuan, sementara jumlah lowongan kerja yang tersedia hanya hanya 4.676 orang. Dari sejumlah pencari kerja tersebut yang sudah mendapatkan penempatan sebanyak 4.511 orang, dan dari sejumlah lowongan kerja yang ada 93 diantaranya telah dihapus, sehingga sisa lowongan kerja sampai akhir 2011 sebanyak 72.

Tabel 4.16.
Pencari Kerja dan Lowongan Kerja, Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Blitar Tahun 2011 (Orang)

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pencari Kerja	1.545	11.092	20.349
2	Penempatan	456	4.055	4.511
3	Penghapusan Pencari Kerja	876	938	1.814
4	Belum Ditempatkan	7.925	6.099	14.024
5	Permintaan, Lowongan	524	4.152	4.676
6	Dipenuhi	456	4.055	4.511
7	Penghapusan Lowongan	45	48	93
8	Sisa Lowongan	23	49	72

Sumber: Kabupaten Blitar Dalam Angka 2012, BPS Provinsi Jawa Timur, 2013

Sedangkankemiskinan di Kabupaten Blitar pada tahun 2011 sebesar 1.269.000 atau 11,29%. Jika dikurskan penduduk miskin di Kabupaten Blitar setara dengan Rp. 210.254/bulan. Angka ini jika dibandingkan dengan jumlah kemiskinan tahun 2010 sebesar 12,13%, maka pada tahun 2011 ada penurunan sebesar 0,84%.

Tabel 4.17.
Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan
Kabupaten Blitar Tahun 2010-2011

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Prosentase Penduduk	Garis Kemiskinan (Rp/bulan)	P1	P2
2010	1.355.000	12,13%	Rp. 192.514	2,35	0,74
2011	1.269.000	11,29%	Rp. 210.254	1,63	0,35

Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan 2010 dan 2011, BPS Jatim, 2013

Dari 12,13% penduduk miskin pada tahun 2011 bekerja di sektor informal sebesar 49,93%, di sektor formal 16,25% dan tidak bekerja sebesar 33,82%. Jika jumlah penduduk miskin yang tidak bekerja pada tahun 2011 dibandingkan pada tahun 2010 seperti halnya Kabupaten Ponorogo menunjukkan peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 31,58%. Hal ini tentunya akan menimbulkan masalah baru dan menjadi pekerjaan rumah yang perlu dicari solusinya oleh pemerintah Kabupaten Blitar.

Tabel 4.18.
Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas
dan Status Bekerja Kabupaten Blitar Tahun 2010-2011

Tahun	Tidak Bekerja *)	Bekerja di Sektor Informal	Bekerja di Sektor Formal
2010	2,24%	78,39%	19,37%
2011	33,82%	49,93%	16,25%

Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan 2010 dan 2011, BPS Provinsi Jawa Timur, 2013

4.1.3. Penduduk dan Ketenagakerjaan Kabupaten Jember

Jumlah penduduk Kabupaten Jember menurut sensus tahun 2010 sebesar 2.332.729 jiwa. Sedangkan jika dilihat dari penyebarannya, dari 31 kecamatan yang ada yang memiliki penduduk paling banyak adalah Kecamatan Sumbersari sebesar 126.279 jiwa dan paling sedikit adalah Kecamatan Sukorambi sebesar 37.950 jiwa.

Tabel 4.19.
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Jember
Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1	Kencong	65.173
2	Gumuk Mas	79.224
3	Puger	114.506
4	Wuluhan	114.695
5	Ambulu	105.103
6	Tempurejo	70.663
7	Silo	103.850
8	Mayang	48.362
9	Mumbulsari	62.339
10	Jenggawah	81.318
11	Ajung	74.416
12	Rambipuji	78.934
13	Balung	77.005
14	Umbulsari	69.539
15	Sembo	43.475
16	Jombang	50.003
17	Sumberbaru	99.416
18	Tanggul	82.760
19	Bangsalsari	113.905
20	Panti	59.399
21	Sukorambi	37.950
22	Arjasa	38.055
23	Pakusari	41.713
24	Kalisat	74.962
25	Ledokombo	62.528
26	Sumberjambe	60.126
27	Sukowono	58.734
28	Jelbuk	31.962
29	Kaliwates	111.861
30	Sumbersari	126.279
31	Patrang	94.471
Jumlah		2.332.726

Sumber: Kabupaten Jember Dalam Angka 2012, BPS Provinsi Jawa Timur, 2013

Berdasarkan data SAKERNAS Bulan Agustus Tahun 2011 menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja Kabupaten Jember sebesar 1.208.660 orang terdiri dari 717.281 penduduk laki-laki dan 491.379 penduduk perempuan. Sedangkan bukan angkatan kerja sebesar 542.494 orang yang terdiri dari 131.997 penduduk laki-laki dan 410.977 perempuan. Dari 410.977 bukan angkatan kerja sebagian besar adalah perempuan yang mengurus rumah tangga atau sebagai ibu rumah tangga sebesar 332.754 orang.

Tabel 4.20.

Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang lalu dan Jenis Kelamin pada Semester II, Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Bulan Agustus Tahun 2011 dan Status Bekerja Kabupaten Jember

No	Kegiatan Seminggu yang Lalu	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
I	Angkatan Kerja	717.281	491.379	1.208.660
	1.Bekerja	694.237	466.704	1.160.941
	2.Pengangguran Terbuka	23.044	24.675	47.719
	a. Mencari Pekerjaan	17.049	11.150	28.199
	b. Mempersiapkan Usaha	-	483	483
	c. Merasa Tidak Mungkin Mendapat Pekerjaan	4.739	11.462	16.201
	d. Sudah Punya Pekerjaan Tetapi belum Mulai Bekerja	1.256	1.580	2.836
II	Bukan Angkatan Kerja	131.997	410.977	542.494
	1.Sekolah	58.923	61.200	120.123
	2.Mengurus Rumah Tangga	20.177	312.577	332.754
	3.Lainnya	52.897	37.200	90.097
Jumlah		849.278	902.356	1.751.634

Sumber: Kabupaten Jember Dalam Angka 2012, BPS Provinsi Jawa Timur, 2013

Dari penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu sebagian besar terserap di lapangan usaha pekerjaan utama pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan yaitu sebesar 587.546 orang. Diikuti lapangan pekerjaan utama Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Tangga sebesar 223,673 orang dan keuangan dan jasa-jasa sebesar 139.147 orang.

Tabel 4.21.

Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin pada Semester II, Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) bulan Agustus Tahun 2011

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	350.461	237.085	587.546
2	Industri Pengolahan	46.065	47.508	93.573
3	Bangunan	69.814	1.471	71.285
4	Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan,	103.959	119.714	223.673
5	Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	35.142	-	35.142
6	Keuangan dan Jasa-jasa	80.810	58.337	139.147
7	Pertambangan dan Penggalian; Listrik, Gas dan Air	7.986	2.589	10.575
Jumlah		694.237	466.704	1.160.941

Sumber: Kabupaten Jember Dalam Angka 2012, BPS Provinsi Jawa Timur, 2013

Sedangkan jika dilihat dari Jenis Pekerjaan Utama sebagian besar penduduk bekerja sebagai Tenaga Usaha Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan sebesar 575.083 orang atau 49,54% dan sebagian kecil penduduk Kabupaten Jember bekerja sebagai tenaga tata Usaha dan yang sejenis yaitu sebesar 31.183 atau 2,69%.

Tabel 4.22.

Penduduk Umur 15 Tahun Ke atas yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu Menurut Jenis Pekerjaan Utama pada Semester II, Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) bulan Agustus Tahun 2011

No	Jenis Pekerjaan Utama	Jumlah
1	Tenaga Profesional, Teknisi dan yang sejenis	34.828
2	Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan	-
3	Tenaga Tata Usaha dan yang Sejenis	31.183
4	Tenaga Usaha Penjualan	204.925
5	Tenaga Usaha Jasa	59.938
6	Tenaga Usaha Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	575.083
7/8/9	Tenaga Produksi, Operator Alat-alat Angkutan dan Pekerja Kasar	254.986
Jumlah		1.160.941

Sumber: Kabupaten Jember Dalam Angka 2012, BPS Provinsi Jawa Timur, 2013

Jumlah pencari kerja terbanyak adalah tamat SMA sebesar 2.289 atau 63,60%, dan yang terkecil belum tamat SD sebesar 4 orang atau 0,11%. Dengan melihat komposisi angka tersebut berarti kualitas Sumber Daya Manusia yang tersedia di Kabupaten Jember relatif baik.

Tabel 4.23.

Banyaknya Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, 2011

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Belum Tamat SD	4	-	4
2	Tamat SD	18	2	20
3	Tamat SMP	213	194	307
4	Tamat SMA	1.818	471	2.289
5	Tamat Akademi	149	261	410
6	Sarjana	214	255	469
Jumlah 2011		2.416	1.182	3.599
Jumlah 2010		4.112	4.027	8.139
Jumlah 2009		4.905	5.644	10.549

Sumber: Kabupaten Jember Dalam Angka 2012, BPS Provinsi Jawa Timur, 2013

Sementara jumlah penduduk di Kabupaten Jember pada tahun 2011 sebesar 2.921.000 atau 12,44% dari keseluruhan jumlah penduduk yang ada. Jika dikurskan dengan uang penduduk miskin di Kabupaten Ponorogo setara

dengan Rp. 226.546/bulan. Jika dilihat kurs uang penduduk miskin pada tahun 2010 mengalami peningkatan yaitu Rp. 24.536.

Tabel 4.24.
Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan
Kabupaten Jember Tahun 2010-2011

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Prosentase Penduduk	Garis Kemiskinan (Rp/bulan)	P1	P2
2010	3.118.000	13,27%	Rp. 202.010	2,00	0,37
2011	2.921.000	12,44%	Rp. 226,546	1,72	0,38

Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan 2010 dan 2011, BPS Provinsi Jawa Timur

Dari 12,44% penduduk miskin pada tahun 2011 yang bekerja di sektor informal sebesar 43,11%, di sektor formal 15,30% dan tidak bekerja sebesar 41,59%. Jika jumlah penduduk miskin yang tidak bekerja pada tahun 2011 dibandingkan pada tahun 2010 seperti halnya dua Kabupaten terdahulu menunjukkan peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 41,59%. Hal ini tentunya akan menimbulkan masalah baru dan menjadi pekerjaan rumah yang perlu dicari solusinya oleh pemerintah Kabupaten Jember dan juga dua kabupaten terdahulu tentunya.

Tabel 4.25.
Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas dan Status Bekerja Kabupaten Jember Tahun 2010-2011

Tahun	Tidak Bekerja *)	Bekerja di Sektor Informal	Bekerja di Sektor Formal
2010		77,74%	22,26%
2011	41,59%	43,11%	15,30%

Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan 2010 dan 2011, BPS Jatim, 2013

Sementara itu penempatan TKI yang berasal dari Kabupaten Jember dalam kurun waktu 2009-2011 paling banyak adalah Hongkong sebesar 231 orang dan yang paling sedikit Singapura sebesar 11 orang. Secara gender TKI Kabupaten Jember didominasi penduduk perempuan sebesar 456 orang atau 86,86%, sedang penduduk laki-laki hanya 69 atau 13,14%.

Tabel 4.26.
 Penempatan TKI Asal Kabupaten Jember ke Luar Negeri Menurut Jenis Kelamin dan Negara Tujuan, Tahun 2009-2011

No	Negara Tujuan	2009		2010		2011		Total
		L	P	L	P	L	P	
1	Singapura	-	-	-	-	-	11	11
2	Malaysia	3	34	14	2	45	39	137
3	Hongkong	-	38	-	67	-	126	231
4	Taiwan	-	7	-	4	7	128	146
Jumlah		3	79	14	73	52	304	525

Sumber: Data dan Informasi Ketenagakerjaan 2010 dan 2011, BPS Jatim, 2013

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN TEMUAN PENELITIAN

Bab ini menyajikan data yang secara langsung dapat menjawab pertanyaan penelitian (*research question*) dari kajian ini. Oleh karena itu beberapa sub bab yang akan disajikan pada bab ini adalah : (1) profil responden TKI-Purna, (2) peran remitansi TKI-Purna terhadap peningkatan kesejahteraan, (3) peran remitansi TKI-Purna terhadap terciptanya penghasilan berkelanjutan, (4) kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pembinaan TKI-Purna, (5) optimalisasi peran TKI-Purna dalam pemberdayaan masyarakat miskin.

5.1. Profil Responden TKI-Purna

Sebagaimana telah disebutkan pada bab III Metodologi, bahwa responden dari kalangan TKI-Purna yang dijadikan sebagai sumber data primer masing-masing kabupaten terdiri 30 orang TKI-Purna dengan kualifikasi sekurang-kurangnya telah menjadi TKI-Purna selama tiga tahun dan sekurang-kurangnya telah dapat mengirimkan remitansi keada keluarganya sebanyak 36 kali/bulan. Kajian ini dilakukan di tiga (3) daerah kabupaten, yakni: Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Jember. Profil responden di tiga kabupaten tersebut sebagai berikut.

5.1.1. Responden Menurut Kelompok Umur

Data dalam tabel 5.1. di bawah ini menunjukkan bahwa interval umur responden dari kelompok TKI-Purna di 3 kabupaten yang menjadi lokasi penelitian ini adalah berkisar diantara 22 sampai dengan 51 tahun. Dari 90 (sembilan puluh) orang responden penelitian ini, 31 orang atau 34,44% adalah mereka yang berusia 32–36 tahun.

Tabel 5.1
Responden Menurut Kelompok Umur

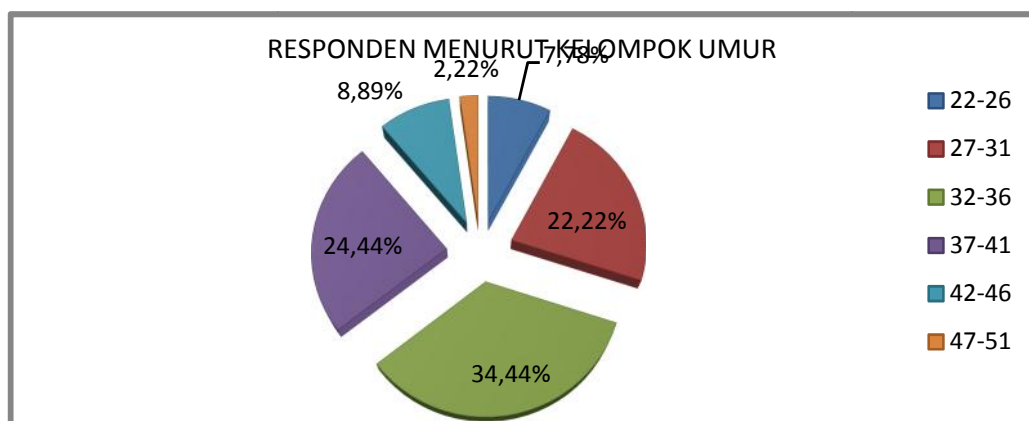
No	Kelompok Umur	Kabupaten						Jumlah	
		Ponorogo		Blitar		Jember			
		f	%	f	%	f	%	f	%
1	Kurang dari 22	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	22-26	2	6,67	3	10,00	2	6,67	7	7,78
3	27-31	9	30,00	7	23,33	4	13,33	20	22,22
4	32-36	12	40,00	11	36,67	8	26,67	31	34,44
5	37-41	3	10,00	8	26,67	11	36,67	22	24,44
6	42-46	2	6,67	1	3,33	5	16,67	8	8,89
7	47-51	2	6,67	0	0,00	0	0,00	2	2,22
8	Lebih dari 51	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Jumlah		30	100,00	30	100,00	30	100,00	90	100,00

Sumber : Tabulasi Data Primer, 2011

Berdasar pada data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa bila data ditinjau per kabupaten, maka modus usia responden sebagai berikut:

1. Kabupaten Ponorogo, modus usianya 32 - 36 tahun (12 orang atau 40%),
2. Kabupaten Blitar, modus usianya 32 - 36 tahun (11 orang atau 36,67%), dan
3. Kabupaten Jember, modus usianya 37 - 41 tahun (11 orang atau 36,67%).

Data dalam tabel 5.1. di depan juga menunjukkan bahwa responden kajian ini adalah dominan berusia produktif, yakni antara 27 – 41 tahun (73 orang atau 81,10%).



Gambar 5.1.
Responden Menurut Kelompok Umur

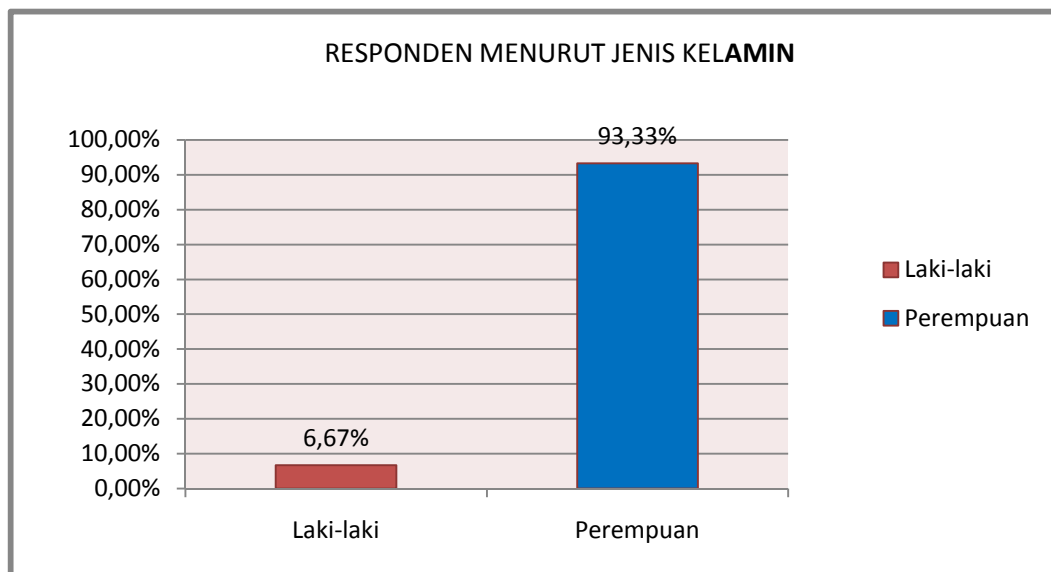
5.1.2. Responden Menurut Jenis Kelamin

Sebagian besar jenis kelamin responden kajian ini adalah perempuan, yakni mencapai 84 orang (93%) dan 6 orang (6,67%) laki-laki; secara detail dapat dilihat pada tabel 5.2. berikut.

Tabel 5.2.
Responden Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Kabupaten						Jumlah	
		Ponorogo		Blitar		Jember			
		f	%	f	%	f	%	f	%
1	Laki-laki	5	16,67	1	3,33	0	0,00	6	6,67
2	Perempuan	25	83,33	29	96,67	30	100,00	84	93,33
Jumlah		30	100,00	30	100,00	30	100,00	30	100,00

Sumber : Tabulasi Data Primer, 2013



Gambar 5.2.
Responden Menurut Jenis Kelamin

5.1.3. Responden Menurut Jenjang Pendidikan

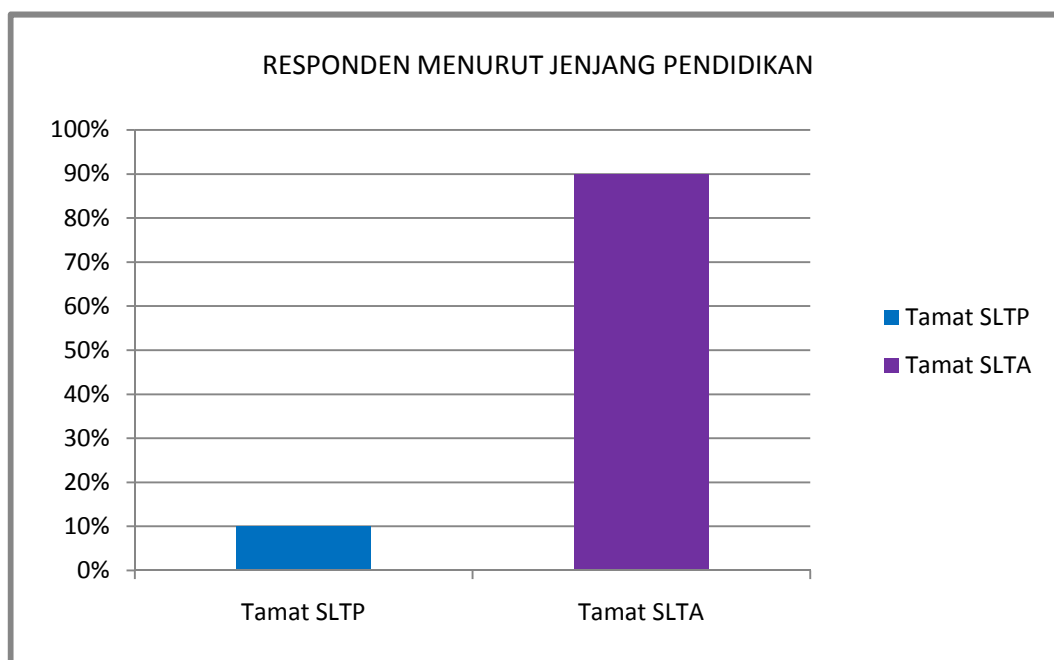
Ditinjau dari tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan, responden penelitian ini adalah dominan (81 orang atau 90%) adalah tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan/atau sederajat, dan 9 orang atau 10% adalah

tamat pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau sederajat, sebagaimana yang tersebut dalam Tabel 5.3. berikut. Kondisi tersebut dapat diinterpretasikan bahwa tingkat pendidikan terakhir responden kajian ini adalah sudah relatif tinggi, kalau ada beberapa pihak yang menyatakan bahwa kualitas TKI kita adalah relatif rendah, maka ada indikasi bahwa TKI relatif tidak memiliki keterampilan spesifik yang sesuai dengan bidang tempat mereka bekerja.

Tabel 5.3.
Responden Menurut Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Kabupaten						Jumlah	
		Ponorogo		Blitar		Jember			
		f	%	f	%	f	%	f	%
1	Tamat SLTP/ Sederajat	3	10,00	4	13,33	2	6,67	9	10,00
2	Tamat SLTA/ Sederajat	27	90,00	26	86,67	28	93,33	81	90,00
Jumlah		30	100,00	30	100,00	30	100,00	90	100,00

Sumber : Tabulasi Data Primer, 2013



Gambar 5.3.
Responden Menurut Jenjang Pendidikan

5.1.4. Responden Menurut Lamanya Bekerja di Luar Negeri

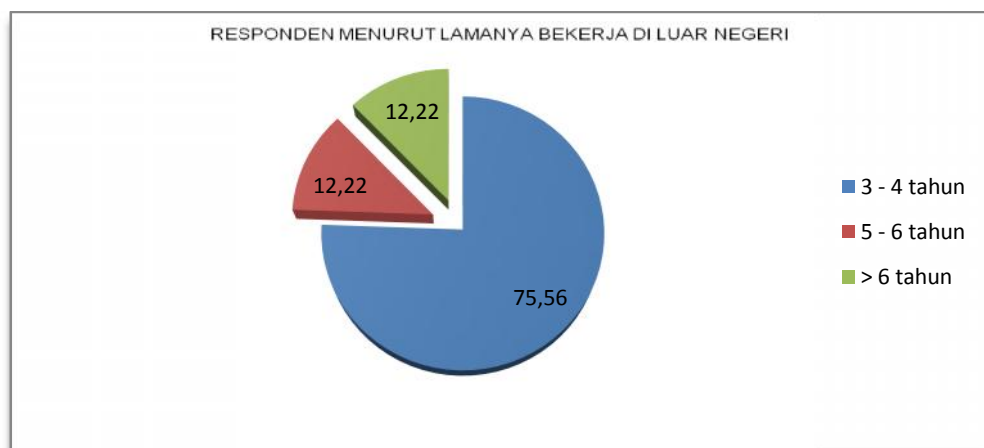
Ditinjau dari lamanya bekerja di luar negeri, sebagian besar responden kajian ini bermasa kerja 3–4 tahun (68 orang atau 75,56%), hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4
Responden Menurut Lamanya Bekerja di Luar Negeri

No	Lama bekerja	Kabupaten						Jumlah	
		Ponorogo		Blitar		Jember		f	%
		f	%	f	%	f	%		
1	3 - 4 tahun	23	76,67	21	70,00	24	80,00	68	75,56
2	5 - 6 tahun	4	13,33	4	13,33	3	10,00	11	12,22
3	Lebih dari 6 tahun	3	10,00	5	16,67	3	10,00	11	12,22
Jumlah		30	100,00	30	100,00	30	100,00	90	100,00

Sumber : Tabulasi Data Primer, 2013

Berdasar data pada tabel 5.4 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden kajian ini (68 orang atau 75,56%) memiliki pengalaman kerja di luar negeri yang relatif pendek (antara 3 sampai dengan 4 tahun). Untuk ukuran TKI, ini masa kerja yang relatif pendek, oleh karena itu dapat diduga remitansi yang mereka kirim relatif belum banyak.



Gambar 5.4.
Responden Menurut Lamanya Bekerja di Luar Negeri

5.1.5. Responden Menurut Negara Tempat Bekerja

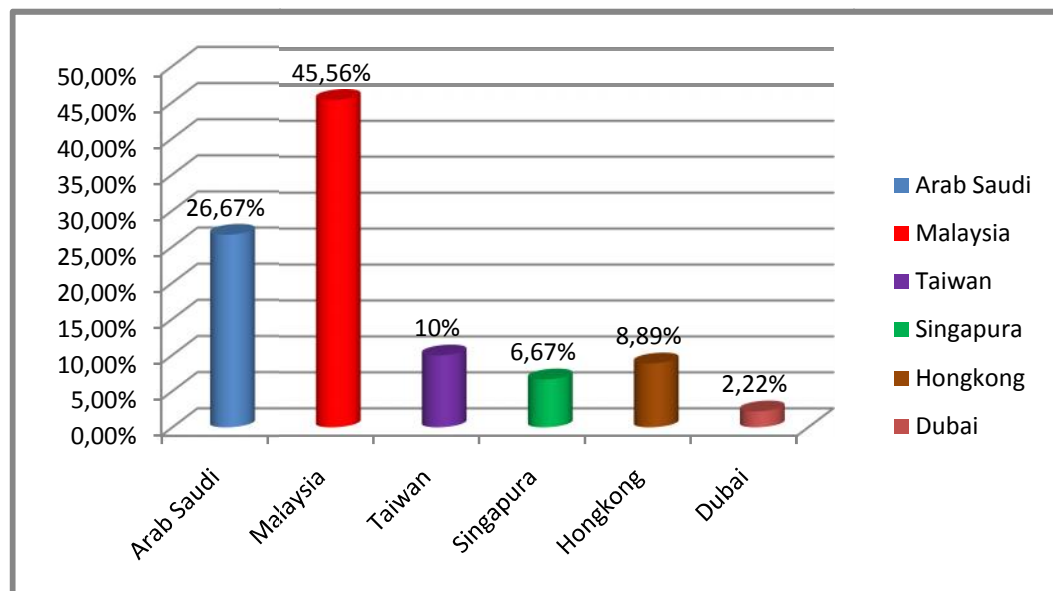
Ditinjau dari negara tujuan atau negara tempat mereka pernah bekerja, yang pernah bekerja di Arab Saudi 24 orang(26,67%), dan di Malaysia 41 orang (45,56%).

Tabel 5.5.
Responden Menurut Negara Tempat Bekerja

No	Negara Tujuan	Kabupaten						Jumlah	
		Ponorogo		Blitar		Jember			
		f	%	f	%	f	%	F	%
1	Arab Saudi	6	20,00	8	26,67	10	33,33	24	26,67
2	Malaysia	16	53,33	15	50,00	10	33,33	41	45,56
3	Taiwan	3	10,00	3	10,00	3	10,00	9	10,00
4	Singapura	2	6,67	2	6,67	2	6,67	6	6,67
5	Hongkong	3	10,00	2	6,67	3	10,00	8	8,89
6	Dubai	0	0,00	0	0,00	2	6,67	2	2,22
Jumlah		30	100,00	30	100,00	30	100,00	90	100,00

Sumber : Tabulasi Data Primer, 2013

RESPONDEN MENURUT NEGARA TEMPAT BEKERJA



Gambar 5.5.
Responden Menurut Negara Tempat Bekerja

Menurut responden masuk ke Negara Malaysia relatif mudah, misalnya masuk melalui jalan darat dari Kalimantan Utara; dan untuk masuk ke Negara Arab Saudi, beberapa ada yang melalui rombongan “umroh” selanjutnya tidak ikut kembali ke tanah air. Yang demikian ini terutama terjadi pada kasus TKI ilegal. Relatif sedikitnya responden yang pernah bekerja di negara Taiwan, Singapura, Hongkong, dan Dubai merupakan indikasi bahwa masuk ke negara tersebut relatif sulit, tidak saja karena menjadi TKI di negara tersebut perlu memiliki dokumen administratif yang relative lebih ketat, tetapi juga karena menjadi tenaga migran di negara-negara tersebut lebih dituntut memiliki kualifikasi dan/atau kompetensi tertentu.

5.2. Peran Remitansi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan TKI-Purna dan Keluarganya

Secara umum, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri mendapatkan penghasilan yang relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan jika mereka masih belum bekerja dan/atau masih bekerja di daerah asalnya (dalam negeri). Perbedaan penghasilan tersebut telah membuat mereka dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya, baik pada saat mereka masih menjadi TKI aktif maupun setelah mereka menjadi TKI-Purna.

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan peningkatan kesejahteraan TKI-Purna dan keluarganya adalah bertambahnya atau lebih besarnya kemampuan TKI-Purna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya jika dibandingkan dengan kondisi ketika mereka belum menjadi TKI atau jika mereka tidak pernah menjadi TKI. Tambahan kemampuan tersebut dapat berupa tambahan biaya hidup yang berasal dari remitansi yang mereka kirimkan selama menjadi TKI, atau dapat berupa hasil investasi yang mereka atau keluarga mereka lakukan pada bidang usaha tertentu pada saat mereka masih menjadi TKI-Aktif dan/atau setelah mereka menjadi TKI-Purna.

Menurut data yang dapat dikumpulkan dan berdasar hasil wawancara terstruktur dalam pelaksanaan studi lapangan dari kajian ini, kecenderungan peran Remitansi TKI-Purna terhadap peningkatan kesejahteraan TKI-Purna dan keluarganya jika dikelompokkan, maka kecenderungan peran Remitansi TKI-

Purna terhadap peningkatan kesejahteraan TKI-Purna dan keluarganya sebagai berikut:

1. Terpenuhinya kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan barang-barang konsumsi, seperti: alat-alat rumah tangga, perhiasan, elektronik, motor, mobil dan lain sebagainya.
2. Terpenuhinya kebutuhan untuk memiliki rumah dan/atau perbaikan rumah menjadi lebih layak huni dari pada sebelumnya.
3. Terpenuhinya kebutuhan kepemilikan tanah/lahan
4. Terpenuhinya kebutuhan akan pemeliharaan kesehatan dan peningkatan pendidikan bagi anggota keluarga dan/atau dirinya.
5. Terpenuhinya kebutuhan akan kepemilikan tabungan dan perhiasan.
6. Terpenuhinya kebutuhan untuk berinvestasi yang mendatangkan penghasilan berkelanjutan.
7. Terpenuhinya lain-lain (misalnya : membayar pinjaman/hutang)
8. Terpenuhinya kebutuhan akan ketenteraman keluarga.

Tabel 5.6.

Perkiraan Alokasi Dana Remitansi TKI-Purna Kabupaten Ponorogo (dalam %) (n=30)

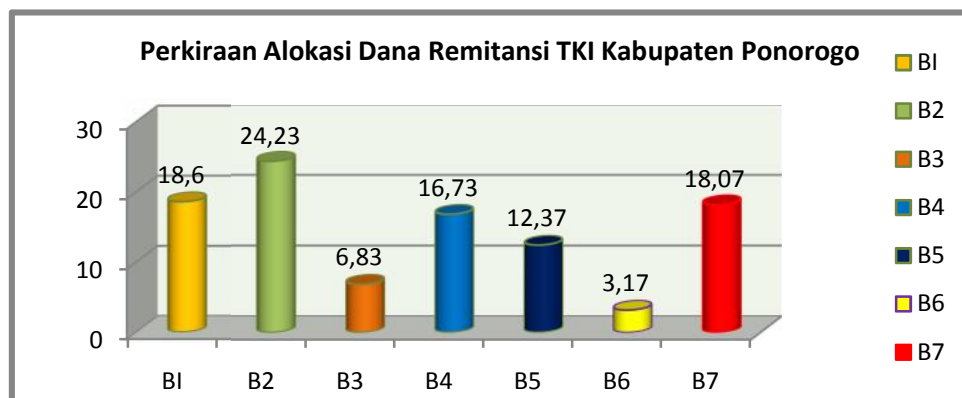
No Responden	B1 %	B2 %	B3 %	B4 %	B5 %	B6 %	B7 %	Jumlah %
1	25	30	0	20	0	10	15	100
2	20	30	0	20	20	0	10	100
3	15	20	25	15	5	15	5	100
4	27	25	0	15	20	0	13	100
5	18	20	20	17	15	0	10	100
6	20	17	20	20	13	0	10	100
7	25	25	0	15	20	0	15	100
8	20	20	25	10	15	0	10	100
9	20	0	0	30	10	0	40	100
10	25	25	0	20	20	0	10	100
11	10	20	0	15	15	20	20	100
12	15	30	0	15	15	0	25	100
13	30	30	0	15	10	0	15	100
14	10	25	0	15	15	15	20	100
15	17	25	0	10	23	0	25	100
16	20	30	0	15	10	0	25	100
17	25	30	0	15	10	0	20	100
18	18	25	20	10	15	0	12	100
19	20	30	0	20	10	0	20	100

No Responden	B1 %	B2 %	B3 %	B4 %	B5 %	B6 %	B7 %	Jumlah %
20	15	25	0	15	5	20	20	100
21	15	30	0	20	5	0	30	100
22	10	20	20	15	10	0	25	100
23	23	30	0	20	10	0	17	100
24	15	30	0	15	5	15	20	100
25	10	15	30	20	10	0	15	100
26	15	20	25	20	10	0	10	100
27	10	15	20	15	20	0	20	100
28	15	25	0	20	15	0	25	100
29	20	30	0	15	10	0	25	100
30	30	30	0	15	10	0	15	100
Jumlah	558	727	205	502	371	95	542	
Rata-rata	18,60	24,23	6,83	16,73	12,37	3,17	18,07	100,00

Sumber : Tabulasi Data Primer, 2013

Keterangan :

- B1 : Konsumsi (makanan, pakaian, perkakas rumah, elektronik dan kendaraan)
- B2 : Renovasi Rumah
- B3 : Membeli tanah
- B4 : Kesehatan dan Pendidikan
- B5 : Tabungan dan Perhiasan
- B6 : Investasi (Unit Ekonomi Produktif yang mendatangkan penghasilan berkelanjutan)
- B7 : Lain-lain (misalnya: membayar pinjaman/hutang)



Gambar 5.6.

Perkiraan Alokasi Dana Remitansi TKI Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan Tabel 5.6. di atas diketahui bahwa 5 jenis belanja yang paling besar mendapat alokasi dana dari remitansi TKI-Purna di Kabupaten Ponorogo (dengan proporsi alokasi dana di atas 10%) secara berurutan adalah :

1. Renovasi rumah : ± 24,23 %
2. Konsumsi : ± 18,60 %
3. Membayar Hutang : ± 18,07 %
4. Kesehatan dan Pendidikan : ± 16,73 %
5. Tabungan dan Perhiasan : ± 12,37 %

Adapun terdapat dua jenis belanja yang proporsinya tidak mencapai 10%, yaitu belanja :

6. Membeli Tanah : $\pm 6,83\%$
7. Investasi (Unit Ekonomi Produktif) : $\pm 3,17\%$

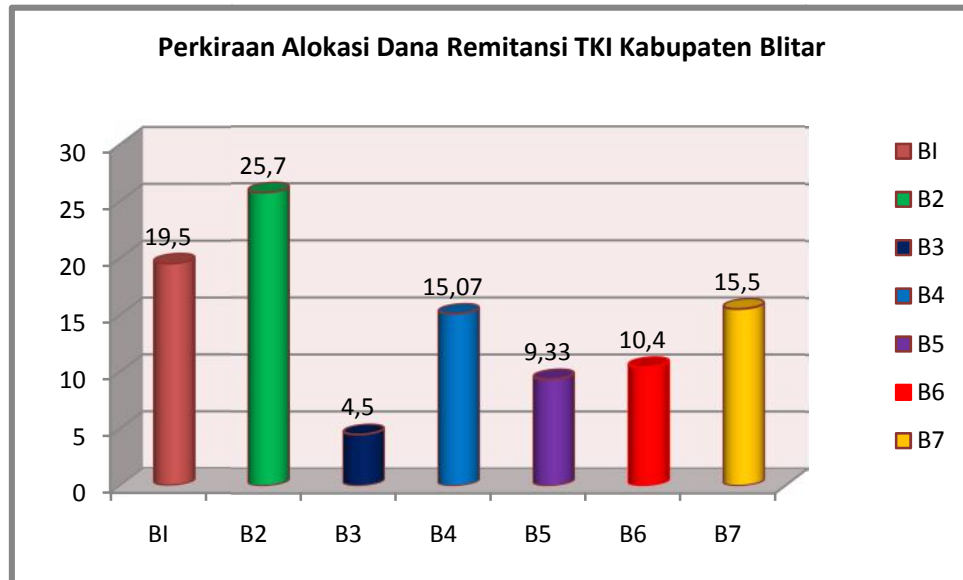
Tabel 5.7.
Perkiraan Alokasi Dana Remitansi TKI-Purna Kabupaten Blitar (Dalam %) (n=30)

No Responden	B1 %	B2 %	B3 %	B4 %	B5 %	B6 %	B7 %	Jumlah %
1	15	20	30	15	5	0	15	100
2	15	30	0	20	15	0	20	100
3	15	20	0	15	10	20	20	100
4	18	20	20	15	10	0	17	100
5	15	30	0	20	20	0	15	100
6	20	20	0	15	5	20	20	100
7	23	35	0	15	5	12	10	100
8	20	20	0	10	15	25	10	100
9	15	15	20	15	15	0	20	100
10	18	30	0	12	10	20	10	100
11	15	20	0	15	10	15	25	100
12	25	15	20	10	10	0	20	100
13	20	35	0	10	15	0	20	100
14	15	30	0	15	10	15	15	100
15	24	26	0	15	10	15	10	100
16	25	35	0	15	10	0	15	100
17	20	35	0	15	10	15	5	100
18	25	30	0	15	5	10	15	100
19	20	30	0	20	10	0	20	100
20	20	25	0	15	5	20	15	100
21	12	35	0	20	5	15	13	100
22	18	22	0	15	10	20	15	100
23	20	10	30	20	10	0	10	100
24	30	20	0	15	5	15	15	100
25	25	30	0	15	5	10	15	100
26	20	35	0	20	10	0	15	100
27	20	15	15	15	5	15	15	100
28	17	23	0	15	10	15	20	100
29	20	30	0	10	5	20	15	100
30	20	30	0	10	10	15	15	100
Jumlah	585	771	135	452	280	312	465	
Rata-rata	19,50	25,70	4,50	15,07	9,33	10,40	15,50	100,00

Sumber : Tabulasi Data Primer, 2013

Keterangan :

- B1 : Konsumsi (makanan, pakaian, perkakas rumah, elektronik dan kendaraan)
 B2 : Renovasi Rumah
 B3 : Membeli tanah
 B4 : Kesehatan dan Pendidikan
 B5 : Tabungan dan Perhiasan
 B6 : Investasi (Unit Ekonomi Produktif yang mendatangkan penghasilan berkelanjutan)
 B7 : Lain-lain (misalnya: membayar pinjaman/hutang)



Gambar 5.7.

Perkiraan Alokasi Dana Remitansi TKI Kabupaten Blitar

Berdasarkan Tabel 5.7. tersebut diketahui bahwa 5 jenis belanja yang paling besar mendapat alokasi dana dari remitansi TKI-Purna di Kabupaten Blitar (dengan proporsi alokasi dana di atas 10%) secara berurutan adalah:

1. Renovasi rumah : ± 25,70 %
2. Konsumsi : ± 19,50 %
3. Membayar Hutang : ± 15,50 %
4. Kesehatan dan Pendidikan : ± 15,07 %
5. Investasi : ± 10,40 %

Adapun terdapat dua jenis belanja yang proporsinya tidak mencapai 10%, yaitu belanja :

6. Tabungan dan Perhiasan : ± 9,33 %
7. Membeli Tanah : ± 4,50 %

Tabel 5.8.
Perkiraan Alokasi Dana Remitansi TKI-Purna Kabupaten Jember (dalam %)
(n=30)

No Responden	B1 %	B2 %	B3 %	B4 %	B5 %	B6 %	B7 %	Jumlah %
1	23	35	0	15	17	0	10	100
2	20	30	0	15	20	0	15	100
3	15	20	20	15	15	0	15	100
4	30	30	0	15	10	0	15	100
5	25	30	0	20	15	0	10	100
6	20	35	0	20	15	0	10	100
7	27	30	0	20	5	10	8	100
8	20	25	0	10	10	20	15	100
9	24	15	20	15	15	0	11	100
10	20	20	0	20	10	20	10	100
11	22	35	0	10	10	15	8	100
12	22	30	0	20	10	0	18	100
13	20	20	0	15	15	20	10	100
14	30	25	0	15	20	0	10	100
15	26	35	0	15	14	0	10	100
16	20	35	0	15	15	0	15	100
17	30	15	20	15	10	0	10	100
18	30	25	0	15	20	0	10	100
19	25	10	30	10	15	0	10	100
20	20	20	0	15	15	20	10	100
21	20	25	20	10	10	0	15	100
22	25	30	0	20	10	0	15	100
23	20	15	0	15	10	25	15	100
24	25	20	20	15	5	0	15	100
25	20	35	0	15	10	10	10	100
26	20	10	25	15	15	0	15	100
27	20	25	0	15	5	20	15	100
28	30	35	0	15	10	0	10	100
29	25	30	0	15	15	0	15	100
30	20	20	0	15	10	20	15	100
Jumlah	694	765	155	460	376	180	370	
Rata-rata	23,13	25,50	5,17	15,33	12,53	6,00	12,33	100,00

Sumber : Tabulasi Data Primer, 2013

Keterangan :

B1 : Konsumsi (makanan, pakaian, perkakas rumah, elektronik dan kendaraan)

B2 : Renovasi Rumah

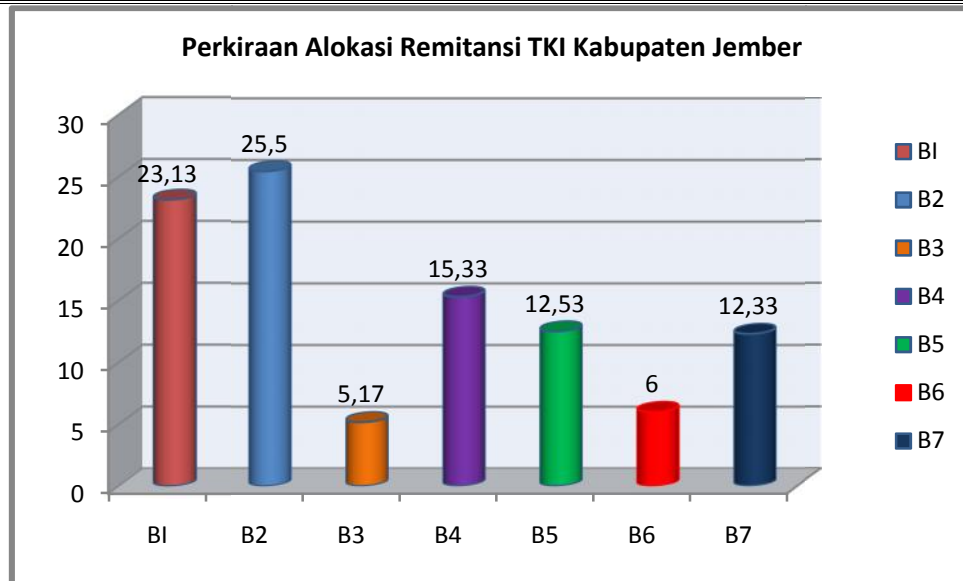
B3 : Membeli tanah

B4 : Kesehatan dan Pendidikan

B5 : Tabungan dan Perhiasan

B6 : Investasi (Unit Ekonomi Produktif yang mendatangkan penghasilan berkelanjutan)

B7 : Lain-lain (misalnya: membayar pinjaman/hutang)



Gambar 5.8.

Perkiraan Alokasi Dana Remitansi TKI Kabupaten Jember

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa 5 jenis belanja yang paling besar mendapat alokasi dana dari remitansi TKI-Purna di Kabupaten Jember (dengan proporsi alokasi dana di atas 10%) secara berurutan adalah:

1. Renovasi rumah : ± 25,50 %
2. Konsumsi : ± 23,13 %
3. Kesehatan dan Pendidikan : ± 15,33 %
4. Tabungan dan Perhiasan : ± 12,53 %
5. Membayar Hutang : ± 12,33 %

Adapun terdapat dua jenis belanja yang proporsinya tidak mencapai 10%, yaitu belanja :

6. Investasi : ± 6,00 %
7. Membeli Tanah : ± 5,17 %

Berdasarkan tabulasi data hasil wawancara terstruktur terhadap 90 (Sembilan puluh) orang TKI-Purna yang berasal dari Kabupaten Ponorogo, Blitar dan Jember sebagaimana tersebut di depan, maka dapat disusun tabel rekapitulasi sebagai berikut.

Tabel 5.9.
Rekapitulasi Perkiraan Alokasi Dana Remitansi TKI-Purna (%)
Kabupaten Ponorogo, Blitar dan Jember

Alokasi Penggunaan Remitansi	Kabupaten Ponorogo	Kabupaten Blitar	Kabupaten Jember	Rata-Rata	Rangking
B1	18,60	19,50	23,13	20,41	2
B2	24,23	25,70	25,50	25,14	1
B3	6,83	4,50	5,17	5,50	7
B4	16,73	15,07	15,33	15,71	3
B5	12,37	9,33	12,53	11,41	5
B6	3,17	10,40	6,00	6,52	6
B7	18,07	15,50	12,33	15,30	4
Jumlah	100,00	100,00	100,00		

Sumber : Rekapitulasi Tabulasi Data Primer, 2013

Keterangan :

B1 : Konsumsi (makanan, pakaian, perkakas rumah, elektronik, kendaraan)

B2 : Renovasi Rumah

B3 : Membeli tanah

B4 : Kesehatan dan Pendidikan

B5 : Tabungan dan Perhiasan

B6 : Investasi (Unit Ekonomi Produktif yang mendatangkan penghasilan berkelanjutan)

B7 : Lain-lain (misalnya: membayar pinjaman/hutang)

Berdasarkan rekapitulasi perkiraan alokasi dana remitansi TKI-Purna sebagaimana tersebut di depan, maka dapat diketahui bahwa 3 jenis pengeluaran yang menduduki peringkat tertinggi adalah : merenovasi rumah, memenuhi kebutuhan konsumsi, serta memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan. Secara lengkap dari ke tujuh jenis belanja TKI-Purna dan keuangannya dari sumber remitansi, peringkatnya sebagai berikut :

1. Renovasi Rumah.
2. Konsumsi (makanan, pakaian, perkakas rumah, elektronik, kendaraan)
3. Kesehatan dan Pendidikan.
4. Lain-lain (misalnya: membayar pinjaman/hutang).
5. Tabungan dan Perhiasan.
6. Investasi (Unit Ekonomi Produktif yang mendatangkan penghasilan berkelanjutan).
7. Membeli tanah.

Penggunaan remitansi peringkat pertama adalah untuk pemenuhan kebutuhan merenovasi rumah, rata-rata mencapai 25,14%, termasuk dalam kebutuhan merenovasi rumah ini adalah membeli rumah yang lebih layak dari rumah sebelumnya dan memperbaiki rumah yang ada agar menjadi lebih baik dari

pada sebelumnya. Adapun rincian proporsi penggunaan remitansi untuk memenuhi kebutuhan renovasi rumah di tiga kabupaten yang menjadi lokasi kajian ini tersaji pada tabel berikut.

Tabel 5.10.
Proporsi Alokasi Remitansi TKI-Purna untuk Kebutuhan Merenovasi Rumah

No	Kabupaten	Proporsi Remitansi untuk Kebutuhan Merenovasi Rumah (%)
1	Kabupaten Ponorogo	24,23
2	Kabupaten Blitar	25,70
3	Kabupaten Jember	25,50
Rata-Rata		25,14

Sumber : Rekapitulasi Tabulasi Data Primer, 2013

Selanjutnya pengiriman uang TKI sebagian besar untuk membangun rumah atau memperbaiki rumah lama. Bisa ditebak ketika masuk di desa-desa pelosok misalnya di Ponorogo Kecamatan Sukorejo banyak ditemui rumah-rumah bagus, luas dan model terkini bisa ditebak itu adalah rumah keluarga TKI. Terkadang juga ada kesan bersaing atau “jor-joran” untuk memiliki rumah “mentereng” di desa atau di lingkungan tersebut di kalangan para keluarga TKI.

Adapun Penggunaan remitansi peringkat kedua adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Yang termasuk kebutuhan konsumsi terdiri dari pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti: makan, pakaian, perkakas rumah, elektronik dasar (misalnya peralatan elektronik untuk dapur, televisi, alat komunikasi handphone, dll) dan kendaraan (dalam hal ini yang dianggap sebagai kebutuhan vital adalah sepeda motor). Adapun rincian proporsi penggunaan remitansi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di tiga kabupaten yang menjadi lokasi kajian ini tersaji pada tabel berikut.

Tabel 5.11.
Proporsi Alokasi Remitansi TKI-Purna untuk Kebutuhan Konsumsi

No	Kabupaten	Proporsi Remitansi untuk Kebutuhan Konsumsi
1	Kabupaten Ponorogo	18,60
2	Kabupaten Blitar	19,50
3	Kabupaten Jember	23,13
Rata-Rata		20,41

Sumber : Rekapitulasi Tabulasi Data Primer, 2013

Hampir semua (tidak kurang dari 80%) TKI-Purna menyatakan bahwa sebelum menjadi TKI, keluarga mereka mengalami persoalan kekurangan sumberdaya (baca = dana) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Remitansi yang mereka kirim ke tanah air, karenanya, diakui sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan pokok untuk hidup layak.

Pada kondisi demikian diasumsikan remitansi TKI-Purna menjadi instrumenpeningkatan pemenuhan kebutuhan pokok, yang pada intinya ini menunjukkan bahwa ketika sudah mendapatkan pengiriman uang remitansi, pemenuhan

kebutuhan keluarga TKI untuk makan menjadi lebih tinggi kualitasnya misalnya: makanan menjadi lebih berprotein dan bergizi tinggi, pakaian juga lebih pantas dan banyak jumlahnya, demikian juga kebutuhan akan sarana transportasi (kendaraan) untuk keluarga TKI juga terpenuhi dan lebih baik dengan dapat dialokasikannya kebutuhan pemenuhan kendaraan (dalam hal ini sepeda motor). Kepemilikan sepeda motor diakui oleh lebih dari 65% responden dapat menurunkan pos pengeluaran, sekaligus dapat lebih mengefisienkan penyelesaian segala urusan yang memerlukan mobilitas dan sarana transportasi.

Berikutnya berdasarkan hasil observasi ke rumah para keluarga TKI-Purna, ada kesan (meskipun tidak mayoritas), pengiriman uang TKI dimanfaatkan untuk membeli barang-barang konsumtif yang untuk memenuhi hasrat sesaat supaya terkesan “wah” daripada pertimbangan manfaat dari barang itu. Barang-barang tersebut seperti alat-alat rumah tangga seperti: alat-alat memasak serbaguna, kompor gas mewah, kulkas mewah, dsb. Selain itu yang tidak kalah pentingnya supaya rumah mentereng tidak hanya kelihatan dari luar, isi rumahnya pun dilengkapi dengan perlengkapan elektronik mulai TV, VCD sampai *home teater* juga ada, serta telpon selular dengan model terbaru.

Penggunaan remitansi peringkat ke-tiga adalah untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan, dengan sebaran data dan rata-rata sebagai berikut.

Tabel 5.12.

Proporsi Alokasi Remitansi TKI-Purna untuk Kebutuhan Kesehatan dan Pendidikan

No	Kabupaten	Proporsi Remitansi untuk Kebutuhan Kesehatan dan Pendidikan (%)
1	Kabupaten Ponorogo	16,73
2	Kabupaten Blitar	15,07
3	Kabupaten Jember	15,33
Rata-Rata		15,71

Sumber : Rekapitulasi Tabulasi Data Primer, 2013

Ketika alokasi remitansi TKI untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan menduduki peringkat ke-3, menjadi salah satu indikasi bahwa : (1) kebutuhan masyarakat akan pendidikan dan kesehatan amat vital, (2) selama ini pemerintah maupun pemerintah daerah (meskipun telah memiliki sejumlah program bantuan untuk kesehatan dan pendidikan masyarakat), maka kenyataannya masyarakat masih harus ber-swadana dalam memenuhi dua kebutuhan tersebut.

Penggunaan remitansi peringkat ke-empat adalah untuk memenuhi kebutuhan lain-lain, tetapi dalam catatan peneliti yang utama adalah untuk **membayar pinjaman hutang**. Terdapat satu catatan menarik yang dapat peneliti temukan di lapangan, adalah bahwa tidak satu pun TKI-Purna dan keluarganya yang tidak mengalokasikan remitansinya untuk memenuhi kebutuhan pembayaran pinjaman/hutang. (Catatan : pos pengeluaran ini tidak termasuk hutang yang dipakai untuk mengganti biaya transportasi pemberangkatan atau penempatan mereka di tempat kerja dimana mereka menjadi TKI di luar negeri). Artinya, semua TKI-Purna dan keluarganya yang kebetulan menjadi responden kajian ini dalam keadaan memiliki pinjaman/hutang sebelum mereka memutuskan untuk berangkat ke luar negeri menjadi TKI. Pada konteks inilah remitansi TKI menjadi jawaban atau solusi atas persoalan pinjaman/hutang yang sedang mereka hadapi. Angka proposinya pun cukup fantastik, yaitu rata-rata 15,30%.

Tabel 5.13.
Proporsi Alokasi Remitansi TKI-Purna untuk Kebutuhan Lain-Lain
(Terutama Pembayaran pinjaman/hutang)

No	Kabupaten	Proporsi Remitansi untuk Kebutuhan Pembayaran pinjaman/hutang (%)
1	Kabupaten Ponorogo	18,07
2	Kabupaten Blitar	15,50
3	Kabupaten Jember	12,33
Rata-Rata		15,30

Sumber : Rekapitulasi Tabulasi Data Primer, 2013

Penggunaan remitansi peringkat ke-lima adalah untuk tabungan, berupa uang tunai dan perhiasan. Namun dalam catatan Tim Peneliti, lebih dari 70% tabungan tersebut berupa perhiasan emas. Alasan yang mereka ungkapkan mengapa tabungannya sebagian besar berupa perhiasan dan sebagian kecil berupa uang di bank, adalah karena jika berupa perhiasan dianggap dapat meningkatkan harga diri mereka di mata masyarakat sekitarnya; toh sewaktu-waktu diperlukan dapat dengan mudah dijual.

Tabel 5.14.
Proporsi Alokasi Remitansi TKI-Purna untuk Kebutuhan Tabungan (Uang dan Perhiasan)

No	Kabupaten	Proporsi Remitansi untuk Kebutuhan Tabungan dan Perhiasan (%)
1	Kabupaten Ponorogo	12,37
2	Kabupaten Blitar	9,33
3	Kabupaten Jember	12,53
Rata-Rata		11,41

Sumber : Rekapitulasi Tabulasi Data Primer, 2013

Berdasar hasil tabulasi data yang tersaji pada sub bab 5.1 dn 5.2 dapat diketahui bahwa dari 90 orang responden itu yang menyatakan tidak memiliki tabungan berupa uang dan/atau perhiasan hanya 1 (satu) orang, yang kebetulan adalah responden dari kabupaten Ponorogo. Namun ia melakukan belanja investasi sebesar 10%, disamping belanja lain yang relatif tinggi, yakni renovasi rumah 30%, konsumsi 20% dan kesehatan-pendidikan 20%.

Penggunaan remitansi peringkat ke-enam dan ke-tujuh adalah untuk investasi dan pembelian tanah. Analisis data terhadap dua jenis alokasi remitansi

ini disajikan pada sub bab 5.3, karena memiliki relevansi untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terkait dengan sub bab tersebut.

Terdapat 3 (tiga) hal penting sebagai hasil analisis terhadap sejumlah data yang telah dikumpulkan melalui kajian ini, dalam upaya menjawab rumusan pertanyaan penelitian yang pertama : Bagaimana kecenderungan peran remitansi TKI-Purna terhadap peningkatan kesejahteraan TKI-Purna dan keluarganya?. Hasil analisis sekaligus jawaban atas rumusan permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Berdasarkan serangkaian data yang dikemukakan di depan, maka dapat diketahui bahwa para TKI-Purna yang berpredikat dan/atau dapat disebut sebagai TKI yang relatif sukses, dengan masa juang/kerja sekurang-kurangnya selama 3 tahun, maka mereka dapat memenuhi kebutuhan primernya, bahkan juga kebutuhan sekundernya, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya (baik yang hanya bisa dinikmati oleh keluarga batih maupun sampai ke keluarga inti/besar). Dalam perspektif ini dapat dipahami apabila kesuksesan TKI (yang sekarang telah menjadi TKI-Purna), dalam jangka pendek, atau yang sampai dengan saat ini dapat dirasakan, adalah **meningkatkan kesejahteraan TKI-Purna beserta keluarganya**, yang ditandai oleh dapat terpenuhinya sejumlah kebutuhan (sekurang-kurangnya 3 kelompok kebutuhan dari 7 kelompok kebutuhan yang dapat diidentifikasi) sebagaimana diuraikan pada beberapa tabel di depan.
2. Berdasarkan tabulasi data dari jawaban responden yang dikemukakan secara verbal di sepanjang berlangsungnya wawancara terstruktur juga dapat diketahui bahwa tidak kurang dari 78 orang dari 90 orang (78,67%) menyatakan bahwa dirinya dan keluarganya mengalami peningkatan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bermuara pada meningkatnya kesejahteraan mereka. Maka Tim Peneliti membangun asumsi bahwa dalam jangka pendek (mulai menjadi TKI sampai dengan 5 tahun pasca menjadi TKI-Purna) terjadi peningkatan kesejahteraan pada diri TKI-Purna beserta keluarganya (catatan: bagi TKI-Purna yang sukses).
3. Asumsi ini dibangun di atas ketetapan metodologis kajian ini, bahwa yang menjadi populasi kajian ini adalah kelompok TKI-Purna yang dapat dikatakan relatif sukses. Pada saat yang sama tentu Tim peneliti menyadari

bahwa di samping ada kelompok TKI-Purna yang sukses (sebagaimana yang menjadi responden kajian ini), ada pula kelompok TKI-Purna yang tidak/kurang sukses yang ditandai oleh tidak diperolehnya penghasilan yang wajar dalam

mekanisme pasar sebagai TKI; bahkan lebih dari itu tidak dapat dipungkiri bila ada kelompok TKI-Purna yang pulang tidak membawa apa-apa, justru pulang membawa petaka, bahkan ada yang pulang tinggal nama. Kelompok TKI-Purna yang demikian ini sedang tidak menjadi populasi kajian ini, mengingat topik kajian ini bersangkutan-paut dengan upaya untuk menempatkan TKI-Purna sebagai agen perubahan dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin di lingkungan tempat tinggal mereka melalui program usaha ekonomi produktif yang dapat menciptakan penghasilan berkelanjutan yang bertumpu pada kekuatan modal dana, modal pengalaman kerja dan modal sosial yang telah mereka genggam.

5.3. Peran Remitansi TKI-Purna Terhadap Terciptanya Usaha Ekonomi Produktif Yang Dapat Menciptakan Mata Pencaharian Berkelanjutan Bagi TKI Purna dan Keluarganya

Pada sub bab 5.2 telah dikemukakan bahwa sebagian besar TKI-Purna menyatakan bahwa kesejahteraan mereka relatif meningkat setelah mereka pernah menjadi TKI. Peningkatan kesejahteraan tersebut ada yang menyatakan sebagai akibat atau merupakan hasil dari upaya menabung yang mereka lakukan saat masih menjadi TKI-Aktif, dan ada yang menyatakan sebagai akibat atau merupakan hasil dari investasi yang mereka lakukan pada bidang usaha tertentu, yang manfaatnya dapat mereka rasakan saat ini atau setelah mereka menjadi TKI-Purna. Menurut data yang dapat dikumpulkan dan hasil wawancara terstruktur dalam pelaksanaan kajian ini, terdapat potensi besar atas peran Remitansi TKI-Purna terhadap terciptanya usaha ekonomi produktif yang dapat menciptakan mata pencaharian berkelanjutan bagi TKI Purna dan keluarganya.

Tabel 5.15.
Proporsi Alokasi Remitansi TKI-Purna untuk Investasi

No	Kabupaten	Proporsi Remitansi untuk Investasi: Usaha Ekonomi Produktif (%)
1	Kabupaten Ponorogo	3,17
2	Kabupaten Blitar	10,40
3	Kabupaten Jember	6,00
Rata-Rata		6,52

Sumber : Rekapitulasi Tabulasi Data Primer, 2013

Tabel 5.16.
Proporsi Alokasi Remitansi TKI-Purna untuk Membeli Tanah/Lahan Produktif

No	Kabupaten	Proporsi Remitansi untuk Membeli Sawah/Lahan Produktif (%)
1	Kabupaten Ponorogo	6,83
2	Kabupaten Blitar	4,50
3	Kabupaten Jember	5,17
Rata-Rata		5,50

Sumber : Rekapitulasi Tabulasi Data Primer, 2013

Berdasar data yang terdapat pada dua tabel di atas, memang hanya sedikit (6,52%) remitansi para TKI-Purna atau keluarganya (yang menjadi responden kajian ini) yang dimanfaatkan untuk investasi misalnya: usaha pracangan, toko galangan, bengkel dan lain sebagainya serta yang memanfaatkan remitansinya untuk membeli tanah/lahan produktif untuk dipergunakan sebagai usaha bidang pertanian. Meski relatif sedikit tapi paling tidak masih ada para TKI-Purna atau keluarganya yang berfikiran maju dan tidak menghabiskan uang kiriman untuk membeli barang-barang konsumtif dan barang habis pakai. Meskipun begitu ada paradigma baru para TKI-Purna atau keluarganya untuk investasi di bidang pendidikan. Semakin sadar pentingnya pendidikan tidak jarang para TKI purna atau keluarganya menyekolahkan anak atau keluarganya untuk menikmati pendidikan setinggi mungkin. Hal ini perlu terus dimotivasi dan ditingkatkan, sebab secara tidak langsung itu juga merupakan investasi sumberdaya manusia yang penting bagi upaya peningkatan kualitas hidup mereka.

Informasi lain yang dapat diungkapkan melalui tabulasi data penggunaan remitansi TKI-Purna adalah bahwa angka rata-rata alokasi remitansi untuk investasi (usaha ekonomi produktif) yang hanya mencapai 6,52% tersebut tidak

melibatkan semua responden. Artinya, ada responden yang mengalokasikan dana untuk investasi di atas angka rata-rata tersebut, namun juga terdapat sejumlah responden yang sama sekali tidak mengalokasikan dananya untuk investasi. Itu bisa kita pelajari melalui data yang tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 5.17.
Responden TKI-Purna yang Tidak Mengalokasikan Dana untuk Investasi
(n=30 x 3 = 90)

No	Kabupaten	f	%
1	Kabupaten Ponorogo	24	74,40
2	Kabupaten Blitar	11	36,67
3	Kabupaten Jember	20	66,67
Rata-Rata		55	61,11

Sumber : Rekapitulasi Tabulasi Data Primer, 2013

Sungguh memprihatinkan bahwa dari 90 orang responden kajian ini, yang mengalokasikan remitansinya untuk usaha ekonomi produktif hanya 55 orang (61,11%), dengan alokasi nilai kapital yang hanya mencapai rata-rata 6,52% dari remitansi yang mereka miliki. Berangkat dari perhitungan angka kasar ini, Tim Peneliti melakukan estimasi bahwa peran remitansi TKI-Purna bagi terciptanya usaha ekonomi produktif yang dapat menciptakan mata pencaharian berkelanjutan bagi TKI-Purna dan keluarganya sebagai berikut :

1. TKI dan TKI-Purna yang relatif sukses menjadi pihak yang berpeluang dapat menjadi aktor pembaharu dalam menciptakan usaha ekonomi produktif yang dapat membuka lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja yang ada di sekitarnya, dan itu dapat menjadi salah pilar pemberdayaan masyarakat miskin.
2. Kenyataan membuktikan bahwa bila hanya melalui mekanisme alamiah, atau tanpa adanya dorongan dan motivasi yang intensif dari pihak luar, maka potensi remitansi tersebut belum optimal dalam menumbuhkan semangat investasi/usaha di kalangan TKI-Purna (dalam kapasitasnya sebagai pemilik remitansi). Ini bisa jadi disebabkan oleh relative kecilnya atau nihilnya motivasi berwirausaha, bisa jadi juga tidak/belum adanya/kecilnya kemampuan untuk menjadi pelaku wirausaha.

3. Apabila TKI-Purna dan keluarganya memiliki motivasi dan kemampuan untuk berwirausaha, maka remitansi yang dimiliki berpeluang dapat menjadi modal yang andal dalam membangun kerajaan bisnis pada tingkat lokal, yang efek tetesan ke bawahnya dapat menciptakan lapangan kerja sekaligus bukan tidak mungkin dapat menciptakan nilai tambah yang dapat meningkatkan daya saing daerahnya.
4. Pendek kata, remitansi TKI-Purna perlu diperankan sebagai mutiara potensi ekonomi yang jika dikelola dengan baik, melalui perencanaan yang matang dan manajemen yang sinergis, serta memperhatikan potensi lokal yang ada; maka bukan tidak mungkin akan dapat menjadi daya ungkit yang dahsyat dalam upaya menciptakan penghasilan berkelanjutan bagi TKI-Purna dan keluarganya, sehingga pengalaman pahit yang terjadi dan menimpa sejumlah TKI-Purna yang pernah sukses di kabupaten Gresik, yang pernah diteliti oleh Mufida (2004) yang ternyata kembali jatuh miskin setelah mereka menjadi TKI-Purna pada tahun ke 6-8; tidak akan terjadi pada para TKI-Purna yang lain, khususnya TKI-Purna yang berasal dari daerah yang menjadi lokasi kajian ini, dan TKI-Purna di seluruh Jawa Timur maupun TKI-Purna di seluruh Indonesia.

5.4. Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Untuk Melakukan Optimalisasi Peran TKI-Purna Dalam Rangka Memberdayakan TKI-Purna dan Keluarganya Serta Masyarakat Miskin

Sesuai diskusi dengan sejumlah informan kajian ini (sebagaimana terdapat dalam Bab II Metodologi) diperoleh data bahwa terkait dengan upaya untuk mengoptimalkan peran Remitansi TKI-Purna dalam rangka memberdayakan TKI-Purna dan keluarganya serta masyarakat miskin yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Pemerintah Kabupaten Blitar, dan Pemerintah Kabupaten Jember, maka pada sub bab ini dipandang perlu melakukan analisis atau evaluasi reflektif terhadap 4 hal berikut, meliputi : (1) analisis terhadap payung kebijakan, (2) analisis terhadap daya

jangkau program (dari aspek kuantitas atau proporsi), dan (3) analisis terhadap efektifitas model pembinaan/bimbingan terhadap TKI-Purna.

5.4.1. Payung Kebijakan

Payung kebijakan terhadap pembinaan TKI-Purna sudah jelas, diantaranya yang penting sebagai berikut:

1. Pasal 73 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Pasal 3 menegaskan bahwa penempatan dan perlindungan TKI bertujuan : (a) memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dengan manusiawi, (b) menjamin dan melindungi calon TKI/TKW sejak di dalam negeri, di negara tujuan sampai kembali ke tempat asal di Indonesia, dan (c) meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya.
2. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Dalam Inpres tersebut diamanatkan mengenai kegiatan pemberdayaan TKI melalui RPJMN 2010 - 2014.
3. Bimtek Perbankan/Keuangan bagi Calon TKI/TKI dan Keluarga TKI serta Bimtek Kewirausahaan bagi TKI-Purna ini masuk dalam agenda Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010 – 2014.
4. Bimtek Perbankan/Keuangan Calon TKI/TKI dan Keluarga TKI serta Bimtek Kewirausahaan bagi TKI Purnayang telah masuk dalam agenda program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 ditargetkan mencapai 17.000 orang.
5. Tempat pelatihan kewirausahaan TKI purna ini diselenggarakan pada 19 Unit Pelayanan di seluruh Indonesia, UPTP3TKI Surabaya selaku pelaksana teknis BNP2TKI yang dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
6. Di Provinsi Jawa Timur, maupun di 3 kabupaten yang menjadi lokasi kajian ini, program Pembinaan TKI-Purna (dengan nama yang bermacam-macam)

telah menjadi agenda kebijakan Pemerintah Daerah. Jadi sudah tidak ada masalah yang berkaitan dengan keberadaan kebijakan pembinaan TKI-Purna di seluruh strata pemerintahan, baik dalam strata nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Artinya bahwa kebijakan Pembinaan TKI Purna itu ada.

5.4.2. Proporsi Yang Dilatih dengan Populasi

Kiranya tidak relevan lagi untuk mempersoalkan eksistensi program yang berkaitan dengan Pembinaan TKI-Purna, sebab eksistensinya jelas, sudah pasti program itu di semua strata. Persoalannya, sudahkan terjadi perbandingan yang proporsional antara jumlah TKI-Purna dengan daya jangkau suatu program ? Berikut adalah data tentang jumlah TKI-Purna yang mengikuti Bimbingan Teknis di Provinsi Jawa Timur.

Tabel 5.18.
Data Pelaksanaan Bimbingan Teknis TKI Purna Timur Tahun 2011

No	Kabupaten / Kota	Angkatan I	Angkatan II	Jumlah
01.	Kabupaten Bojonegoro	15 orang	-	15 orang
02.	Kabupaten Lamongan	15 orang	-	15 orang
03.	Kabupaten Tuban	10 orang	-	10 orang
04.	Kabupaten Gresik	10 orang	-	10 orang
05.	Kota Surabaya	10 orang	-	10 orang
06.	Kabupaten Sampang	30 orang	-	30 orang
07.	Kabupaten Madiun	15 orang	15 orang	30 orang
08.	Kabupaten Ponorogo	15 orang	15 orang	30 orang
09.	Kabupaten Magetan	15 orang	-	15 orang
10.	Kabupaten Ngawi	15 orang	-	15 orang
11.	Kabupaten Kediri	10 orang	-	10 orang
12.	Kabupaten Tulungagung	15 orang	10 orang	25 orang
13.	Kabupaten Trenggalek	15 orang	10 orang	25 orang
14.	Kabupaten Blitar	10 orang	-	10 orang
15.	Kabupaten Malang	10 orang	-	10 orang
16.	Kota Malang	10 orang	-	10 orang
17.	Kabupaten Pasuruan	15 orang	-	15 orang
18.	Kabupaten Probolinggo	15 orang	-	15 orang
19.	Kabupaten Lumajang	15 orang	-	15 orang
20.	Kabupaten Jember	15 orang	-	15 orang
21.	Kabupaten Bondowoso	15 orang	-	15 orang
22.	Kabupaten Situbondo	15 orang	-	15 orang
Jumlah		310 orang	50 orang	360 orang

Sumber : UPT P3 TKI Jawa Timur ,2011

Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian terkait dengan pelaksanaan Bimbingan Teknis TKI Purna adalah belum ada keseimbangan

antara jumlah TKI Purna dengan dengan jumlah TKI Purna yang mendapat kesempatan untuk dilatih dan/atau menjadi peserta Bimbingan Teknis. Berikut ini disajikan tentang data jumlah TKI Purna pada tahun 2012 dan data jumlah TKI Purna yang menjadi peserta Bimbingan Teknis, yang diselenggarakan oleh UPT P3 TKI Provinsi Jawa Timur Provinsi Jawa Timur Tahun 2012.

Tabel 5.19.

Rekapitulasi Kedatangan TKI Di Bandara Juanda Tahun 2012

No	Bulan	Jumlah	Status Kepulangan TKI		
			Finish	Cuti	Kasus
1	Januari	4.858	2.753	1.773	332
2	Pebruari	5.900	3.272	2.137	491
3	Maret	6.190	3.267	2.449	474
4	April	5.579	3.136	1.971	472
5	Mei	6.481	3.555	2.468	458
6	Juni	6.306	3.352	2.618	336
7	Juli	6.999	3.477	3.104	418
8	Agustus	12.057	3.312	8.501	244
9	September	5.643	2.822	2.572	249
10	Oktober	5.038	2.131	2.727	182
11	Nopember	5.158	2.294	2.635	229
12	Desember	6.218	2.577	3.396	245
Total		76.427	35.948	36.349	4.130
%		100	47.00	47.60	5.40

Sumber: UPT P3 TKI Provinsi Jawa Timur, 2012

Berdasar tabel 5.19 dapat diketahui bahwa dari 76.427 orang TKI yang pulang lewat Bandara Juanda pada tahun 2013, maka **35.948 orang** diantaranya (47,00%) nya adalah TKI Purna. Pada tahun yang sama data jumlah peserta Bimbingan Teknis para TKI Purna hanya mencapai **760 orang** (lihat tabel 5.20). Ini berarti bahwa proporsi TKI Purna yang menjadi peserta Bimbingan Teknis pada Tahun 2012 dibandingkan dengan dengan jumlah TKI Purna yang pulang pada tahun yang sama hanya mencapai angka 2,11%.

Tabel 5.20.
Rekapitulasi TKI Purna yang Menjadi Peserta Bimtek dan Edukasi
Kewirausahaan dan Perbankan Jawa Timur Tahun 2012

No	Nama Program	Frekuensi & Peserta	Jumlah Peserta
1	Bimbingan Teknis TKI Purna	12 x 30 orang	360 orang
2	Edukasi Kewirausahaan dan Perbankan	8 x 50 orang	400 orang
Total			760 orang

Sumber: UPT P3 TKI Provinsi Jawa Timur, 2013

Sedangkan pada Tahun 2013 UPT P3 TKI Provinsi Jawa Timur hanya menyelenggarakan Bimbingan Teknis sebanyak 3 angkatan dengan jumlah peserta masing-masing angkatan 30 orang, sehingga jumlah total peserta Bimtek tahun 2013 ada **90 orang**. Jumlah ini menurun jauh dengan jumlah peserta Bimtek TKI Purna pada tahun 2013. Jika jumlah peserta Bimtek TKI Purna pada tahun 2013 ini dibandingkan dengan jumlah TKI Purna pada tahun 2013 yang mencapai **27.918 orang** (lihat tabel 5.21), maka proporsi peserta Bimtek hanya mencapai **0,32%**.

Tabel 5.21
Rekapitulasi Kedatangan TKI Di Bandara Juanda Tahun 2013

NO	Bulan	Jumlah	Status Kepulangan TKI		
			Finish	Cuti	Kasus
1	Januari	4.008	2.135	1.597	276
2	Pebruari	4.164	1.847	2.049	268
3	Maret	4.728	2.271	2.176	281
4	April	4.913	2.396	2.125	392
5	Mei	4.980	2.479	2.198	303
6	Juni	5.198	2.565	2.360	273
7	Juli	8.446	3.191	4.979	276
8	Agustus	9.463	2.316	6.944	203
9	September	4.163	1.853	2.065	245
10	Oktober	5.642	2.380	3.013	249
11	Nopember	5.223	2.187	2.804	232
12	Desember	6.175	2.298	3.630	247
Total		67.103	27.918	35.940	3.245
%		89.00	41.60	43.60	4.80

Sumber: UPT P3 TKI Provinsi Jawa Timur, 2013

Disamping Bimtek yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, BNP2TKI juga menyelenggarakan Bimtek dengan dua agenda utama yaitu Bimbingan dan Edukasi Perbankan dan Edukasi Kewirausahaan. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 bahwa ditargetkan program tersebut mencapai 17.000 orang pada akhir tahun 2014. Tabel berikut menyajikan tentang realisasi program edukasi keuangan dan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh BNP2TKI mulai tahun 2010 sampai dengan bulan Oktober 2013.

Tabel 5.22.

Pelaksanaan Edukasi Keuangan dan Kewirausahaan TKI Program RPJMN 2010 - 2014 Dengan Dana APBN (Seluruh Provinsi di Indonesia)

No	Tahun	Edukasi Keuangan	Edukasi Kewirausahaan	Jumlah
1.	2010	300 orang	455 orang	755 orang
2.	2011	1.810 orang	1.277 orang	3.087 orang
3.	2012	1.800 orang	1.700 orang	3.500 orang
4.	Oktber 2013	2.150 orang	2.200 orang	4.350 orang
Jumlah		6.060 orang	5.632 orang	11.692 orang

Sumber : Direktorat Pemberdayaan BNP2TKI, 2013

Disamping Bimtek yang diselenggarakan oleh Provinsi Jawa Timur dan oleh PNP2TKI, Kabupaten/Kota juga menyelenggarakan Bimtek bagi TKI Purna, hanya saja secara keseluruhan proporsinya masih relatif kecil jika dibandingkan jumlah TKI Purna yang mengakhiri masa kontrak pada tiap-tiap tahun berjalan. Sebagai contoh, Kabupaten Jember pada tahun 2013 menyelenggarakan bimbingan teknis kepada para TKI-Purna dengan peserta 50 orang, akan tetapi. Jumlah itu diperkirakan tidak lebih dari 2 persen dari jumlah TKI Purna yang pulang mengakhiri masa kontrak pada tahun 2013.

5.4.3. Model Pembinaan/Bimbingan

Berdasarkan penelusuran terhadap data primer melalui forum FGD dan terutama penelusuran terhadap data sekunder yaitu dokumen kebijakan dan program kegiatan pada institusi birokrasi yang berwenang, maka tidak diragukan lagi bahwa program pembinaan TKI-Purna itu ada/eksis dengan kuantitas

jangkauan yang sudah jelas relative kecil. Kini, yang menjadi penting untuk dipikirkan adalah bagaimana model pemberdayaan TKI-Purna itu, meliputi : (1) apa substansi pembinaannya, (2) bagaimana metodologi yang dikembangkan, (3) bagaimana kesesuaian antara kebutuhan TKI-Purna yang bervariasi itu dengan materi yang diberikan, (4) dan yang paling penting adalah bagaimana tindak lanjut dari program itu, apakah cukup dianggap selesai dengan hanya memberikan pembinaan, atau mengantarkan dan mendampingi mulai dari nol sampai dengan TKI-Purna tersebut benar-benar memiliki unit usaha ekonomi produktif.

Sebagai komparasi dan wacana, program edukasi perbankan dan edukasi kewirausahaan yang dilakukan oleh BNP2TKI memiliki 4 tujuan dan substansi utama edukasi, yaitu :

1. Dapat memberikan pemahaman mengelola pendapatan secara bijak dari penghasilan TKI yang bekerja di luar negeri. Dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya memiliki tabungan sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan keuangan setelah tidak menjadi TKI atau TKI purna.
2. Dapat memberikan pengetahuan dasar yang terkait dengan pinjaman serta memberikan informasi pilihan mengenai sumber pinjaman dari perbankan atau lembaga keuangan lain yang relatif aman, nyaman dan bertanggung jawab.
3. Dapat memberikan informasi tentang cara-cara mengirim uang dan mengelolanya dengan tepat guna (bagi keluarga TKI)
4. Dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya memiliki asuransi dalam rangka mengurangi risiko keuangan yang dapat terjadi dalam proses pencapaian tujuan keuangan. Para peserta edukasi juga dikenalkan mengenai cara mengajukan klaim asuransi TKI.

Kegiatan edukasi perbankan dan kewirausahaan diharapkan membuat TKI Purna akan bertambah pengetahuan dan ketrampilan dalam mengelola keuangan, baik uang tabungan sendiri maupun aliran uang yang dikirim dari luar negeri, karena selama ini aliran uang masuk (remitansi) belum terarah penggunaannya,

lebih banyak digunakan untuk hal-hal konsumtif, dan belum terfikirkan untuk mengelola uang hasil kerjanya untuk kegiatan produktif.

Pertanyaan besar yang diajukan adalah, apakah program semacam itu efektif untuk mengantarkan para TKI-Purna termotivasi dan mampu membuka usaha ekonomi produktif sebagaimana yang tertuang dalam tujuan program tersebut?

Data yang dihimpun berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi UPT P3 TKI Provinsi Jawa Timur menyebutkan bahwa tidak kurang dari 60% dari TKI Purna yang pernah mengikuti Bimbingan Teknis dan Edukasi Perbankan dan Kewirausahaan, melakukan persiapan menuju diciptakannya usaha ekonomi Produktif.

Data tersebut menjadi bukti empirik bahwa program Bimtek dan Edukasi Perbankan dan Kewirausahaan layak dikatakan dapat menginspirasi para TKI Purna untuk berusaha menciptakan usaha ekonomi produktif sebagai sumber mata pencaharian yang berlanjut.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Sejumlah kesimpulan yang dapat dituangkan dalam rangka menjawab rumusan permasalahan kajian ini, adalah :

Bagaimana kecenderungan peran remitansi TKI-Purna terhadap peningkatan kesejahteraan TKI-Purna dan keluarganya?

1. Berdasarkan serangkaian data yang dikumpulkan selama kajian ini, maka dapat diketahui bahwa para TKI-Purna yang berpredikat dan/atau dapat disebut sebagai TKI yang relatif sukses, dengan masa juang/kerja sekurang-kurangnya selama 3 tahun, mereka dapat memenuhi kebutuhan primernya, bahkan juga kebutuhan sekundernya, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya (baik yang hanya bisa dinikmati oleh keluarga batih maupun sampai ke keluarga inti/besar). Dalam perspektif ini dapat dipahami apabila kesuksesan TKI (yang sekarang telah menjadi TKI-Purna), dalam jangka pendek, atau yang sampai dengan saat ini dapat dirasakan, adalah **meningkatkan kesejahteraan TKI-Purna beserta keluarganya**, yang ditandai oleh dapat terpenuhinya sejumlah kebutuhan (sekurang-kurangnya 3 kelompok kebutuhan dari 7 kelompok kebutuhan yang dapat diidentifikasi) sebagaimana diuraikan pada beberapa tabel pada sub bab 5.2.
2. Berdasarkan tabulasi data dari jawaban responden yang dikemukakan secara verbal di sepanjang berlangsungnya wawancara terstruktur juga dapat diketahui bahwa tidak kurang dari 78 orang dari 90 orang (78,67%) menyatakan bahwa dirinya dan keluarganya mengalami peningkatan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bermuara pada meningkatnya kesejahteraan mereka. Maka Tim Peneliti membangun asumsi bahwa dalam jangka pendek (mulai menjadi TKI sampai dengan 5 tahun pasca menjadi TKI-Purna) terjadi peningkatan kesejahteraan pada diri TKI-Purna beserta keluarganya (catatan: bagi TKI-Purna yang sukses).
3. Asumsi ini dibangun di atas ketetapan metodologis kajian ini, bahwa yang menjadi populasi kajian ini adalah kelompok TKI-Purna yang dapat dikatakan

relatif sukses. Pada saat yang sama tentu Tim peneliti menyadari bahwa di samping ada kelompok TKI-Purna yang sukses (sebagaimana yang menjadi responden kajian ini), ada pula kelompok TKI-Purna yang tidak/kurang sukses yang ditandai oleh tidak diperolehnya penghasilan yang wajar dalam mekanisme pasar sebagai TKI; bahkan lebih dari itu tidak dapat dipungkiri bila ada kelompok TKI-Purna yang pulang tidak membawa apa-apa, justru pulang membawa petaka, bahkan ada yang pulang tinggal nama. Kelompok TKI-Purna yang demikian ini sedang tidak menjadi populasi kajian ini, mengingat topik kajian ini bersangkutan-paut dengan upaya untuk menempatkan TKI-Purna sebagai agen perubahan dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin di lingkungan tempat tinggal mereka melalui program usaha ekonomi produktif yang dapat menciptakan penghasilan berkelanjutan yang bertumpu pada kekuatan modal dana, modal pengalaman kerja dan modal sosial yang telah mereka genggam.

4. Hampir semua (tidak kurang dari 80%) TKI-Purna menyatakan bahwa sebelum menjadi TKI, keluarga mereka mengalami persoalan kekurangan sumberdaya (baca = dana) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. **Remitansi yang mereka kirim ke tanah air, karenanya, diakui sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan pokok untuk hidup layak.**
5. Remitansi TKI-Purna menjadi instrumen peningkatan pemenuhan kebutuhan pokok, yang pada intinya ketika keluarga sudah mendapatkan pengiriman uang remitansi, pemenuhan kebutuhan keluarga TKI untuk makin menjadi lebih tinggi kualitasnya.
6. Berdasarkan rekapitulasi perkiraan alokasi dana remitansi TKI-Purna sebagaimana tersebut di depan, maka dapat diketahui bahwa dari ke tujuh jenis belanja TKI-Purna dan keluarganya dari sumber remitansi, peringkatnya sebagai berikut:
 - 1) Renovasi Rumah (25,14%)
 - 2) Konsumsi : makanan, pakaian, perkakas rumah, elektronik, kendaraan (20,41%)
 - 3) Kesehatan dan Pendidikan (15,71%)
 - 4) Lain-lain, terutama: membayar pinjaman/hutang (15,30%)

- 5) Tabungan dan Perhiasan (11,41)
- 6) Investasi : Unit Ekonomi Produktif yang mendatangkan penghasilan berkelanjutan (6,52%)
- 7) Membeli tanah (5,50%).

Bagaimanakah kecenderungan peran remitansi TKI-Purna terhadap terciptanya usaha ekonomi produktif yang dapat menciptakan mata pencaharian berkelanjutan bagi TKI-Purna dan keluarganya?

1. TKI dan TKI-Purna yang relatif sukses menjadi pihak yang berpeluang dapat menjadi aktor pembaharu dalam menciptakan usaha ekonomi produktif yang dapat membuka lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja yang ada di sekitarnya, dan itu dapat menjadi salah pilar pemberdayaan masyarakat miskin.
2. Kenyataan membuktikan bahwa bila hanya melalui mekanisme alamiah, atau tanpa adanya dorongan dan motivasi yang intensif dari pihak luar, maka potensi remitansi tersebut belum optimal dalam menumbuhkan semangat investasi/usaha di kalangan TKI-Purna (dalam kapasitasnya sebagai pemilik remitansi). Ini bisa jadi disebabkan oleh relatif kecilnya atau nihilnya motivasi berwirausaha, bisa jadi juga tidak/belum adanya/kecilnya kemampuan untuk menjadi pelaku wirausaha.
3. Apabila TKI-Purna dan keluarganya memiliki motivasi dan kemampuan untuk berwirausaha, maka remitansi yang dimiliki berpeluang dapat menjadi modal yang andal dalam membangun kerajaan bisnis pada tingkat lokal, yang efek tetesan ke bawahnya dapat menciptakan lapangan kerja sekaligus bukan tidak mungkin dapat menciptakan nilai tambah yang dapat meningkatkan daya saing daerahnya.
4. Pendek kata, remitansi TKI-Purna perlu diperankan sebagai mutiara potensi ekonomi yang jika dikelola dengan baik, melalui perencanaan yang matang dan manajemen yang sinergis, serta memperhatikan potensi lokal yang ada; maka bukan tidak mungkin akan dapat menjadi daya ungkit yang dahsyat dalam upaya menciptakan penghasilan berkelanjutan bagi TKI-Purna dan keluarganya, sehingga pengalaman pahit yang terjadi dan menimpa sejumlah TKI-Purna

yang pernah sukses di kabupaten Gresik, yang pernah diteliti oleh Mufida (2004) yang ternyata kembali jatuh miskin setelah mereka menjadi TKI-Purna pada tahun ke 6-8; tidak akan terjadi pada para TKI-Purna yang lain, khususnya TKI-Purna yang berasal dari daerah yang menjadi lokasi kajian ini, dan TKI-Purna di seluruh Jawa Timur maupun TKI-Purna di seluruh Indonesia.

Kebijakan apa yang telah diambil oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten untuk melakukan optimalisasi peran TKI-Purna dalam rangka memberdayakan TKI-Purna dan keluarganya serta masyarakat miskin ?

1. Terdapat dua macam pembinaan terhadap TKI Purna : (1) Bimbingan Teknis, (2) Edukasi Perbankan dan Kewirausahaan. Pelaksana kegiatan ini di tingkat provinsi adalah UPT P3 TKI dengan dukungan dana dari APBD Provinsi dan pada tingkat Kabupaten/Kota adalah Dinas Tenaga Kerja (atau nama lain yang sejenis) dengan dukungan dana dari APBD Kabupaten/Kota.
2. TKI Purna yang terjangkau oleh pembinaan yang diagendakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak lebih dari 2% dari jumlah TKI Purna pada tahun berjalan. Tentu jumlah ini merupakan kondisi yang belum ideal.
3. Tidak kurang dari 60% dari jumlah TKI Purna yang telah mendapatkan pembinaan, baik peminan melalui Bimbingan Teknis maupun Edukasi Perbankan dan Kewirausahaan, sedang dan/atau telah memproses persiapan menciptakan unit usaha.
4. Tidak dapat dipungkiri, sejumlah besar TKI Purna mengalami persoalan tidak memiliki penghasilan berkelanjutan sebagai sumber pendapatan yang berlenjut. Akibatnya tidak sedikit TKI Purna yang pernah sukses kemudian kembali jatuh miskin.

6.2. Rekomendasi

Langkah konkrit yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten sebagai upaya melakukan optimalisasi peran TKI-Purna dalam rangka memberdayakan TKI-Purna dan keluarganya serta masyarakat miskin ?

1. Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu menetapkan target jumlah TKI Purna yang dapat dibina dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Target tersebut lebih baik dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, sebagaimana secara nasional target ini juga tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

2. Secara nasional, target sebagaimana tertuang pada butir 1 tersebut adalah 170.000 orang TKI Purna. Angka tersebut diperkirakan setara dengan 0,5% dari jumlah TKI Purna pada kurun waktu lima tahun berjalan. Untuk Jawa Timur target dimaksud jika memungkinkan mencapai 5% dari perkiraan jumlah TKI Purna pada kurun waktu lima tahun berjalan. (data dua tahun terakhir, tahun 2012 = hanya 2,00%, tahun 2013 hanya 0,5%). Sudah barang tentu target ini perlu dilengkapi dengan dukungan dana, sumberdaya manusia, dan sarana=prasarana serta dukungan lain yang diperlukan.
3. Bahwa identifikasi terhadap TKI-Purna menjadi sesuatu yang amat penting sebagai salah satu langkah menuju dapat terbinanya dengan baik para TKI-Purna dan terdayagunakannya segenap potensi yang dimiliki oleh para TKI-Purna untuk berperan sebagai agen perubahan dalam menciptakan penghasilan berkelanjutan bagi diri dan keluarganya, menciptakan lapangan pekerjaan bagi publik di lingkungan tempat tinggalnya dan berkontribusi dalam upaya memberdayakan masyarakat, terutama masyarakat miskin. Untuk itu Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan perlu melakukan Identifikasi terhadap TKI-Purna, baik menyangkut kuantitas maupun profilnya, guna mengetahui apakah pada jangka waktu 5 tahun pasca menjadi TKI Purna mereka memiliki penghasilan berkelanjutan atau tidak.
4. Berdasar temuan di lapangan : jika tidak ada keputusan tentang pengembangan model pembinaan TKI Purna, maka panduan pembinaan TKI Purna yang telah disusun oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi cukup dapat menjadi acuan dalam melakukan pembinaan TKI Purna, sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak harus menyusun panduan lagi. Hanya saja untuk materi Bimtek, dengan tema yang sama, perlu materi yang disesuaikan dengan keadaan (potensi maupun masalah) pada tingkat lokal.
5. Selama ini pasca pelaksanaan Bimtek dan atau Edukasi, hanya ada monitoring. Sebaiknya selain dilakukan monitoring juga dilakukan pendampingan lanjutan, misalnya berupa konseling, fasilitasi perijinan usaha,

fasilitasi pemasaran, dan sebagainya sampai dengan usaha TKI Purna bebar-benar dapat berjalan.

6. Pokok-Pokok pikiran yang dapat menjadi acuan dalam pengembangan model pembinaan TKI Purna di Provinsi Jawa Timur dituangkan dalam matriks berikut ini.

Tabel 6.1
Pokok-Pokok Pikiran Pengembangan Model Pembinaan TKI Purna

No	Variabel	Uraian
1	Lembaga utama (<i>leading sector</i>) yang menjadi pelaksana program Pembinaan TKI-Purna di Provinsi Jawa Timur dan di Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Di Provinsi Jawa Timur = Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (UPT P3 TKI). 2. Di Kabupaten/Kota ; Dinas Tenaga Kerja
2	Lembaga lain yang dapat bersinergi dan alternatif model sinergi yang ditawarkan dalam rangka pelaksanaan program ini	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baik pada tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota, terutama: Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pemberdayaan Perempuan. 2. Dunia Usaha 3. Organisasi Kemasyarakatan 4. Asosiasi TKI Purna
3	Substansi program pembinaan	Sesuai panduan yang diterbitkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, hanya aja pengembangan materi disesuaikan dengan potensi lokal
4	Metode pembinaan	<p>Menggunakan multi metoda :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemaparan materi untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta pemahaman. 2. Praktek/pelatihan untuk menambah atau menciptakan keahlian 3. Testimoni kisah sukses TKI Purna 4. Studi banding 5. Pemutaran film 6. Latihan Penyusunan perencanaan bisnis 7. Magang pada teman TKI Purna yang telah memili usaha terlebih dulu 8. Konseling

No	Variabel	Uraian
5	Waktu yang diperlukan untuk merealisasikan program ini dan tahap-tahap apa saja harus dilakukan	Satu tahun, dengan tahapan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana pengembangan model 2. Diskusi dengan pihak-pihak yang terkait 3. Penyempurnaan rencana pengembangan 4. Uji coba 5. Penyempurnaan 6. Upaya mendapatkan dukungan dana dalam skema APBD dan sumber dana yang lain 7. Draft kebijakan/program 8. Pengesahan 9. Implementasi
6	Tempat untuk melaksanakan program pembinaan	Multi tempat untuk satu paket pembinaan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Klasikal 2. Lapangan : misalnya di tempat usaha TKI Purna yang sudah sukses 3. Di Bank 4. Di kantor perijinan 5. Tempat lain sesuai keperluan
7	Peserta	TKI Purna yang pelaksanaannya dikelompokkan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai daerah tempat tinggal 2. Sesuai Bidang usaha yang dminati
8	Target jangka pendek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terciptanya motivasi berwirausaha 2. Bertambahnya pengetahuan tentang wirausaha 3. Terciptanya keahlian untuk membuka dan menjalankan usaha
9	Tujuan jangka panjang	Terciptanya usaha ekonomi produktif bagi TKI Purna
10	Apa ukuran keberhasilan	Pasca menjadi TKI, para TKI Purna memiliki penghasilan berkelanjutan
11	Sumberdaya apa yang diperlukan	Dana, SDM, Sarana-prasarana
12	Cara menjaga keberlanjutan	Komitmen
13	<i>Core competence</i> yang menjadi ciri program ini	Disesuaikan dengan potensi lokal
14	Proyeksi kesulitan yang dihadapi	Nihilnya semangat usaha, tidak tangguh menghadapi tantangan dan kesulitan, kebijakan tidak konsisten, komitmen Pemerintah Daerah tidak kondusif

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2006, *Laporan Tahunan Kondisi Tenaga Kerja Indonesia*, Jakarta.
- Badan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI) Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur, 2009, *Laporan Kajian Pelayanan Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia*, Surabaya.
- Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur, 2011, *Informasi Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur*, Surabaya.
- Miles, Matthew dan Michael Huberman, 1992, *Analisis data Kualitatif*, alih bahasa: Tjejep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI Press.
- Mufida, 2005, *Pengembangan Model Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia di Kabupaten Gresik*, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya.
- Wawa, Jannes Eudes, 2005, *Ironi Pahlawan Devisa*, Penerbit Buku Kompas Gramedia, Jakarta.
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 2007, *Laporan Kegiatan Survey dan Pembinaan Mental Spiritual Bagi TKI Asal Jawa Timur di Hongkong*.
- United Nations Development Program (UNDP) 2011, *Human Development Report*, New York.
- Kerangka Mata Pencarian Berkelanjutan, oleh Dr. I Dewa Made Darma Setiawan <http://www.balipost.com/balipostcetak/2007/9/11/op2.htm>
- Nikijuluw, 2002, *Rezim Pengelola Sumber Daya Perikanan*, Jakarta
- Moeljarto Tjokrowinoto, 1996, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*
- Moeljarto Tjokrowinoto, 1993, *Sasaran Wawasan Pendidikan kebangsaan*
- Bryant C. & White, L.G., 1982, *Managing Development in The Third World*
- Zamani dan Darmawan, 2000, *Community-Based Management (CBM)*
- Sumber Lain:
-,2012, Kabupaten Ponorogo Dalam Angka 2011, BPS Provinsi Jawa Timur
-,2012, Kabupaten Blitar Dalam Angka 2011, BPS Provinsi Jawa Timur

-,2012, Kabupaten Jember Dalam Angka 2011, BPS Provinsi Jawa Timur
-,2012, Data dan Informasi Kemiskinan 2011, BPS Provinsi Jawa Timur
- (http://www.jurnas.com/news/85371/IPM_Indonesia_Naik_Peringkat/1/Sosial_Budayaan/Humaniora#sthash.m8CuxMaB.dpu).
- (<http://hdr.undp.org/en/reports>).
- http://www.jurnas.com/news/85371/IPM_Indonesia_Naik_Peringkat/1/Sosial_Budayaan/Humaniora#sthash.x0ZBzt4C.dpuf
- Publikasi Hasil Seminar Nasional “TKI dalam Perlindungan dan Kebijakan Publik”
http://www.jurnas.com/news/112055/Pemerintah_Dorong_Pertumbuhan_Ekonomi_di_Kantong_TKI/1/Ekonomi/Ekonomi#sthash.ioGPsawB.dpuf
- Arif, Achmad (2005), *Makalah Seminar Ekonomi Biaya Tinggi*, Balitbang Propinsi Jawa Timur, Surabaya.
- Bellante D and Mark Jackson, 1983, *Ekonomi Ketenagakerjaan*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas), 2007, *Kajian Empirik Kondisi Eksisting Permasalahan Pembangunan di Indonesia*, Paper Pendukung Naskah Akademik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
- Caiden, Gerald (1982), *Management Strategic for Administrative Reform*, University of California, Berkeley.
- Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2006, *Laporan Tahunan Kondisi Tenaga Kerja Indonesia*, Jakarta.
- Haryati, Eny (2005), “*Kapan Pelayanan Prima Birokrasi Jatim?*”, dalam *Kompas*, 14 September 2005.
- Iriantara, Yosol (2004), *Community Relations : Konsep dan Aplikasinya*, Cetakan Pertama, Simbiosis Rekatama Media, Bandung.
- Miles, Matthew dan Michael Huberman, (1992), *Analisis data Kualitatif*, alih bahasa: Tjeep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI Press.
- Mufida, 2005, *Pengembangan Model Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia di Kabupaten Gresik*, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya

Nawa, Jannes Eudes, 2005, *Ironi Pahlawan Devisa*, Penerbit Buku Kompas Gramedia, Jakarta.

Osborne, David & Gaebler, Ted (1992), *Reinventing Government*, edisi terjemahan : *Mewirusahaakan Birokrasi : Mentransformasi Semangat Wirausaha ke dalam Sektor Publik*, Cetakan Ke-VII, Penerbit PPM, Jakarta.